



**PEMETAAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN RUMAH
TANGGA MISKIN DI KAWASANKUMUH
KOTA BANJARMASIN**

Editor
Dr. Syaharuddin, M.A.
Dr. Ahmad Yunani, M.Si.

Secara geografis kemiskinan memiliki keterkaitan dengan wilayah secara fungsional. Kemiskinan perkotaan kini menjadi isu yang kian relevan dan mendesak untuk ditangani terkait dengan tren dinamika pembangunan perkotaan di Indonesia. Sebagai ilustrasi, sepanjang 1980 hingga 2010, pertumbuhan populasi perkotaan di Indonesia mencapai 3,85% dan ini membuat proporsi penduduk perkotaan meningkat dari 22,10% pada tahun 1980 menjadi 44,28% pada 2010. Data juga menunjukkan bahwa proporsi penduduk miskin yang tinggal di perkotaan meningkat pesat dari 18,45% pada 1976 menjadi 36,61% pada 2009. Dari data tersebut terlihat bahwa kecenderungan urbanisasi kependudukan di Indonesia juga diikuti dengan urbanisasi kemiskinan yang lebih lanjut berdampak pada timbulnya berbagai aspek persoalan kemiskinan perkotaan seperti aspek fisik (berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur dan sarana transportasi) dan aspek nonfisik seperti kondisi sosial-ekonomi (keterbatasan lapangan pekerjaan, kesenjangan, ketidakadilan), ataupun aspek ekologis (banjir dan pencemaran lingkungan)

ISBN : 978-602-51669-8-3

**PEMETAAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN RUMAH
TANGGA MISKIN DI KAWASANKUMUH
KOTA BANJARMASIN**

Editor

Dr. Syaharuddin, M.A.
Dr. Ahmad Yunani, M.Si.

Penulis

Dr. Nasruddin, M.Sc.
Dr. Arif Rahman Nugroho, M.Sc.
Dr. Ellyn Normelani, M.S.
Dr. Rosalina Kumalawati, M.Si.
Dr. Norma Yuni Kartika, M.Pd., M.Sc.
Syahlan Mattiro, SH., M.Si.
Selamat Riadi, M.Pd.
M. Efendi, M.Pd.

**Program Studi Pendidikan IPS
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin**

Editor

Dr. Syaharuddin, M.A.
Dr. Ahmad Yunani, M.Si.

Penulis

Dr. Nasruddin, M.Sc.
Dr. Arif Rahman Nugroho, M.Sc.
Dr. Ellyn Normelani, M.S.
Dr. Rosalina Kumalawati, M.Si.
Dr. Norma Yuni Kartika, M.Pd., M.Sc.
Syahlan Mattiro, SH., M.Si.
Selamat Riadi, M.Pd.
M. Efendi, M.Pd.

**PEMETAAN DAN STRATEGI
PEMBIAYAAN RUMAH TANGGA
MISKIN DI KAWASAN KUMUH
KOTA BANJARMASIN**

PEMETAAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN RUMAH TANGGA MISKIN DI KAWASAN KUMUH KOTA BANJARMASIN

Copyright@2020, Nasruddin, dkk. Hak Cipta dilindungi undang-undang

Penulis : Nasruddin, dkk.
Setting/Layout : Fathurrahman
Desain Sampul : M. Fikri Ramadhana
Pemeriksa Aksara : Lutfi Nawang Wulan
Cetakan Pertama : November 2020
Foto Sampul : Kawasan Kumuh Kota Banjarmasin.

Sumber:

<https://kalsel.prokal.co/read/news/44014-muncul-344-ha-kawasan-kumuh-baru-di-banjarmasin.html>

Diterbitkan oleh:
Program Studi Pendidikan IPS
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

ISBN : 978-602-51669-8-3

Editor

Dr. Syaharuddin, M.A.
Dr. Ahmad Yunani, M.Si.

Penulis

Dr. Nasruddin, M.Sc.
Dr. Arif Rahman Nugroho, M.Sc.
Dr. Ellyn Normelani, M.S.
Dr. Rosalina Kumalawati, M.Si.
Dr. Norma Yuni Kartika, M.Pd., M.Sc.
Syahlan Mattiro, SH., M.Si.
Selamat Riadi, M.Pd.
M. Efendi, M.Pd.

PEMETAAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN RUMAH TANGGA MISKIN DI KAWASAN KUMUH KOTA BANJARMASIN

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu bulan) dan/atau dengan paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Secara geografis kemiskinan memiliki keterkaitan dengan wilayah secara fungsional. Kemiskinan perkotaan kini menjadi isu yang kian relevan dan mendesak untuk ditangani terkait dengan tren dinamika pembangunan perkotaan di Indonesia.

Sebagai ilustrasi, sepanjang 1980 hingga 2010, pertumbuhan populasi perkotaan di Indonesia mencapai 3,85% dan ini membuat proporsi penduduk perkotaan meningkat dari 22,10% pada tahun 1980 menjadi 44,28% pada 2010. Data juga menunjukkan bahwa proporsi penduduk miskin yang tinggal di perkotaan meningkat pesat dari 18,45% pada 1976 menjadi 36,61% pada 2009.

Dari data tersebut terlihat bahwa kecenderungan urbanisasi kependudukan di Indonesia juga diikuti dengan urbanisasi kemiskinan yang lebih lanjut berdampak pada timbulnya berbagai aspek persoalan kemiskinan perkotaan seperti aspek fisik (berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur dan sarana transportasi) dan aspek nonfisik seperti kondisi sosial-ekonomi (keterbatasan lapangan pekerjaan, kesenjangan, ketidakadilan), ataupun aspek ekologis (banjir dan pencemaran lingkungan).

Buku monograf ini membahas setidaknya tiga hal utama, yakni pertama, potensi dan serapan kredit berdasarkan aspek perilaku; Kedua, strategi pengembangan jasa layanan di lingkungan kumuh; dan ketiga, proyeksi potensi kredit terhadap masyarakat miskin di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin yang akan datang.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat khususnya para pengambil kebijakan di Kota Banjarmasin, akademisi, dan masyarakat kota Banjarmasin umumnya.

Banjarmasin, 10 November 2020

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Output Kegiatan	7
E. Rencana Pelaksanaan Kegiatan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pemberdayaan Masyarakat	9
B. Segmentasi Pembiayaan	11
1. Konsep Pembiayaan	11
2. Segmentasi Pembiayaan	14
C. Kemiskinan	17
1. Konsep Kemiskinan	17
2. Karakteristik Kemiskinan	20
D. Kawasan Kumuh	22
1. Konsepsi Pemukiman Kumuh	22
2. Penyebab Perkembangan Permukiman Kumuh	23
3. Kawasan Kumuh	24
4. Tipologi Kawasan Kumuh	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Desain Penelitian	29
B. Populasi dan Sampel	29
C. Variabel Penelitian	31
D. Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian.....	35
1. Letak Luas dan Batas Wilayah	35
2. Hidrologi	39
3. Iklim	44
4. Topografi dan Kemiringan Lereng	45
5. Geologi dan Tanah	45
6. Penggunaan Lahan dan Rencana Pola Ruang	48
7. Kawasan Kumuh Kota Banjarmasin	52
B. Rumah Tangga Miskin di Lingkungan Kumuh Kota Banjarmasin	62
1. Kondisi Umum Rumah Tangga Miskin di Lingkungan Kumuh Kota Banjarmasin	62
a. Kelurahan	63
b. Umur	65
c. Suku	65
d. Status Pernikahan	66
e. Tanggungan Keluarga	67
f. Umur	67
g. Status SHM/IMB	68
h. Proses Kepemilikan SHM/IMB	69
i. Relokasi	70
2. Rumah Tangga Miskin menurut Kriteria Badan Pusat Statistik (BPS).....	73
a. Status Tempat Tinggal	75
b. Lokasi Tempat Tinggal	75
c. Akses (Jalan)	77
d. Luas Lantai Bangunan	79
e. Jenis Lantai Bangunan	82
f. Jenis Dinding Bangunan.....	83
g. Jenis Atap Bangunan	84
h. Fasilitas BAB	85
i. Sumber Air Minum	86
j. Sumber Air PDAM.....	87
k. Sumber Air MCK	88
l. Sumber Penerangan	89

m. Daya PLN	90
n. Jenis BBM Rumah Tangga	90
o. Frekuensi Makan Daging/ Ayam/Susu	91
p. Frekuensi Pembelian Pakaian Baru	92
q. Frekuensi Makan /Hari.....	93
r. Kemampuan Berobat	94
s. Jumlah Penghasilan per bulan.....	95
t. Sumber Penghasilan Utama.....	96
u. Sumber Penghasilan Tambahan	97
C. Potensi dan Serapan Produk Kredit	
Masyarakat miskin di Lingkungan Kumuh	
Kota Banjarmasin	98
1. Potensi dan Serapan Kredit Berdasarkan Aspek	
Psikografis.....	98
a. Akses Penyalur Kredit	98
b. Jarak Ketersediaan Sarana Pembiayaan/Kredit	100
c. Informasi Penyalur Kredit	101
d. Layanan Administrasi	102
e. Proses Layanan Pegawai	102
f. Keamanan	103
g. Kepuasan Layanan	104
h. Tingkat Suku Bunga.....	105
i. Jenis Agunan	106
j. <i>Brand (Image)</i>	107
k. Minat Terhadap Jenis Layanan	
Pembiayaan	108
1. Alasan terhadap Jenis Layanan Pembiayaan	109
m. Kendala terhadap Pembiayaan	110
2. Potensi dan Serapan Kredit Berdasarkan Aspek	
Perilaku	111
a. Jenis Produk	111
b. Tujuan Kredit	112
c. Jenis/Produk Kredit	113
d. Jumlah Kredit	116
e. Angsuran Pembayaran Kredit.....	117
f. Frekuensi Peminjaman Kredit	119
g. Minat Pengajuan Kredit	120

h. Jenis Kredit yang Diajukan	121
3. Potensi dan Serapan Kredit Berdasarkan	
Aspek Tindak Lanjut	122
a. Minat terhadap Bank/Lembaga	122
b. Alasan terhadap Bank/Lembaga	123
c. Jumlah Pinjaman	124
d. Kemampuan Angsuran per Bulan	124
e. Frekuensi Kemampuan Angsuran.....	125
D. Strategi Pengembangan Jasa Layanan di Lingkungan	
Kumuh Kota Banjarmasin	126
E. Proyeksi Potensi Kredit terhadap	
Masyarakat Miskin di Lingkungan Kumuh	
Kota Banjarmasin yang akan datang	146
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	151
A. Kesimpulan	151
B. Rekomendasi	152
DAFTAR PUSTAKA	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hlm
1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Triwulanan Tahun 2018-2019	2
2. TPT Kawasan Regional Kalimantan	2
3. Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama	3
4. Perkembangan Sektor Formal dan Informal Tahun Agustus 2016-Agustus 2019	4
5. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2015-2019	4
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Unit Wilayah	5
7. Perkembangan TPT Menurut Pendidikan Agustus 2018-Agustus 2019	5
8. Pelaku Pemberdayaan Masyarakat	10
9. Peta Lokasi Penelitian	36
10. Peta Citra Kota Banjarmasin	37
11. Peta Administrasi Kota Banjarmasin	38
12. Pola Aliran Sungai Mendaun (<i>dendritik drainage pattern</i>) di DAS Martapura Kota Banjarmasin	40
13. Peta Sungai Kota Banjarmasin	42
14. Peta Geologi Kota Banjarmasin	47
15. Perbandingan Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung dalam Rencana Pola Ruang Kota Banjarmasin 2013-2031	49
16. Peta Rencana Pola Ruang Kota Banjarmasin	51
17. Peta Kawasan Kumuh Kota Banjarmasin	54
18. Masyarakat yang mengakses Kegiatan Pembiayaan	130
19. Jenis Produk PT. BAF	133
20. Proyeksi Potensi Kredit dengan Peningkatan Kinerja Kelembagaan 0,50% selama 5 tahun untuk Jenis Jenis Produk Simpanan/Tabungan	148
21. Proyeksi Potensi Kredit dengan Peningkatan Kinerja 65,49% Kelembagaan selama 5 tahun untuk Jenis-Jenis Produk Pembiayaan/Kredit	149

DAFTAR TABEL

Gambar	Hlm
1. Rencana Pelaksanaan Kegiatan	7
2. Populasi dan Sampel Penelitian	29
3. Operasional Variabel Penelitian	31
4. Luas Wilayah Kota Banjarmasin	35
5. Klasifikasi Sungai-Sungai yang Mengalir di Kota Banjarmasin	40
6. Penggunaan Lahan di Kota Banjarmasin	29
7. Rencana Pola Ruang Kota Banjarmasin	50
8. Kawasan Kumuh dan Non Kumuh Kota Banjarmasin ..	53
9. Kelurahan	63
10. Umur	65
11. Suku	66
12. Status Pernikahan	66
13. Tanggungan Keluarga	67
14. Pendidikan Kepala Keluarga	68
15. Status SHM/IMB	68
16. Proses Kepemilikan SHM/IMB	69
17. Relokasi	70
18. Status Tempat Tinggal	75
19. Lokasi Tempat Tinggal	76
20. Akses (Jalan)	78
21. Luas Lantai Bangunan	79
22. Rasio Luas Lantai per Anggota Rumah Tangga	81
23. Jenis Lantai Bangunan	82
24. Jenis Dinding Bangunan	83
25. Jenis Atap Bangunan	84
26. Fasilitas BAB	85
27. Sumber Air Minum	86
28. Sumber Air PDAM	87
29. Sumber Air MCK	88
30. Sumber Penerangan	89
31. Daya PLN	90
32. Jenis BBM Rumah Tangga	91
33. Frekuensi Makan Daging/ Ayam/Susu	91

34. Frekuensi Pembelian Pakaian Baru	92
35. Frekuensi Makan/Hari	93
36. Kemampuan Berobat	94
37. Jumlah Penghasilan per bulan	95
38. Sumber Penghasilan Utama	96
39. Sumber Penghasilan Tambahan	97
40. Akses terhadap Penyalur/Sarana Kredit	98
41. Jarak Ketersediaan Sarana Pembiayaan/Kredit	100
42. Informasi Penyalur Kredit	101
43. Layanan Administrasi	102
44. Proses Layanan Pegawai	103
45. Keamanan	104
46. Kepuasan Layanan	104
47. Tingkat Suku Bunga	105
48. Jenis Agunan	107
49. <i>Brand (Image)</i>	108
50. Minat terhadap Jenis Layanan Pembiayaan	108
51. Alasan terhadap Jenis Layanan Pembiayaan (Konvensional dan Syariah)	109
52. Kendala terhadap Pembiayaan	110
53. Jenis Produk yang Digunakan	112
54. Tujuan Kredit	113
55. Jenis/Produk Kredit	114
56. Jumlah Kredit ke-1	117
57. Angsuran Pembayaran Kredit	118
58. Frekuensi Peminjaman Kredit	119
59. Minat Pengajuan Kredit 3 Bulan sd 1 Tahun Kedepan	121
60. Jenis Kredit yang diajukan	121
61. Minat terhadap Bank/Lembaga	122
62. Alasan terhadap Bank/Lembaga	125
63. Jumlah Pinjaman	124
64. Kemampuan Angsuran per bulan	125
65. Frekuensi Kemampuan Angsuran	126
66. Jenis Jasa Layanan	127
67. Ranking Potensi dan Serapan Lembaga Pembiayaan pada Masyarakat di lingkungan Kumuh Kota Banjarmasin	130

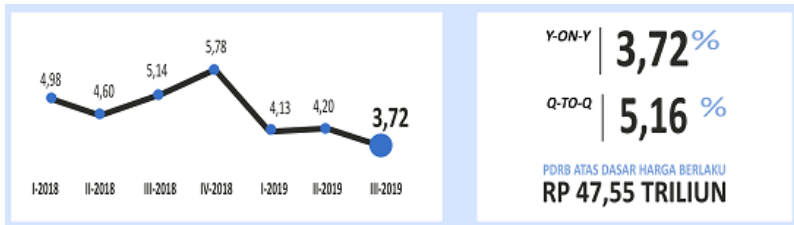
68.	Jenis Produk pada Lembaga Pembiayaan yang diminati Masyarakat di Lingkungan Kumuh Kota Banjarmasin	131
69.	Ranking Tujuan Produk Lembaga Pembiayaan yang diminati Masyarakat di Lungan Kumuh Kota Banjarmasin	132
70.	Jenis/Sarana Kredit menurut Lembaga Pembiayaan yang di Minati Masyarakat di Lingkungan Kumuh di Kota Banjarmasin	134
71.	Ranking Lembaga Pembiayaan menurut Jumlah Pendapatan Masyarakat di Lingkungan Kumuh Kota Banjarmasin	137
72.	Ranking Jenis/Sarana Produk Pembiayaan menurut Jumlah Pendapatan Masyarakat di Lingkungan Kumuh Kota Banjarmasin	139
73.	Faktor Internal dan Eksternal Model RLAFM1	142
74.	Strategi Program Pengembangan Jasa Layanan PT. BPD Kalsel	144
75.	Proyeksi Potensi Kredit dengan Peningkatan Kinerja Kelembagaan selama 5 tahun untuk Jenis-Jenis Produk Simpanan/Tabungan	148
76.	Proyeksi Potensi Kredit dengan Peningkatan Kinerja Kelembagaan selama 5 tahun untuk Jenis Jenis Produk Pembiayaan/Kredit	149

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

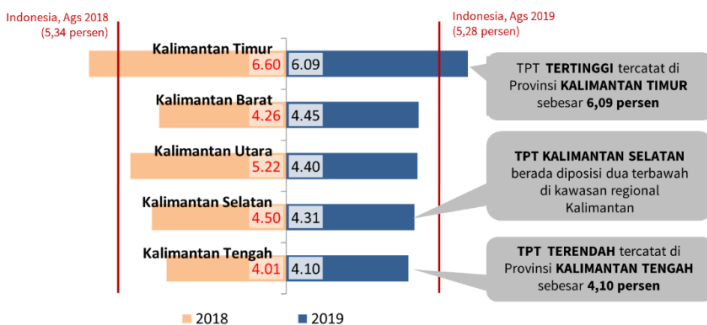
Secara geografis kemiskinan memiliki keterkaitan dengan wilayah secara fungsional. Kemiskinan perkotaan kini menjadi isu yang kian relevan dan mendesak untuk ditangani terkait dengan tren dinamika pembangunan perkotaan di Indonesia. Sebagai ilustrasi, sepanjang 1980 hingga 2010, pertumbuhan populasi perkotaan di Indonesia mencapai 3,85% dan ini membuat proporsi penduduk perkotaan meningkat dari 22,10% pada tahun 1980 menjadi 44,28% pada 2010. Data juga menunjukkan bahwa proporsi penduduk miskin yang tinggal di perkotaan meningkat pesat dari 18,45% pada 1976 menjadi 36,61% pada 2009. Dari data tersebut terlihat bahwa kecenderungan urbanisasi kependudukan di Indonesia juga diikuti dengan urbanisasi kemiskinan yang lebih lanjut berdampak pada timbulnya berbagai aspek persoalan kemiskinan perkotaan seperti aspek fisik (berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur dan sarana transportasi) dan aspek nonfisik seperti kondisi sosial-ekonomi (keterbatasan lapangan pekerjaan, kesenjangan, ketidakadilan), ataupun aspek ekologis (banjir dan pencemaran lingkungan) (Handoko & Adrianto, 2012).

Secara regional pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha Tahun Dasar 2010, berada pada peringkat 2 setelah Provinsi Kalimantan Barat dengan pertumbuhan 5,16% (q to q), dan berada pada peringkat terakhir dengan pertumbuhan 3,72% (y on y) dan 4,01% (c to c). Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan Tahun 2018-2019 dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



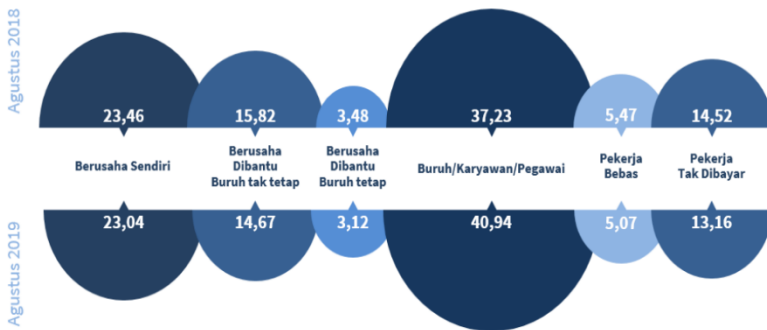
Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Triwulanan Tahun 2018-2019
 (Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2019)

Kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan yang cenderung fluktuatif, meskipun secara internal mengalami pertumbuhan positif dan berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi di regional Kalimantan. Pertumbuhan positif ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Kuartal III Tahun 2019, relatif memberikan peluang masyarakat Kalimantan Selatan dalam memperoleh lapangan kerja. Angka partisipasi angkatan kerja menunjukkan 2,09% dari usia kerja 3,07% atau terdapat 0,09% yang menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat 2 secara regional yakni 4,31% atau dibawah rata-rata nasional 5,28%.



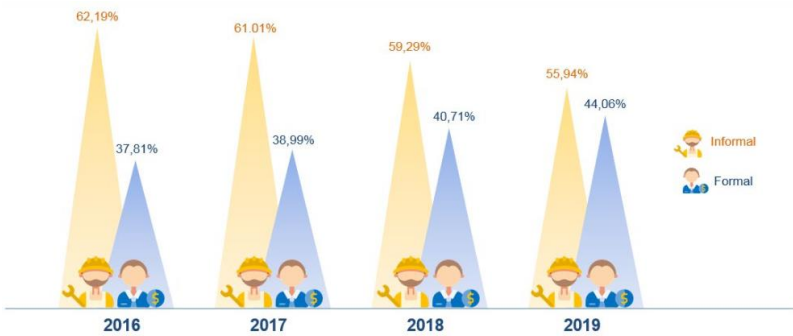
Gambar 2. TPT Kawasan Regional Kalimantan (Agustus 2018-Agustus 2019)
 (Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2019)

Selanjutnya perkembangan status pekerjaan menurut status pekerjaan utama mengalami peningkatan pada status pekerjaan utama sebagai “buruh/karyawan/pegawai” sebesar 3,71%, sedangkan pada status pekerjaan lainnya mayoritas mengalami penurunan seperti berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, pekerja bebas dan pekerja tak dibayar. Perkembangan penduduk bekerja menurut status pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama (%)
(Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2019)

Penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan pada sektor formal, mengalami peningkatan pekerja formal sebesar 3,35%. Pekerja formal adalah pekerja yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan.



Gambar 4. Perkembangan Sektor Formal dan Informal Tahun Agustus 2016-Agustus 2019

(Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2019)

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2015-2019 menunjukkan tren penurunan dari tahun 2016 sd tahun 2019 dengan rata-rata penurunan sebesar 0,44%.



Gambar 5. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2015-2019

(Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2019)

Perkembangan TPT menurut unit wilayah Kota dan Desa di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2019 menunjukkan penurunan pada wilayah perkotaan dengan

rata-rata penurunan sebesar 0,42%, sedangkan pada wilayah perdesaan mengalami peningkatan sebesar 0,17%.



Gambar 6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Unit Wilayah

(Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2019)

Selanjutnya TPT menurut pendidikan, menunjukkan TPT terendah terdapat pada kelompok penduduk berpendidikan SD ke bawah. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,34%.



Gambar 7. Perkembangan TPT Menurut Pendidikan Agustus 2018-Agustus 2019

(Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2019)

TPAK dan TPT menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan Kota Banjarmasin merupakan wilayah dengan TPT tertinggi 7,69% dengan TPAK 66,15%, sedangkan wilayah terendah TPT yakni di Kabupaten Balangan 2,33% dan TPAK 71,99%. Tingginya TPT di Kota Banjarmasin relatif disebabkan oleh rendahnya ketersediaan dan jenis lapangan kerja, sedangkan pada wilayah Kabupaten Balangan dengan TPT terendah sebesar 2,33% relatif disebabkan oleh banyaknya jenis lapangan kerja (formal dan informal) yang tersedia.

Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Banjarmasin, seyogyanya menjadi tugas pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mencarikan alternatif pemecahan. Pemetaan Potensi Penyaluran Pembiayaan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Banjarmasin, khususnya pada kawasan kumuh sebagai kantong-kantong kemiskinan tertinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka dapat disusun rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana peta pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana peta penyaluran pembiayaan terhadap masyarakat miskin di Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana serapan produk kredit yang ada terhadap masyarakat miskin di Kota Banjarmasin?
4. Bagaimana gambaran peta persaingan produk kredit yang ada terhadap masyarakat miskin di Kota Banjarmasin?
5. Bagaimana potensi kredit terhadap masyarakat miskin di Kota Banjarmasin yang akan datang?

C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun maksud dan tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan memetakan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kota Banjarmasin.
2. Mengidentifikasi dan memetakan penyaluran pembiayaan terhadap masyarakat miskin di Kota Banjarmasin.
3. Menyajikan besarnya serapan produk kredit yang ada terhadap masyarakat miskin di Kota Banjarmasin.
4. Menggambarkan peta persaingan produk kredit yang ada terhadap masyarakat miskin di Kota Banjarmasin.
5. Mengkaji potensi kredit terhadap masyarakat miskin di Kota Banjarmasin yang akan datang

D. Output Kegiatan

Output atau hasil dari kajian “Pemetaan Rumah Tangga Miskin di Kawasan Kumuh di Kota Banjarmasin” sebagai berikut:

1. Dokumen Laporan Hasil Kegiatan
2. Buku Laporan (ISBN)

E. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dimulai pada bulan Februari sd Juli tahun 2020 dengan jumlah 180 hari kerja.

Tabel 1. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Hari Kerja					
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
A	Pra Lapangan						
1	Draft Proposal	4					
2	Penandatanganan Kontrak	2					
3	Penyusunan Instrumen	5					
4	Uji Coba Instrumen	2					
5	Pembuatan SK Tim	3					
6	Perijinan Penelitian	5					

No.	Uraian Kegiatan	Hari Kerja					
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
7	Rekrutmen Tenaga Lapangan (Enumerator)	5					
8	Pelatihan Tenaga Lapangan (Enumerator)	4					
B	Lapangan						
1	Pengumpulan Data Responden		30	30			
2	Input Data				30		
3	Pengolahan dan Analisa Data					20	
C	Pasca Lapangan						
1	Draft Laporan Akhir					10	
3	Laporan Akhir						20
4	Buku ISBN						10
TOTAL HARI KERJA		30	30	30	30	30	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat

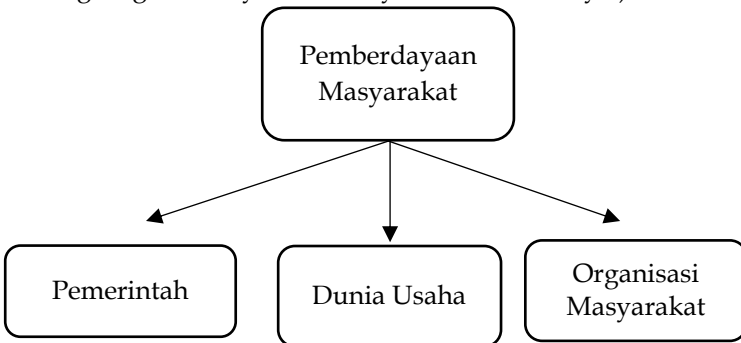
Empowerment, atau pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat Barat, terutama Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70an dan kemudian terus berkembang sampai saat ini. Kemunculannya hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi, personalisme dan kemudian lebih dekat dengan gelombang NeoMarxisme, Freudianisme, Strukturalisme, dan Sosiologi kritik Frankfurt School.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chambers, 1995). Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama yang akan membawa masyarakat menuju keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Melalui upaya pemberdayaan, masyarakat didorong agar memiliki kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal. Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak

dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri (Noor, 2011).

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan berakar kerakyatan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat kita yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan. Ditinjau dari sudut pandang penyelenggaraan Administrasi Negara, pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata sebuah konsep ekonomi tetapi secara implicit mengandung pengertian penegakan demokrasi ekonomi (yaitu kegiatan ekonomi berlangsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).



Gambar 8. Pelaku Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Noor, 2011

Pemberdayaan masyarakat menjadi *concern* publik dan dinilai sebagai salah satu pendekatan yang sesuai dalam mengatasi masalah sosial, terutama kemiskinan, yang dilaksanakan berbagai elemen mulai dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Meskipun dengan cara pandang dan landasan teori yang berbeda, program pemberdayaan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai usaha untuk menyelesaikan

atau paling tidak mengurangi dampak masalah sosial. Implementasi pemberdayaan masyarakat tidak sama antara satu konteks masyarakat dengan konteks masyarakat yang lain. Secara umum, pemerintah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan dan berbagai macam program pemberdayaan dan perlindungan sosialnya; dunia usaha dengan Corporate Social Responsibility (CSR)nya; dan OMS dengan aktivitas akar rumputnya (Widayanti, 2012).

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu: kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*). Suatu masyarakat dikatakan berdaya apabila mereka dapat tampil sebagai pelaku utama dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Masyarakat yang bergantung kepada pihak lain dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya adalah masyarakat yang tidak berdaya. Pemberdayaan dengan demikian harus diartikan sebagai pelaku utama bagi pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhannya.

Salah satu bentuk dari implementasi pemberdayaan adalah melalui pemberian modal atau pinjaman dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Berikut akan diuraikan konsep pembiayaan dan segmentasi pembiayaan.

B. Segmentasi Pembiayaan

1. Konsep Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan itu atau

kesepakatan antara bank dan pihak lain yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bunga. Perbankan merupakan sub sistem keuangan yang paling dominan di Indonesia. Setidaknya sekitar 77% total pembiayaan sektor riil berasal dari kredit perbankan. Berbagai literatur mempelajari pentingnya peran lembaga perbankan telah ditemukan sejak tahun 1933 seperti Fisher (1933). Stiglitz dan Greenwald (2003) bahkan menyatakan bahwa perbankan lebih superior dibandingkan lembaga intermediasi lainnya terutama dalam mengatasi masalah *asymmetric information* dan mengatasi *transaction cost*. Penelitian lain dilakukan oleh Mishkin (1978) dan Bernanke et.al. (1991) yang menyatakan bahwa kredit memiliki peran penting dalam menentukan output. Hasil studi di Philipina oleh Lamberte (1999), dengan menggunakan metode *causality test*, menunjukkan bahwa peningkatan/penurunan tingkat pertumbuhan output akan menyebabkan peningkatan/penurunan kredit perbankan.

Penyebab penurunan kredit adalah kombinasi faktor permintaan dan penawaran. Fenomena ini dikenal dengan terminologi *credit slowdown*. Hal pokok penyebab *credit slowdown*, yaitu: kurangnya permodalan bank, tingginya risiko dan biaya kredit, adanya risiko pasar, serta adanya risiko likuiditas dan risiko sistemik, (Harmanta, 2005).

Menurut Mashud Ali (2015) Risiko suku bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Sedangkan menurut Kasmir (2013) Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung

investasi yang telah direncanakan (Rivai Veithzal dan Arfian Arifin, 2010).

Dewi, Puspa Anggraini (2016), Suku bunga dasar kredit dan pertumbuhan berpengaruh terhadap permintaan kredit. Salah satu peranan kredit yaitu kredit sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, sehingga menjadikan kredit sebagai fokus utama Perbankan. Oleh karena itu permintaan kredit dengan pertumbuhan ekonomi adalah berhubungan positif dan saling mempengaruhi. Suku bunga berpengaruh terhadap permintaan kredit sesuai teori yang menunjukkan hasil bahwa permintaan akan mengalami penurunan ketika suku bunga tinggi. Suku bunga kompetitif sangat penting bagi suatu bank untuk memberikan kredit, terutama untuk pembiayaan kredit khususnya kredit modal kerja dan kredit konsumtif.

Kredit akan mengambil alih sebagian fungsi uang (yang dipergunakan untuk pembayaran tunai) karena hampir segala hal dilakukan dengan kredit. Maka peranan kredit dalam perekonomian modern yaitu:

- a. Kredit ternyata dapat meningkatkan efisiensi penggunaan uang atau modal dengan meningkatkan produktivitas masyarakat.
- b. Kredit dapat meningkatkan efisiensi penggunaan barang, karena kredit dapat membantu proses produksi dari bahan hingga barang jadi dan sekaligus juga membantu pemindahan barang dari produsen kepada konsumen dalam proses marketing; kredit ikut melancarkan arus barang.
- c. Kredit dapat meningkatkan arus peredaran lalu lintas uang, misalnya, melalui penggunaan cek, giro, wesel, promes, dan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank.

- d. Kredit dapat menjadi alat stabilitas ekonomi yang dilakukan melalui kebijaksanaan ekspansi dan kontraksi kredit, misalnya, dengan politik diskonto oleh bank sentral.
- e. Kredit dapat berfungsi sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional suatu negara.
- f. Kredit dapat menciptakan daya beli baru bagi para debitur, meskipun debitur-debitur itu tidak memiliki uang tunai dalam saldo neracanya.

2. Segmentasi Pembiayaan

Suatu perusahaan dikatakan berhasil mengembangkan produk jika perusahaan mampu mengidentifikasi kebutuhan konsumen secara tepat dan menciptakan produk secara cepat dengan biaya yang murah (Azhar, 2010). Setiap perusahaan menyadari bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi keinginan semua pembeli di pasar atau setidaknya tidak bagi semua pembeli dengan cara yang sama. Dengan jumlah pembeli yang terlalu banyak, terlalu luas, dan memiliki kebutuhan dan praktek pembelian yang terlalu beragam, perusahaan harus mengidentifikasi bagian pasar yang dapat dilayaninya dengan baik dan paling menguntungkan. Perusahaan juga harus merancang strategi pemasaran yang nantinya akan digerakkan pelanggan dan membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Untuk memenangkan persaingan tidak hanya sebatas menyusun bauran pemasaran sebagai taktik namun lebih dari itu juga menyusun strategi yaitu *segmenting*, *targeting market*, dan *Positioning* yang diinginkan oleh perusahaan.

Kotler dkk., (2003) dalam Hidayani & Syafrizal (2008), menyatakan segmentasi memiliki peran penting karena beberapa alasan yaitu *pertama*, segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya, dengan membagi pasar menjadi segmen-segmen akan

memberikan gambaran bagi perusahaan untuk menetapkan segmen mana yang akan dilayani. Selain itu segmentasi memungkinkan perusahaan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai peta kompetisi serta menentukan posisi pasar perusahaan. *Kedua*, segmentasi merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi. Segmentasi yang disertai dengan pemilihan target pasar akan memberikan acuan dalam penentuan *Positioning*. *Ketiga*, segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing, dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan cara berbeda dari yang dilakukan pesaing.

Segmentasi merupakan proses pengelompokkan konsumen kedalam segmen-segmen berdasarkan beberapa variabel atau preferensi. Selesai melakukan segmentasi pasar, selanjutnya adalah menetapkan pasar sasaran yang diinginkan. Targeting pasar merupakan menyeleksi pasar sasaran sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu dan menjangkau pasar sasaran untuk mengkomunikasikan nilai. *Positioning* merupakan usaha para pemasar untuk menanamkan image perusahaan atau produk ke dalam benak konsumen. *Positioning* dibutuhkan karena *Positioning* menghasilkan posisi produk yaitu citra produk yang jelas, berbeda dan unggul secara relatif dibanding pesaing didalam benak konsumen (Kartajaya, 2004). Aktifitas perusahaan pembiayaan adalah memenuhi pembiayaan untuk barang-barang kebutuhan masyarakat terutama untuk barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor seperti mobil dan motor (Azhar, 2010). Faktor yang menjadikan bisnis pembiayaan begitu cepat berkembang adalah karena bisnis pembiayaan merupakan suatu sistem yang sesuai dengan arah perkembangan ekonomi dewasa ini yang sangat cepat berkembang. Tingginya penjualan mobil ini, tidak lepas dari peranan lembaga pembiayaan sehingga masyarakat mampu

membeli dan memiliki kendaraan bermotor dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan.

Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi segmen-segmen tertentu untuk dijadikan sasaran penjualan, yang akan dicapai dengan marketing mix tertentu (Basu, 2010). Tujuan segmentasi adalah mengembangkan keunikan terhadap program pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik pasar (Amirullah, 2012). Tahap-tahap atau prosedur agar dapat menghasilkan segmentasi-segmentsi yang efektif terdiri dari tiga tahap (Philip Kotler, 2002) meliputi:

- a. Tahap survei. Perusahaan mengadakan wawancara untuk mencari penjelasan dan memusatkan perhatian pada kelompok untuk memperoleh pandangan terhadap keputusan pembelian konsumen, peneliti ,menyiapkan kuessoner resmi untuk mengumpulkan data mengenai geografi, demografi, psikografi dan perilaku konsumen.
- b. Tahap analisis. Analisa cluster digunakan untuk mendapatkan sejumlah segmen tertentu yang mereka inginkan. Masing -masing segmen secara internal bersifat homogen dan jauh berbeda bila dibandingkan dengan segmen-segmen yang lain.
- c. Tahap pembentukan. Setiap cluster kemudian disusun profilnya berdasarkan sikap, perilaku, demografi, psikografi dan kebiasaan konsumsi medianya. Masing-masing segmen diberi nama berdasarkan karakteristik khasnya yang dominan.

Segmentasi pasar berdasarkan pada ciri-ciri khusus atau karakteristik tertentu dari konsumen, baik atas dasar faktor geografis, demografis, psikografis maupun faktor perilaku. Adapun variabel-variabel dalam segmentasi pasar (Philip kotler, 2002) meliputi:

- a. Segmentasi Geografis. Segmentasi geografis adalah segmentasi yang dilakukan dengan cara membagi pasar menjadi unit-unit geografis seperti misalnya, provinsi, kabupaten, kota, RW.
- b. Segmentasi Demografis. Segmentasi demografis adalah segmentasi dimana pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok yang berdasarkan variable demografis seperti umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan.
- c. Segmentasi Psikografis. Segmentasi Psikografis adalah segmentasi dimana pembeli dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan gaya hidup atau kepribadian akan nilai.
- d. Segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku adalah segmentasi dimana pembeli dibagi menurut tingkat kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian atau tanggapan mereka terhadap suatu produk tertentu.

C. Kemiskinan

1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan memiliki konsep yang beragam. World Bank mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan ukuran kemampuan/daya beli, yaitu US \$1 atau US \$2 per kapita per hari. Sementara itu, BPS mendefinisikan kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan, (*poverty line*). Nilai garis kemiskinan yang digunakan untuk menentukan kemiskinan mengacu pada kebutuhan minimum yang dibutuhkan oleh seseorang yaitu 21,00 kalori per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum non-makan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi: papan, sandang,

sekolah, transportasi, serta kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasarinya. Menurut BPS, seseorang/individu yang pengeluarannya lebih rendah dari Garis Kemiskinan maka seseorang/individu tersebut dikatakan miskin.

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki dan perempuan, yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar manusia tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik (Bappenas, 2004).

Pandangan Friedman, kemiskinan berarti ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial ini meliputi: (1) Modal produktif seperti tanah, alat produksi, Perumahan, kesehatan. (2) Sumber keuangan. (3) Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama seperti koperasi, partai politik, organisasi sosial, (4) jaringan sosial, (5) Pengetahuan dan kehampiran. (6) Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman dalam (Suharto, 2005).

Terlepas dari berbagai definisi atau konsep yang dikemukakan oleh para pakar di atas, kondisi kemiskinan dapat digambarkan melalui beberapa indikator yang disajikan melalui Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Menurut BPS (2003), komponen-komponen Indeks Kemiskinan Manusia ada lima, yaitu: (1) persentase penduduk yang meninggal sebelum usia 40 tahun, (2) persentase buta huruf, (3) persentase penduduk yang tidak memiliki akses ke air bersih, (4)

persentase penduduk yang jarak ke fasilitas kesehatan lebih dari 5 km, dan (5) persentase balita berstatus gizi kurang.

Indikator kemiskinan menurut (BPS, 2018) pada rumah tangga teradapat 14 variabel, yakni: (1) Luas lantai per kapita; (2) Jenis lantai; (3) Jenis dinding; (4) Fasilitas buang air besar; (5) Sumber air minum; (6) Sumber penerangan; (7) Bahan bakar; (8) Pembelian daging/ayam/susu; (9) Frekuensi makan; (10) Pembelian pakaian baru; (11) Kemampuan berobat; (12) Lapangan usaha kepala rumah tangga; (13) Pendidikan kepala rumah tangga; dan (14) Aset yang dimiliki.

Kriteria lain tentang pendudukan miskin berkenaan dengan implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) menurut versi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahwa untuk menentukan penduduk miskin paling tidak memenuhi 6 (enam) kriteria sebagai berikut:

- a. Rumah layak huni: a) milik sendiri dan b) bukan milik sendiri
- b. Akses air bersih dan sanitasi
- c. Pendapatan/dikonversi dengan pengeluaran
- d. Kepemilikan aset
- e. Frekuensi makan (lebih dari 2 kali sehari) dan kualitas gizi makanan
- f. Dalam setahun dapat membeli minimal 1 stel pakaian baru.

Kriteria 6 (enam) variabel/kriteria tersebut jika mendapat skor 3 atau lebih maka keluarga tersebut dikategorikan miskin. Oleh karena itu, komitmen dan konsistensi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dengan cara-cara yang adil tanpa mengecualikan masyarakat miskin akan meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari oleh hak-hak asasi manusia, nondiskriminasi, dan memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung merupakan hakikat paradigma pembangunan sosial.

2. Karakteristik Kemiskinan

Masyarakat miskin sesuai karakteristiknya menurut Kartasasmita (1993:4), umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Sementara itu Soemardjan (dalam Sumodingrat 1999), mendeskripsikan berabagai cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda, dengan tetap memperhatikan dua kategori tingkat kemiskinan, sebagai berikut: *Pertama*, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan; *Kedua*, kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif kerana berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial.

Chamber (1983) mengemukakan lima karakteristik sebagai ketidak beruntungan (*disadvantages*) yang melingkupi orang miskin atau keluarga miskin antara lain: (a) *poverty*, (b) *physical weakness*, (c) *isolation*, (d) *powerlessness*. Moeljarto (1995) mengemukakan tentang *Poverty Profile* sebagaimana berikut: Masalah kemiskinan bukan saja masalah *welfare* akan tetapi mengandung enam buah alasan antara lain : (a) Masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan. (b) Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberi peluang kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi. (c) Masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi, emosional dan sosial dalam menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga

membuatnya tidak berdaya. (d) Kemiskinan juga berarti menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan kuantitas terbatas. (e) Tingginya rasio ketergantungan, karena jumlah keluarga yang besar. (f) Adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus menerus.

Selanjutnya Supriatna (1997) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin, antara lain: 1). Tidak memiliki faktor produksi sendiri, 2). Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, 3). Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, 4). Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas, 5). diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Secara geografis kemiskinan memiliki keterkaitan dengan wilayah secara fungsional. Kemiskinan perkotaan kini menjadi isu yang kian relevan dan mendesak untuk ditangani terkait dengan tren dinamika pembangunan perkotaan di Indonesia. Sebagai ilustrasi, sepanjang 1980 hingga 2010, pertumbuhan populasi perkotaan di Indonesia mencapai 3,85% dan ini membuat proporsi penduduk perkotaan meningkat dari 22,10% pada tahun 1980 menjadi 44,28% pada 2010.

Data juga menunjukkan bahwa proporsi penduduk miskin yang tinggal di perkotaan meningkat pesat dari 18,45% pada 1976 menjadi 36,61% pada 2009. Dari data tersebut terlihat bahwa kecenderungan urbanisasi kependudukan di Indonesia juga diikuti dengan urbanisasi kemiskinan yang lebih lanjut berdampak pada timbulnya berbagai aspek persoalan kemiskinan perkotaan seperti aspek fisik (berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur dan sarana transportasi) dan aspek nonfisik seperti kondisi sosial-ekonomi (keterbatasan lapangan pekerjaan, kesenjangan, ketidakadilan), ataupun aspek ekologis (banjir dan pencemaran lingkungan). (Handoko &

Adrianto, 2012). Konsep kawasan kumuh akan diuraikan pada pembahasan berikut.

D. Kawasan Kumuh

1. Konsepsi Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh diartikan sebagai kompleks permukiman yang secara fisik ditandai oleh bentuk rumah yang kecil dengan kondisi lingkungan yang buruk, pola *settlement* yang tidak teratur, serta kualitas lingkungan yang rendah, juga minimnya fasilitas umum (Drakakakis-Smith, 1980) dalam (Rindarjono, 2012). (Kurniasih, 2007) mendefinisikan permukiman kumuh yaitu permukiman dan kondisi hunian serta sarana prasarana masyarakat di kawasan tersebut yang tidak sesuai standar. Telaah dari (Judohusodo, 1991); (Socki, 1993); (UN-Habitat, 2012); (Rindarjono, 2012) menunjukkan bahwa permukiman kumuh ditandai dengan a). kondisi lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan (kurangnya atau tidak tersedianya prasarana, sarana, fasilitas lingkungan. Walaupun ada, kondisinya sangat buruk dan di samping itu, tata letak bangunan tidak teratur); 2). kondisi bangunan yang sangat buruk serta bahan-bahan bangunan yang digunakan adalah bahan - bahan bangunan yang bersifat semi permanen; 3). kepadatan bangunan dengan KDB yang besar dari yang diijinkan (kepadatan penduduk yang sangat tinggi [lebih dari 500 jiwa per ha atau tingginya angka kepadatan penduduk yaitu berkisar 350-1.250 jiwa per hektar dengan ukuran luas kampung mulai 15-20 hektar, dari seluruh bangunan rumah yang ada dipermukiman kumuh 60-70% ditempati oleh pemilik) dan ukuran bangunan yang kecil-kecil antara 25 meter persegi bahkan kurang, luas lantai lebih kecil atau sama dengan 7,2 m²]; dan 4). Fungsi - fungsi kota yang bercampur

dan tidak beraturan (berasosiasi dengan kawasan industri, sekitar badan air, sepanjang rel kereta api, serta sekitar daerah pusat industri).

2. Penyebab Perkembangan Permukiman Kumuh

Khomarudin (1997) menyebutkan bahwa lingkungan permukiman kumuh terbentuk sebagai akibat urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah sebagai akibat dari karakteristik rumah tangga yakni tingkat pendidikan yang rendah. Karakteristik rumah tangga lainnya sebagai faktor yang mempengaruhi kondisi permukiman yaitu status penguasaan lahan. Clinord (1978) dalam Rindarjono (2012) mengidentifikasi bahwa penyebab perkembangan permukiman kumuh yaitu adanya pengaruh pertambahan penduduk terutama kepadatan sebagai akibat urbanisasi, kemiskinan, kebudayaan, dan kemauan politik. Selain faktor tersebut menurut Yunus (2000), terbentuknya permukiman kumuh juga berasosiasi dengan *area of poverty, degradation, and crime* karena adanya *deteriosasi* lingkungan permukiman dimana penurunan kualitas lingkungan permukiman juga menjadi penyebab munculnya daerah permukiman kumuh. Penyebab berikutnya menurut Astuti (2004), yaitu; a). faktor ekonomi. Seperti, kemiskinan dan krisis ekonomi. Faktor ekonomi atau kemiskinan menjadi pendorong bagi pendatang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota dengan keterbatasan pengetahuan, ketrampilan, dan modal maupun adanya persaingan yang sangat ketat diantara sesama pendatang, maka para pendatang tersebut hanya dapat tinggal dan membangun rumah dengan kondisi yang sangat minim di kota-kota. Disisi lain pertambahan jumlah pendatang yang sangat banyak mengakibatkan pemerintah tidak mampu menyediakan hunian layak; b). faktor bencana. Faktor bencana

dapat pula menjadi salah satu pendorong perluasan kawasan kumuh, adanya bencana, baik bencana alam seperti: banjir, gempa, gunung meletus, longsor maupun bencana akibat perang atau pertikaian antar suku juga menjadi penyebab jumlah permukiman kumuh meningkat dengan cepat.

Rindarjono (2012) berpendapat bahwa permukiman kumuh selalu berada di daerah miskin penyebabnya adalah adanya jurang pemisah antar *stratifikasi* dalam masyarakat, pertumbuhan penduduk yang tinggi, permainan politik yang tidak elegan dari politisi, dan adanya tekanan dari mafia untuk mencari keuntungan dari situasi kemiskinan yang ada. Pendapat lain disampaikan Gusmaini (2010) yang menyatakan bahwa faktor - faktor utama penyebab tumbuhnya permukiman kumuh adalah pertumbuhan kota yang tinggi yang tidak di imbangi oleh tingkat pendapatan yang cukup dan keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana kota, terutama jalan pada daerah permukiman baru.

3. Kawasan Kumuh

Terminologi kawasan kumuh sebelumnya mulai muncul di Inggris pada tahun 1880, dimana ketika itu sedang gencar - gencarnya gerakan reformasi perumahan yang menyatakan beberapa "*konsep operasional terkait material rumah tidak layak bagi kehidupan manusia*". Maksudnya, adalah standar pelayanan perumahan di negara tersebut dianggap sudah tidak memenuhi kelayakan terutama dalam hal teknis penyediaan material bangunan rumah. Hal ini memunculkan gagasan bahwa kawasan kumuh sudah harus dimasukkan dalam pemetaan perencanaan sebuah kota yang termuat dalam agenda pembangunan kota. Berdasarkan aksi gerakan reformasi di Inggris, beberapa negara lainnya mulai melirik betapa permasalahan kawasan kumuh sudah menjadi suatu hal

yang harus ditangani secara cepat dan tepat (Prayitno, 2014). Pada dasarnya indikator kawasan kumuh dimasing - masing negara memiliki kaitan yang sama, yaitu tentang rumah beserta PSU-nya. Acharya (2010), berpendapat bahwa kawasan kumuh didefinisikan sebagai hunian yang tidak memadai karena tidak adanya ketersediaan fasilitas fisik (ruang terbuka hijau, drainase, *supply* air bersih, dan jaringan komunikasi), dan fasilitas sosial (organisasi, sosial, dan kesehatan). Pendapat lain disampaikan oleh Cities Alliance Action Plan (2008) yang menjelaskan bahwa kawasan kumuh, biasanya merupakan bagian kota yang terabaikan sehingga mengakibatkan perumahan dan kondisi kehidupan masyarakatnya berada dalam status miskin, kawasan ini dapat terletak ditengah kota dengan kepadatan yang tinggi atau terbangun secara spontan dipinggiran kota. Berdasarkan beberapa konsep yang telah diuraikan tersebut, Prayitno (2014) mengambil benang merah terkait dengan indikator-indikator mengenai suatu kawasan dikategorikan kumuh, apabila:

- a. Kurangnya Pelayanan Dasar. Dalam hal ini, penghuni kawasan kumuh memiliki keterbatasan atau bahkan tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar seperti fasilitas sanitasi, sumber air bersih, sistem pengumpulan atau pengolahan sampah, jaringan listrik, dan drainase.
- b. Rumah Tidak Layak Huni. Kondisi rumah tidak layak huni dapat diartikan sebagai rumah yang dibangun dengan material non permanen untuk atap bukan genteng, lantai tidak keras, dinding terbuat dari bahan bambu (gedhek). Selain itu, rumah tidak layak huni juga dapat dilihat dari sisi ukuran hunian di mana standar minimum luasan bagi satu orang (ada yang 7,2 m² dan ada pula yang 9 m²)
- c. Permukiman dengan Tingkat Kepadatan Tinggi. Kepadatan yang dimaksud dalam hal ini adalah banyaknya bangunan rumah yang terdapat pada satu area kawasan kumuh. Hal

- ini akan menunjukkan betapa sempitnya ruang yang tersedia bagi tiap orang. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, kepadatan bangunan yang tergolong tinggi adalah sebesar > 100 bangunan/ha dengan kepadatan penduduk > 200 jiwa/km².
- d. Kondisi Hidup yang Tidak Sehat dan Lokasi yang Berisiko. Kawasan kumuh identik pula dengan kondisi penduduk yang tidak sehat. Dalam hal ini dapat dimaknai dengan lingkungan permukiman penduduk yang tidak memenuhi standar kesehatan sehingga berdampak pada kerentanan terhadap kesehatan penduduk. Di sisi lain, kawasan ini juga terbangun di lokasi yang cukup berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan penghuninya seperti: kawasan pinggir sungai, kawasan dekat tanah yang rawan longsor, dan sebagainya di mana hal ini riskan terhadap keselamatan jiwa manusia.
 - e. Ketidadaan Jaminan Hak Bermukim. Pembangunan kawasan kumuh secara spontan dan ilegal menyebabkan kawasan tersebut tidak aman. Inti sari dari ketidakamanan di sini adalah ketidadaan jaminan hak bermukim yang sewaktu-waktu penghuninya akan mengalami penggesuran.
 - f. Kemiskinan dan Eksklusif Sosial. Salah satu hal yang penting dibicarakan dalam permasalahan kekumuhan adalah hubungannya dengan kemiskinan dan tindakan eksklusif sosial dari luar kawasan kumuh. Sudah tergambar jelas bahwa hampir sebagian besar, bahkan keseluruhan penghuni kawasan tersebut merupakan masyarakat yang tidak bisa atau tidak ingin lepas dari lingkaran setan kemiskinan dan cenderung akan menyebabkan kelanggengan (berputar tanpa ada pemutusan rantai).

4. Tipologi Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh memiliki tipologi berdasarkan berbagai macam aspeknya. Menurut UN Habitat (2003)

penilaian terhadap tipologi kawasan kumuh dapat dilihat dari dua perspektif umum, yaitu proses pembentukan dan jenis spasialnya. UN-Habitat juga menjelaskan secara umum mengenai perbedaan antara kawasan kumuh yang disebabkan oleh degradasi kawasan pada kawasan pada zona lama dipusat kota dengan kawasan baru sebagai akibat perkembangan permukiman *squatter* yang menempati lahan - lahan kota secara illegal. Pada dasarnya, maksud pembentukan lokasi kawasan kumuh mengurangi *cost* atau biaya transportasi. Hal ini juga sebagai *multiplier effect* terhadap pesatnya perkembangan pusat kota yang tidak bisa dikendalikan oleh pusat pemerintah. Bila dilihat dari asal usul dan umur-nya, kawasan kumuh terlihat jelas pada sisi sejajar pembentukan pusat kota.

Pembentukan kawasan modern saat ini lebih cenderung menjauh atau memisahkan diri dari kota asalnya. Hal ini justru menimbulkan kesenjangan, terutama dalam hal penyediaan layanan dasar sehingga berdampak besar pada penurunan kondisi fisik kawasan tersebut karena faktor *konsolidasi* dan *subdivinisi* lahan secara informal. Berdasarkan *lokasi atau letaknya*, kawasan kumuh dibedakan menjadi kawasan kumuh di pusat kota dan kawasan kumuh dipinggiran kota. Berdasarkan legalitas dan kerentanannya, kawasan kumuh dapat dikategorikan sebagai kawasan kumuh *legal (formal)* dan kawasan kumuh *illegal (informal)*. Kawasan kumuh legal lebih mudah dijumpai dalam kawasan permukiman kampung tradisional yang memadat dan menjadi kumuh, sedangkan kawasan kumuh ilegal dapat ditemui di beberapa kawasan yang tidak memiliki status tanah dan bangunan serta berlokasi pada umumnya dikawasan peruntuk non-permukiman. Kawasan kumuh informal tentu memiliki tingkat kerentanan yang lebih besar terhadap penggusuran. Ditinjau dari pemetaan kondisi dan permasalahan lingkungan permukiman secara

spasial, kawasan kumuh dapat dibedakan ke dalam tujuh tipologi dimana masing-masing memiliki karakter khusus tersendiri. Ketujuh kawasan tersebut adalah: a). pemukiman kumuh nelayan; b). permukiman kumuh dekat dengan pusat kegiatan sosial - ekonomi; c). permukiman kumuh pusat kota; d). permukiman kumuh pinggir kota; e). permukiman kumuh daerah pasang surut; f). pemukiman kumuh daerah rawan bencana; dan g). permukiman kumuh tepian sungai.

Secara spesifik UNCED dalam (UNDESA, 2003) mengklasifikasikan permukiman kumuh diperkotaan atas 3 tipe, yaitu:

- a. *Squatter Settlements* (kawasan permukiman liar). Kawasan permukiman liar banyak dijumpai pada daerah - daerah a). sepanjang bantaran sungai kota; b). bantaran kereta api; c). di atas tanah - tanah pemerintah; atau d). di atas tanah-tanah yang status kepemilikannya tidak jelas. Karakteristiknya struktur bangunannya tidak permanen atau semi permanen dan kondisi infrastruktur di bawah standard. Contoh: Kawasan kumuh di atas tanah ilegal.
- b. *Inner-City Slums* (kawasan permukiman kumuh pusat kota). Pada umumnya, *inner-city slums* terdiri atas rumah - rumah petak. Biasanya berlokasi di kawasan kota tua yang dicirikan dengan kondisi infrastruktur di bawah standard serta kepadatan penduduk tinggi. Contoh: a). Kawasan kumuh dengan kepadatan sangat tinggi; b). Kawasan kumuh pada permukiman lama; c). Kawasan kumuh pada kawasan baru; dan d). Kawasan kumuh di atas tanah legal.
- a. *Illegal Housing Subdivision*. Fenomena lain yang saat ini banyak ditemukan di negara-negara berkembang adalah adanya *illegal housing subdivision* (kawasan permukiman terletak pada wilayah yang tidak sesuai dengan peruntukkan lahan).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian merupakan sekumpulan metode-metode yang dipilih untuk selanjutnya digunakan dalam teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan interpretasi data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dimana analisis deskriptif merupakan analisis yang bertujuan untuk menyajikan gambar yang menyeluruh suatu gejala atau peristiwa atau kondisi pada suatu objek penelitian. Populasi penelitian yakni masyarakat (rumah tangga) miskin di kawasan kumuh Kota Banjarmasin.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat (rumah tangga) miskin di kawasan kumuh Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang diambil secara sensus dengan jumlah 8563 rumah tangga.

Tabel 2. Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Kecamatan & Kelurahan	Kawasan Kumuh Bantaran Sungai	Kawasan Kumuh Pusat Kota	Populasi Sasaran
I	Banjarmasin Utara	1200	177	1467
1	Alalak Selatan	145		145
2	Pangeran	10	10	20
3	Alalak Utara	257		257
4	Antasan Kecil Timur	48	43	91
5	Kuin Utara	269	94	363
6	Sungai Andai	79		79
7	Sungai Jingah	132	90	222
8	Surgi Mufti	270	40	310
II	Banjarmasin Barat	2	12	14
1	Belitung Selatan		2	2
2	Belitung Utara	1	1	2
3	Kuin Selatan		2	2

No.	Kecamatan & Kelurahan	Kawasan Kumuh Bantaran Sungai	Kawasan Kumuh Pusat Kota	Populasi Sasaran
4	Pelambuan		5	5
5	Telawang	1	2	3
III	Banjarmasin Selatan	1139	2752	3891
1	Basirih Selatan	571		571
2	Kelayan Barat	102	231	333
3	Kelayan Dalam		990	990
4	Kelayan Selatan	316	781	1097
5	Kelayan Tengah		324	324
6	Mantuil	100		100
7	Pemurus Baru	50	244	294
8	Pemurus Dalam		69	69
9	Tanjung Pagar		113	113
IV	Banjarmasin Timur	1126	1051	2177
1	Banua Hanyar	159		159
2	Karang Mekar	239	232	471
3	Kuripan		148	148
4	Pekapuran Raya	229	632	861
5	Pemurus Luar		39	39
6	Pengambangan	163		163
7	Sungai Lutut	336		336
V	Banjarmasin Tengah	220	754	974
1	Antasan Besar		93	93
2	Gadang		90	90
3	Kampung Melayu	10	10	20
4	Kelayan Luar		125	125
5	Kertak Baru Ilir	21	18	39
6	Kertak Baru Ulu		78	78
7	Pasar Lama	177	130	307
8	Sebrang Masjid		90	90
9	Sungai Baru		130	130
10	Teluk Dalam	22		22
TOTAL		3.707	4.856	8.563

Sumber: Diolah dari Peta Kawasan Kumuh PUPR
Kota Banjarmasin, 2016

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan obyek yang dikaji dalam sebuah penelitian. Variabel dalam penelitian meliputi tingkat kemiskinan menurut indikator BPS tahun 2014, tipologi kawasan kumuh (PUPR Kota Banjarmasin, 2016) serta segmentasi kredit meliputi geografis, demografis, psikografis dan perilaku yang dikembangkan dari teori Assauri (2012). Operasional variabel penelitian disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 3. Operasional Variabel Penelitian

No.	Variabel*)	Indikator	Skala Data	Sumber Data
1	Rumah Tangga Kemiskinan (Hunian)	1. Luas lantai per kapita,	Ordinal	Survei Kuesioner
		2. Jenis lantai,	Ordinal	
		3. Jenis dinding,	Ordinal	
		4. Fasilitas buang air besar,	Ordinal	
		5. Sumber air minum,	Ordinal	
		6. Sumber penerangan,	Ordinal	
		7. Bahan bakar,	Ordinal	
		8. Pembelian daging/ayam/susu,	Ordinal	
		9. Frekuensi makan dan konsumsi jenis pangan	Ordinal	
		10. Pembelian pakaian baru,	Ordinal	
		11. Kemampuan berobat,	Ordinal	
		12. Lapangan usaha kepala rumah tangga,	Ordinal	
		13. Pendidikan kepala rumah tangga, dan	Ordinal	
		14. Aset	Ordinal	
2	Segmentasi pembiayaan	Geografis:		Survei Kuesioner
		1. Wilayah administrasi (RT/RW/Kel/Kec)	Nominal	
		2. Wilayah fungsional (Unit Permukiman Kumuh)	Nominal	

No.	Variabel ^{*)}	Indikator	Skala Data	Sumber Data
		3. Tempat Tinggal (IMB, Status, Jenis, Lokasi, Akses)	Nominal	
		Demografis:		Survei Kuesioner
		1. Umur	Nominal	
		2. Jenis Kelamin	Nominal	
		3. Agama	Nominal	
		4. Suku	Ordinal	
		5. Jumlah Tanggungan Keluarga	Ordinal	
		6. Jenis Pedagang	Ordinal	
		7. Jumlah Karyawan	Ordinal	
		8. Jumlah Jam Kerja	Ordinal	
		9. Lama Usaha	Ordinal	
		10. Jumlah Modal Awal Usaha	Ordinal	
		11. Jumlah Omzet	Ordinal	
		12. Jumlah Laba Usaha		
		Psikografis:		Survei Kuesioner
		1. Akses terhadap penyalur kredit	Ordinal	
		2. Informasi penyalur kredit	Ordinal	
		3. Layanan Administrasi	Ordinal	
		4. Proses Layanan Pegawai	Ordinal	
		5. Keamanan	Ordinal	
		6. Kepuasan Layanan	Ordinal	
		7. Tingkat Suku Bunga	Ordinal	
		8. Jenis Agunan		
		9. Brand (<i>image</i>)	Ordinal	
		10. Minat Layanan Jenis Pembiayaan	Ordinal	
		11. Alasan Minat Jenis Pembiayaan	Ordinal	
		Perilaku:		Survei Kuesioner
		1. Jenis Produk	Ordinal	
		2. Tujuan Kredit (Modal Kerja/Investasi/Konsumtif)	Ordinal	
		3. Jenis/Produk Kredit	Ordinal	
		4. Jumlah Kredit Pinjaman Pertama	Ordinal	
		5. Angsuran Pinjaman/Kredit	Ordinal	

No.	Variabel ^{*)}	Indikator	Skala Data	Sumber Data
		6. Frekuensi Pinjaman/Kredit		
		Tindak Lanjut:		Survei Kuesioner
		1. Minat Pengajuan	Ordinal	
		2. Jenis Kredit	Nominal	
		3. Alasan Pemilihan Jenis Kredit	Ordinal	

D. Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan dan persiapan instrumen penelitian
 - a. Kajian literatur, melakukan pendalaman literatur dan teori-teori mengenai segmentasi pasar, pedagang pasar, jenis dan tipe kredit serta kajian kemiskinan
 - b. Penyusunan desain penelitian, sebagai pegangan dalam melaksanakan penelitian.
 - c. Observasi awal, dilakukan untuk mengetahui secara sepintas kondisi lapangan penelitian.
2. Tahap lapangan

Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara observasi, survei/kuesioner, wawancara dan pengumpulan data sekunder lainnya.
3. Tahap Pasca-lapangan
 - a. Pengolahan Data Kuantitatif
 - b. Pengolahan Data Kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
 - c. Verifikasi data
 - d. Analisis Data

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif yang didukung oleh software ArcGIS, SPSS yang selanjutnya disusun dalam bentuk tabulasi dan peta.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Luas dan Batas Wilayah

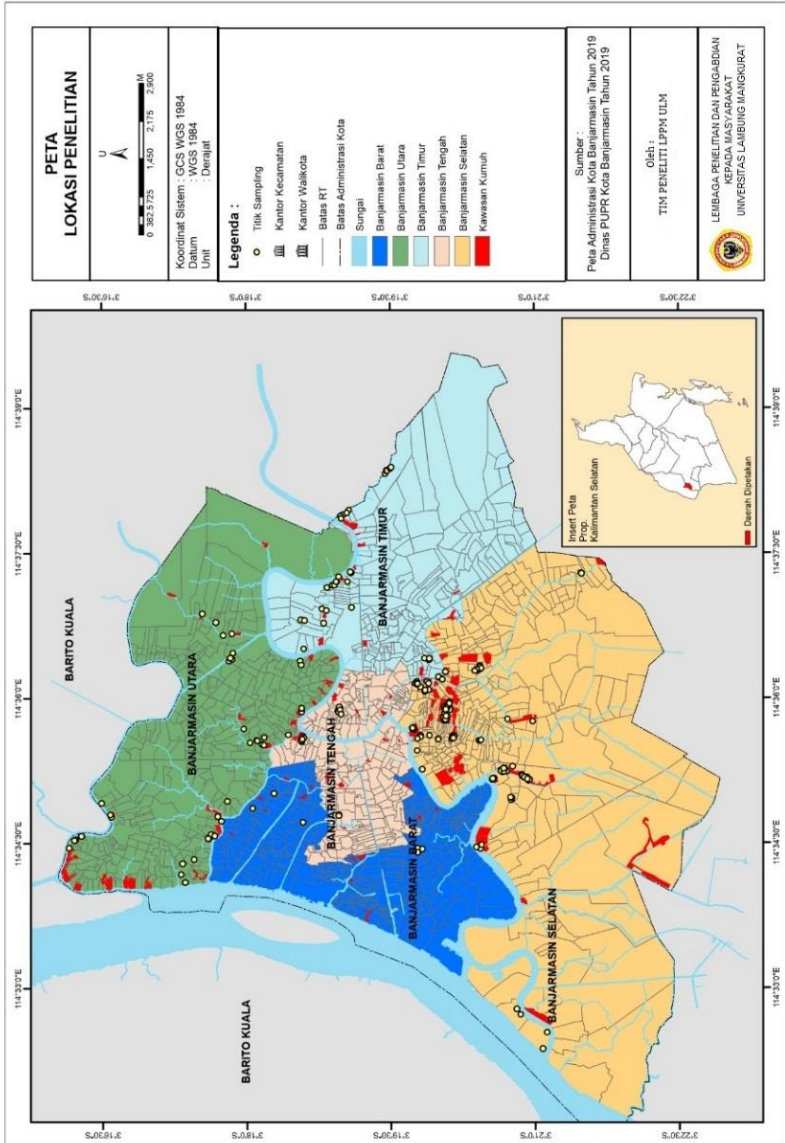
Kota Banjarmasin secara astronomis terletak pada $3^{\circ} 16' 32''$ LS - $3^{\circ} 22' 43''$ LS dan pada $114^{\circ} 32' 02''$ BT - $114^{\circ} 38' 24''$ BT yang secara tata kelola daerah Kota Banjarmasin berbatasan dengan beberapa daerah yaitu sebelah Utara (Kabupaten Batola), sebelah selatan (Kabupaten Banjar), sebelah timur (Kabupaten Banjar), dan sebelah barat (Sungai Barito/Kabupaten Batola).

Kota Banjarmasin memiliki luas wilayah mencapai \pm 98.46 Hektar yang setara 0,26% dari keseluruhan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan terdiri dari beberapa kecamatan yakni: Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur, dan Banjarmasin Barat. Kenampakan objek pada citra satelit dan gambaran kenampakan di permukaan bumi secara administratif Kota Banjarmasin dapat ditunjukkan Gambar 3.4. dan Gambar 3.5. Luas wilayah terbesar ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu seluas 38,27 Hektar atau 38,87%, sedangkan Kecamatan Banjarmasin Tengah memiliki luas wilayah terkecil yakni 6,66 hektar atau 6,76 %, hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

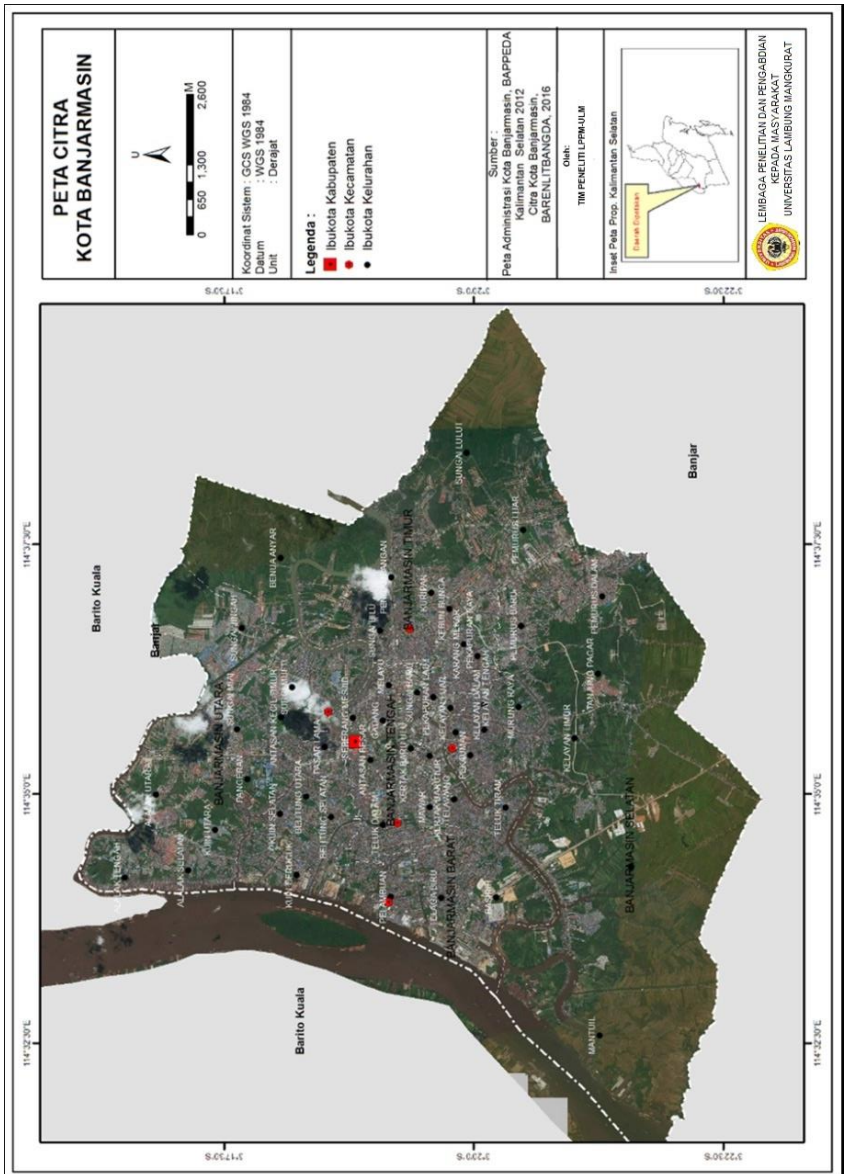
Tabel 4. Luas Wilayah Kota Banjarmasin

No.	Nama Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Banjarmasin Selatan	3.827	38,87
2	Banjarmasin Timur	2.386	24,23
3	Banjarmasin Barat	1.313	13,34
4	Banjarmasin Tengah	666	6,76
5	Banjarmasin Utara	1.654	16,8
Jumlah		9.846	100

Sumber: BPS, Banjarmasin dalam Angka 2019



Gambar 9. Peta Lokasi Penelitian



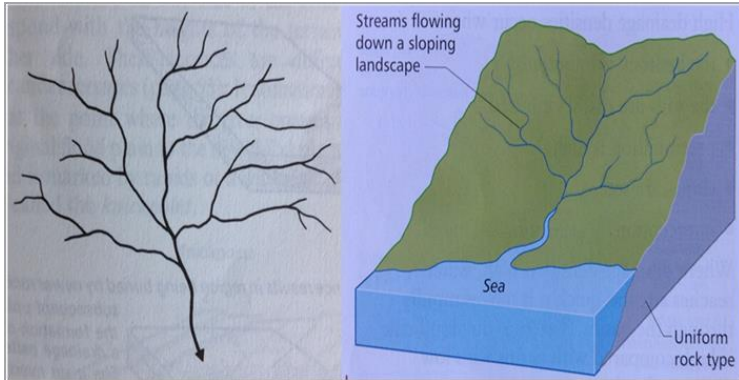
Gambar 10. Peta Citra Kota Banjarmasin

2. Hidrologi

a. Sungai

Kota Banjarmasin cenderung dilalui beberapa sungai dan anak-anaknya yang membentang dari utara hingga selatan dan sebagian ke timur laut hingga barat daya, yang menyebabkan Kota Banjarmasin sering disebut Kota Seribu Sungai. Aliran sungai di wilayah Kota Banjarmasin berpangkal diantara dua sungai (Barito dan Martapura) yang keadaannya tergantung dari kondisi air laut yang terkadang pasang surut. Sungai utama dan besar di Kota Banjarmasin ini merupakan perpaduan dari beberapa anak sungai dan Sungai Barito sendiri yang terdiri dari Sungai Alalak, Sungai Kuin, dan Sungai Martapura.

Laut Jawa yang terkadang pasang surut berpengaruh terhadap permukaan Sungai Barito dan Sungai Martapura, yang menyebabkan saluran air di Kota Banjarmasin akan tergenang jika keadaan air di Laut Jawa sedang pasang. Tidak tingginya permukaan tanah atau sekitar 0,16 m dibawah air laut membuat air sungai saat masuknya musim kemarau terkadang menjadi payau dan asin karena pengaruh instrusi air laut. Menurut ilmu hidrologi aliran sungai di Kota Banjarmasin terpola dengan bentuk mendaun atau yang bisa disebut *dendritik drainage patern* dimana alirannya dari sungai cabang menuju sungai utama. Berdasarkan klasifikasi sungai-sungai, pola alirannya sungai-sungai dan cabang-cabangnya di Kota Banjarmasin dapat ditunjukkan pada Gambar 3.6 dan Tabel 3.7 berikut.



Gambar 12. Pola Aliran Sungai Mendaun (*dendritik drainage pattern*) di DAS Martapura Kota Banjarmasin

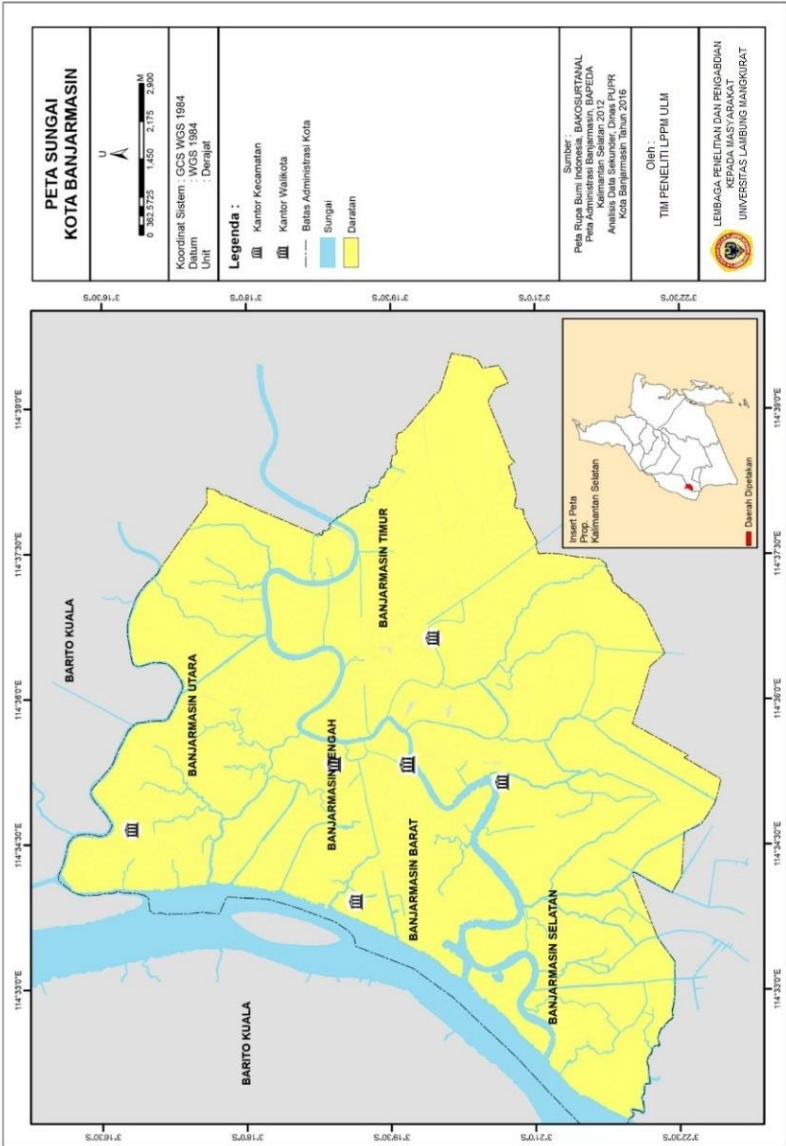
Sumber: <https://en.wikipedia.org>

Tabel 5. Klasifikasi Sungai-Sungai yang Mengalir di Kota Banjarmasin

No	Nama Sungai	Lebar (m)
Sungai Besar		> 500 m
1	Sungai Barito	± 1200
2	Sungai Martapura	± 600
Sungai Sedang		25 - 500 m
1	Sungai Anjir Mulawarman	± 27
2	Sungai Kuin	± 40
3	Sungai Pangeran	± 26
4	Sungai Andai	± 32
5	Sungai Pelambuan	± 35
6	Sungai Alalak	± 60
7	Sungai Miai	± 28
Sungai Kecil		2 - 25 m
1	Sungai Teluk Dalam	± 15
2	Sungai Tatas	± 10
3	Sungai Telawang	± 6,2
4	Sungai Duyung	± 20
5	Sungai Antasan	± 12

No	Nama Sungai	Lebar (m)
6	Sungai Kuripan	± 10
7	Sungai Baru	± 8
8	Sungai Pacinan	± 8
9	Sungai Veteran	± 15
10	Sungai Banyuur SP	± 15
11	Sungai Pekapuran	± 16
12	Sungai Belitung	± 14
13	Sungai Skip Lama	± 2,5
14	Sungai Bilu	± 12
15	Sungai Saka Permai	± 12
16	Sungai Pemurus	± 17
17	Sungai Kidaung	± 18
18	Sungai Jarak	± 12
19	Sungai Awang	± 16
20	Sungai Jingah	± 14
21	Sungai Surgi Mufti	± 6
22	Sungai Gardu	± 9
23	Sungai Lulut	± 13
24	SungaiTatah Belayung	± 18
25	Sungai Kelayan	± 16
26	Sungai Bagau	± 20
27	Sungai Basirih	± 23
28	Sungai Simpang Jelai	± 17
29	Sungai Baguntan	± 15

Sumber: Dinas PUPR Kota Banjarmasin, 2019



Gambar 13. Peta Sungai Kota Banjarmasin

b. Pasang Surut

Kota Banjarmasin memiliki tipe pasang surut yakni tipe diurnal, dimana untuk 1 hari terjadi gelombang pasang dan surut masing-masing 1 kali. Durasi air pasang antara 5-6 jam dan saat waktu pasang aliran sungai baik Sungai Barito maupun Sungai Martapura dibendung oleh permukaan air laut sehingga tidak dapat keluar dari muara sungai. Keadaan tersebut tidak berbahaya asalkan curah hujan tidak terlalu tinggi. Akumulasi air yang besar dapat menyebabkan resapan yang tersimpan pada permukaan air saat surut.

Kondisi puncak permukaan air pasang yang disertai dengan curah hujan yang besar dapat menimbulkan kerawanan. Bagian hilir sungai yang membendung aliran air berdampak pada debit air sungai meninggi dan terdistribusi ke daerah yang memiliki resapan, tambahan air hujan akan menyebabkan debit air akan terus meningkat. Daerah resapan yang tidak dapat lagi menampung air menyebabkan terjadinya luapan air di permukaan jalan. Kondisi permukaan sungai di Kota Banjarmasin tergantung dari keadaan pasang surut air di muara Sungai Barito yang disebabkan seluruh sungai di Kota Banjarmasin tergantung dari distribusi air dari muara Sungai Barito. Dinas Ad-Pel Kota Banjarmasin dalam pengamatannya bahwa kondisi permukaan air di ambang Sungai Barito setiap hari terjadi secara tidak menentu. Keadaan tersebut membuat kapal yang bersandar di Pelabuhan Trisakti menjadi sulit untuk dihitung secara pasti.

Kemiringan sungai di Kota Banjarmasin memiliki tingkat kelandaian yang tinggi, yang disebabkan topografi cenderung tidak miring dan arus yang tidak cepat, selain itu beberapa kekurangan yakni tumbuhan yang hidup di daerah sungai, sampah yang berhamburan, lumpur yang terendap, dan rumah penduduk yang banyak disekitaran sungai.

Keadaan surut cenderung arus menuju hilir dan sebaliknya saat pasang arus berbalik menuju hulu. Arus sungai saat pasang berkecepatan antara 0,28–0,373 m/det dengan rata-rata 0,343 m/det), dibandingkan saat surut menjadi 0,321–0,395 m/det dengan rata-rata 0,363 m/det (Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Kawasan Wisata dan Rekreasi Kota Banjarmasin, (2003) dalam RT RW Banjarmasin, (2009).

3. Iklim

Tropis merupakan jenis iklim Kota Banjarmasin dengan karakteristik tipe A yang memiliki nilai $Q=14,29\%$ (persentase akumulasi rata-rata antara bulan kering dan bulan basah). Temperatur kota Banjarmasin berkisar antara 28°C - 38°C dengan suhu udara maksimal sekitar 33°C dan minimum suhu udaranya 22°C yang disertai variasi musim yang sedikit. Curah hujan Kota Banjarmasin kisaran 2.400 mm-3.500 mm dengan perubahan setiap tahunnya antara 1.600 mm - 3.500 mm.

Angin kering yang berhembus dari Benua Australia berdampak pada terjadinya kemarau sedangkan angin musim barat dari wilayah Benua Asia mengakibatkan musim hujan yang cenderung terjadi di bulan November hingga April. Matahari yang bersinar dalam satu tahun saat musim penghujan berada dikisaran 2,8 jam/hari sedangkan pada musim kemarau hingga 6,5 jam/hari. Tingkat kelembaban udara secara bulanan yang terbesar terjadi pada periode Januari yang berada dikisaran 74% hingga 91% sedangkan bulan September cenderung paling kecil yakni kisaran 52%. Penguapan air cenderung eksplosif yang disebabkan matahari yang bersinar dan pengaruh angin dengan kisaran 3,4 mm/hari hingga 4,1 mm/hari yang terjadi diantara musim hujan dan musim kemarau. Nilai tertinggi penguapan terjadi sebesar 11,4 mm/hari dan terendah 0,2 mm/hari.

4. Topografi dan Kemiringan Lereng

Topografi adalah kajian atau penguraian yang terperinci tentang tinggi rendahnya permukaan bumi (*relief*) pada suatu daerah, atau pemetaan yang terperinci tentang permukaan bumi pada suatu daerah tertentu. Ekspresi topografi dalam lahan atau bentang alam di jabarkan dalam ketinggian tempat dan perbedaan tinggi (Wijayanti, 2017). Letak Kota Banjarmasin sejauh 50 km dari bibir Sungai Barito yang dialiri Sungai Martapura, Topografi yang cenderung datar dan relatif tidak tinggi merupakan wujud gambaran Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin berada dibawah rata-rata permukaan air laut kisaran 0,16 m (dpl) dengan lereng yang memiliki kemiringan antara 0% hingga 2%. Dataran yang cenderung terletak tidak diatas permukaan air ini menyebabkan wilayah Kota Banjarmasin merupakan kawasan rawa tergenang yang dipengaruhi oleh kondisi pasang surut.

5. Geologi dan Tanah

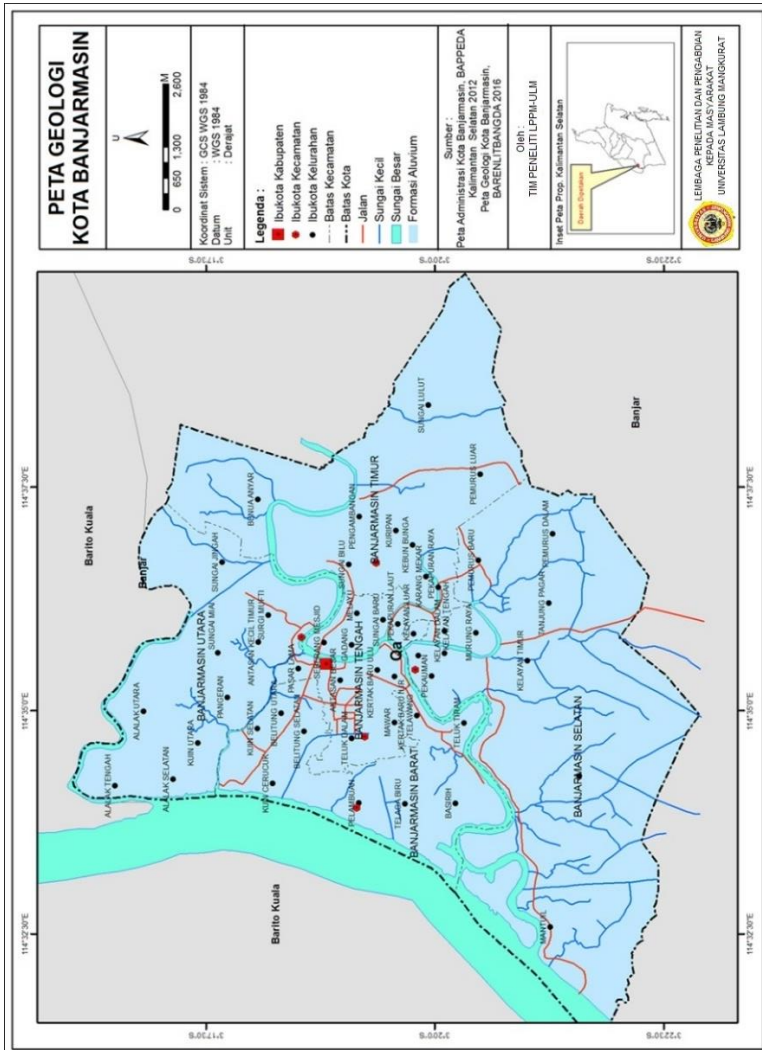
Jenis batuan yang terdapat di Kota Banjarmasin adalah Alluvium (Qa) yang prosesnya terbentuk dari gabungan lumpur, lempung, pasir, dan kerikil. Bentuk atau struktur geologi di Kota Banjarmasin yaitu:

- a. Struktur *Berai (Tomb)*; memiliki ketebalan 20-200cm yang terbentuk melalui batu gamping putih berlapis;
- b. Struktur *Dahor (Tqd)*; memiliki ketebalan sekitar 2-10cm yang terjadi atas perpaduan antara konglomerat, pasir kuarsa, dan batu lempeng serta lignit;
- c. Struktur *Karamalan (KaK)*; terbentuk karena perselingan batu lempung dan batu lanau dengan tebal sekitar 20-50 cm;
- d. Struktur *Pudak (Kap)*; terbentuk melalui lava disertai perselingan bleksi atau konglomerat dan batuan pasir dengan olistolit yang diantaranya: batu gamping, basal, batuan malihan, dan *ultramafic*;

- e. Struktur *Tanjung (Tet)*; memiliki ketebalan sekitar 50-150cm yang terbentuk oleh batu pasir kuarsa berlapis dengan perselingan batu lempung kelabu pada bagian atas, serta batubara hitam mengkilap pada bagian bawah;
- b. Struktur *Alluvium (Qa)*; terbentuk melalui lumpur, kerikil, pasir, lempung, dan lanau;
- c. Struktur *Pitanak (Kvep)*; terbentuk melalui lava berupa struktur bantal perselingan dengan breksi dan konglomerat;
- d. Kelompok *Ultramafik (Mub)*; terbentuk perpaduan atas harzburgit, piroksenit, dan serpentit.

Jenis tanah di Kota Banjarmasin cenderung aluvial dengan struktur yang mendominasi yaitu lempung dan tidak banyak terkandung organosol *glei humus* khususnya di daerah gambut. Tanah aluvial adalah tanah yang baik untuk segala macam tumbuhan karena memiliki kesuburan yang bagus, kandungan hara yang lebih dari cukup dan bergantung dari kuantitas bahan induk. Jenis tanah ini cenderung berada di tempat yang tidak miring yang menyebabkan saat terjadinya musim hujan akan tergenang oleh endapan air. Material humus yang terkandung didalamnya yang memiliki bahan organik sekitar 12 kg/m³ dengan kedalaman tidak lebih dari satu meter dari permukaan tanah sehingga menjadikan tanah ini termasuk sebagai *alluvial humik*. Tanah ini memiliki tingkat kesuburan yang baik yang disebabkan oleh bahan organik yang terkandung didalamnya cukup tinggi. Tanah *aluvial* mempunyai keasamaan diatas rata-rata, namun salinitasnya yang tidak tinggi, dan kandungan pospor yang rendah. Tanah ini termasuk jenis yang dapat dimanfaatkan untuk perkebunan dengan memperhatikan sifat kimia dan karakteristik fisiknya. Pasir berliat dengan tekstur debu kasar membuktikan sifat tanah termasuk *drainase* sedang. Jenis tanah ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembangunan tempat

tinggal baik semi permanen hingga non permanen. Distribusi sebaran formasi batuan di Kota Banjarmasin dapat ditunjukkan Gambar 14.



Gambar 14. Peta Geologi Kota Banjarmasin

6. Penggunaan Lahan dan Rencana Pola Ruang

Kota Banjarmasin yang berkembang secara terpusat dengan aturan penyediaan prasarana bagi perpindahan alat transportasinya menyerupai sarang laba-laba. Beban pusat Kota Banjarmasin akan semakin bertambah berat dengan pola tersebut yang pada akhirnya berdampak tidak maksimalnya fasilitas publik diberbagai sektor. Perkembangan Penggunaan tata kota yang berkembang disepanjang jalan-jalan terpola menyerupai pengelompokan hierarki yang mendekati pusat kota yang mengakibatkan bergantung terhadap pusat kota yang sangat tinggi. Keberadaan dan banyaknya tempat di kawasan pinggiran yang tidak tinggi dan terbukanya pemanfaatan lahan campuran (*mixed use*), seperti rumah kantor (rukan) dan rumah toko (ruko) di layanan pusat kota karena pola ini sangat efisien dan efektif bagi perekonomian karena mampu berperan sebagai pendukung distribusi barang.

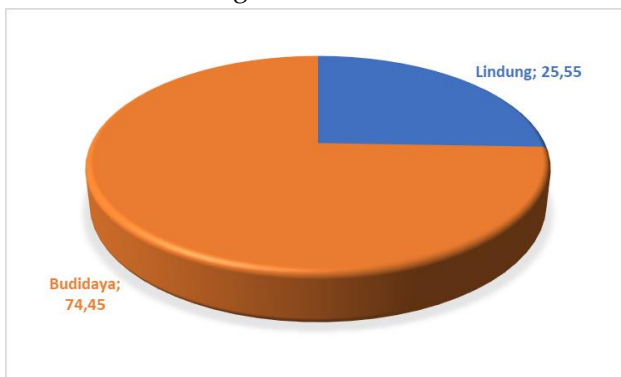
Lahan pada hakekatnya adalah suatu wujud fisik alami dan biotik atau biofisik, (Ritohardoyo, 2013). Bentuk penggunaan lahan disuatu wilayah mencerminkan beberapa aspek antara lain kualitas sumberdaya alam, kegiatan penduduk, fungsi lahan bagi kebutuhan penduduk, (Adisasmita, 2013). Penggunaan lahan Kota Banjarmasin terbagi menjadi beberapa fungsi yang diantaranya adalah fasum (layanan publik), perumahan, perekonomian, pertanian, ruang terbuka hijau, dan sisanya berupa tanah terbuka. Distribusi sebaran penggunaan lahan di Kota Banjarmasin dapat ditunjukkan Gambar 3.10 dengan pemanfaatan untuk sawah memiliki luas 4049,87 Hektar atau 50.51% yang berarti juga menjadi penggunaan yang terbesar, sedangkan Industri merupakan aktivitas yang menggunakan luasan lahan tekecil yaitu seluas 77,10 atau 0,96% hal ini dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Penggunaan Lahan di Kota Banjarmasin

No	Penggunaan Tanah	Jumlah	
		Hektar (Ha)	%
1.	Sawah	4049,87	50,51
2.	Ruang Terbuka Hijau	38,04	0,47
3.	Fasum	72,23	0,90
4.	Industri	77,10	0,96
5.	Perdagangan/Jasa	107,08	1,33
6.	Permukiman Rendah	316,02	3,94
7.	Permukiman Sedang	2334,97	29,12
8.	Permukiman Tinggi	1006,06	12,54
9.	Tanah Terbuka	15,72	0,19
Jumlah		8017,09	100,0

Sumber: RTRW Kota Banjarmasin, 2009

Rencana pola ruang Kota Banjarmasin sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2013-2031, menunjukkan bahwa kegiatan budidaya dalam rencana pola ruang di Kota Banjarmasin dominan sebesar 74,45%, sedangkan kawasan lindung 25,55%.



Gambar 15. Perbandingan Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung dalam Rencana Pola Ruang Kota Banjarmasin 2013-2031

Distribusi jenis peruntukkan pada Rencana Pola Ruang Kota Banjarmasin 2013-2031 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 7. Rencana Pola Ruang Kota Banjarmasin

No.	Jenis Rencana Peruntukkan Ruang	Kawasan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Pergudangan	Budidaya	226	2,3
2	Perdagangan dan Jasa	Budidaya	509	5,17
3	Peruntukan Lainnya, Pendidikan	Budidaya	87	0,88
4	Peruntukan Lainnya, Peribadatan	Budidaya	6	0,06
5	Peruntukan Lainnya, Tempat Pengolahan Akhir	Budidaya	37	0,38
6	Peruntukan Lainnya, Pertahanan Negara	Budidaya	34	0,35
7	Perkantoran	Budidaya	49	0,5
8	Perumahan Kepadatan Sedang	Budidaya	1024	10,4
9	Perumahan Kepadatan Tinggi	Budidaya	167	1,7
10	Kawasan terbuka non Hijau, Halaman & Jalan	Budidaya	138	1,4
11	Pariwisata	Budidaya	23	0,23
12	Peruntukan Lainnya, Pertanian	Budidaya	234	2,38
13	Perumahan Kepadatan Rendah	Budidaya	3612	36,68
14	Peruntukan Lainnya, Kesehatan	Budidaya	22	0,22
15	Pertanian Berkelanjutan	Budidaya	320	3,25
16	Peruntukan Lainnya, Pelabuhan	Budidaya	306	3,11
17	Industri	Budidaya	496	5,04
18	Perkantoran	Budidaya	39	0,4
19	Kawasan terbuka non Hijau, Sungai	Lindung	828	8,41
20	Cagar Budaya	Lindung	6	0,06
21	Ruang Terbuka Hijau	Lindung	1683	17,09
JUMLAH			9.846	100

Sumber: Peta Rencana Pola Ruang Kota Banjarmasin, RTRW 2013-2032

7. Kawasan Kumuh Kota Banjarmasin

Perubahan penggunaan lahan di Kota Banjarmasin berdampak pada penyempitan kawasan permukiman. Kondisi yang berakibat pada munculnya permukiman kumuh di Kota Banjarmasin. Penduduk yang menghuni permukiman kumuh khususnya permukiman liar memiliki masalah yang lebih beragam. Ketidakpastian status kepemilikan tempat tinggal. Cara pengaturan permukiman yang tidak memiliki legalitas jelas berbeda pengaturannya dengan permukiman kumuh yang disebabkan bukan hanya dilakukan pengaturan fisik namun juga terkait gagasan penataan tata kota dan kebijakan permukiman turunannya.

Gerakan Nasional Penataan Lingkungan Kumuh (GENTA KUMUH) yang dicanangkan pada tahun 2011 dan digagas sebagai bentuk kepedulian Pemerintah atas aksi Bank Dunia dan UNCHS tentang program "*Cities Without Slums Initiative*" yang dimulai sejak tahun 1999, sehingga hal tersebut berdampak pada semakin ditingkatkannya penataan lingkungan permukiman kumuh. Program GENTA KUMUH bertujuan untuk peningkatan fasilitas publik dan layanan umum hingga tahun 2020 bagi 100 juta penghuni permukiman kumuh di Indonesia yang pada akhirnya Pemerintah akan menghilangkan permukiman kumuh tersebut selambat-lambatnya pada tahun 2025.

Peningkatan permukiman kumuh dan liar di Kota Banjarmasin cenderung disebabkan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat sehingga akan menjadi beban yang tidak ringan bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menanganinya. Kemiskinan dan tingkat pendidikan yang tidak tinggi menjadi faktor utama dalam permasalahan permukiman kumuh Kota Banjarmasin, sehingga menjadikannya semakin kompleks.

Kenaikan angka kelahiran bukan sebagai faktor utama dalam laju pertumbuhan penduduk, namun lebih kepada migrasi dan urbanisasi yang masif. Terbukanya kesempatan dalam mengakses informasi, komunikasi dan transportasi melahirkan aksi masyarakat untuk berani melakukan perpindahan menuju wilayah perkotaan, namun urbanisasi cenderung terjadi secara alami dan tidak merata serta berpotensi lahirnya daerah kumuh yang baru diperkotaan. Pertumbuhan penduduk yang masif terjadi karena angka laju pertumbuhan yang tinggi sehingga menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan hingga sekarang. Luas kawasan kumuh di Kota Banjarmasin, tersaji pada tabel berikut:

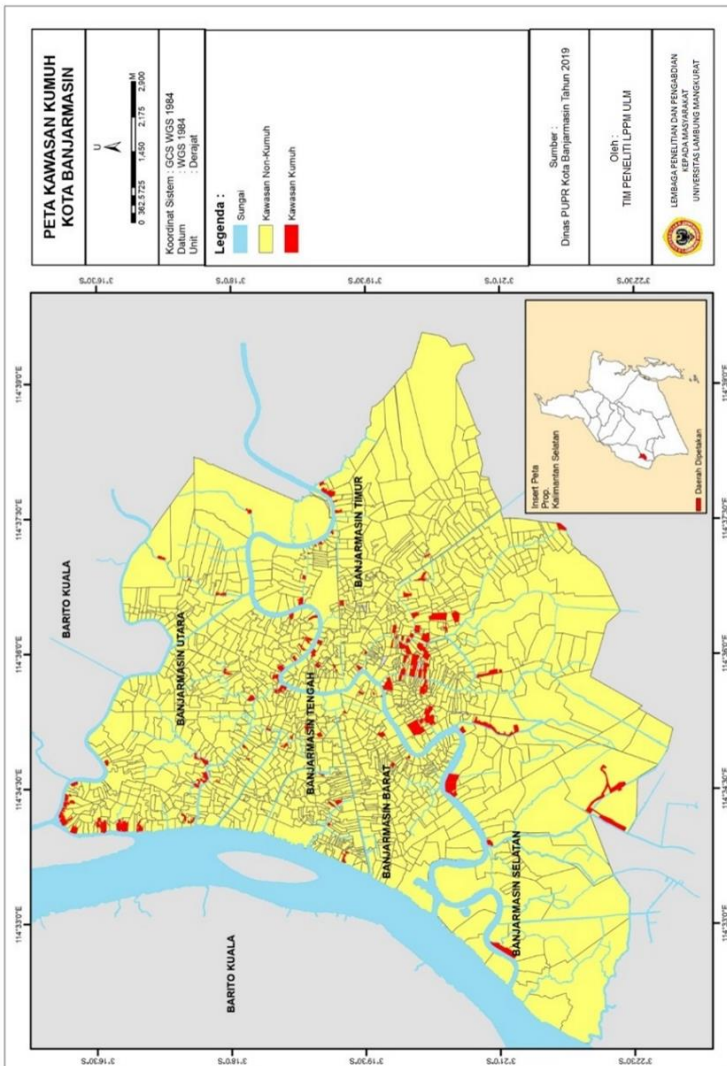
Tabel 8. Kawasan Kumuh dan Non Kumuh Kota Banjarmasin

No.	Kawasan Kumuh dan Non Kumuh	Luas (Ha)	%
1	Kawasan Kumuh	166	2
2	Kawasan non-Kumuh	9.680	98
Jumlah		9.846	100

Sumber: Peta Kawasan Kumuh Kota Banjarmasin,
Dinas PUPR Banjarmasin, 2020

Permasalahan permukiman kumuh adalah masalah besar yang diprediksi dapat memunculkan beberapa kantong kemiskinan yang besar dan berujung lahirnya konflik sosial di luar kendali pemerintah kota untuk dapat diawasi dan ditangani. Salah satu masalah sosial di Indonesia yang sulit untuk diatasi adalah permukiman kumuh. Segala macam program dan upaya telah dijalankan agar teratasinya masalah tersebut, namun masih banyak ditemukan permukiman kumuh hampir diseluruh sudut kota yang diiringi dengan tingkat ketertiban yang kurang baik dalam kehidupan bermasyarakat di perkotaan. UNCED dalam (UNDESA), 2003 menjelaskan bahwa kekumuhan pusat kota umumnya berada pada kawasan kota tua, yang ditandai dengan kepadatan

penduduk yang tinggi, kawasan permukiman lama dan berada pada tanah/lahan yang ilegal.



Gambar 17. Peta Kawasan Kumuh Kota Banjarmasin

Indonesia merupakan negara yang sedang memasuki fase perkembangan yang terdapat problematika perkotaan yang sangat beragam. Tingginya laju pertumbuhan penduduk perkotaan merupakan salah satu indikasi proses berkembangnya suatu negara, yang mengakibatkan urbanisasi dan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, (Sabari, 1978). Perwujudan permukiman kumuh yang terlihat secara kasat mata cenderung dianggap mengurangi keindahan dan ketertiban kota. Program tata kota cenderung menyasar kawasan permukiman kumuh, (Singh, 2001). (Bianpoen, 1991) menggambarkan lingkungan kumuh menjadi beberapa kondisi :1) keadaan hunian yang padat dan cenderung berdesakan, 2) terjadi ketidak seimbangan antara luas rumah dengan jumlah penghuni, (3) rumah hanya difungsikan untuk istirahat dan pelindung dari panas, dingin dan hujan, (4) penataan letak tidak teratur, (5) tanah bukan milik penghuni, dan (6) sarana-prasarana dan fasilitas sosial tidak memadai (contohnya puskesmas dan tempat ibadah).

Masyarakat yang kurang beruntung di perkotaan memiliki karakteristik sangat unik dengan segala kendala sosial yang harus diidentifikasi akar masalahnya sehingga dapat dicarikan jalan untuk mensejahterakan mereka, Faktor ketidakberdayaan menjadikan mereka sebagai ancaman keberadaan kota dan hal ini bukanlah kehendak mereka. Permukiman kumuh cenderung melahirkan berbagai macam efek samping. Tidak sedikit masyarakat kumuh yang mendapat penghasilan rendah dan disertai kemampuan ekonomi menengah ke bawah dinilai sebagai sumber pelanggaran sosial.

Salah satu daerah kumuh di Indonesia adalah Kota Banjarmasin yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin yang bertumpu dibidang jasa dan

perdagangan dengan pusat kegiatan pembangunan di bidang industri akan berdampak pada perubahan komposisi baik di sektor permukiman, kependudukan, transportasi yang akhirnya akan terjadi kekumuhan karena penggunaan lahan yang di eksploitasi melebihi.

Kota Banjarmasin cenderung dinilai akan berpotensi menghasilkan banyak masalah yang disebabkan sering munculnya berbagai pelanggaran norma dan sumber masalah sosial lainnya. Kota Banjarmasin sedang mengalami permasalahan permukiman kumuh dan kota besar lainnya di Indonesia pun menghadapi hal yang sama, menurut publikasi World Bank (Noor, 2020) permukiman kumuh merupakan bagian yang terabaikan dari tata kelola perkotaan dimana keadaan kehidupan masyarakatnya belum layak, yang diantaranya seperti kondisi tempat tinggal yang tidak standar, kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas yang tidak standar atau atau bahkan tidak tersedia.

Permukiman kumuh menjadi permasalahan serius yang menghampiri di beberapa kota besar di Indonesia bahkan di negara berkembang lainnya. Permukiman kumuh dianggap sumber masalah yang harus dibenahi. Pertumbuhan penduduk yang meningkat tajam menjadi faktor utama lahirnya pertumbuhan permukiman, sedangkan keadaan sosial ekonomi yang disertai kapabilitas dalam mengelola kota menjadi penentu diwujudkannya suatu kualitas permukiman. Pertumbuhan penduduk miskin yang disertai dengan minimnya peran pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan serta penyediaan layanan yang baik menjadi salah satu faktor munculnya permukiman kumuh.

Kota Banjarmasin tidak siap dalam menghadapi konsep sistem perkotaan untuk mengakomodir kegiatan perkotaan sebagai sistem rencana tata kota dengan segala aspek dan

penerapannya yang diantaranya menerima, mengatur dan mendayagunakan para pendatang. Kegiatan yang tidak sama dan tidak dalam satu gagasan kegiatan perkotaan berdampak pada tidak adanya kegiatan yang saling berkaitan, termasuk berdirinya permukiman yang berkembang di luar gagasan yang menyebabkan munculnya permukiman kumuh yang baru.

Dana pemerintah yang terbatas yang diperuntukan untuk menata kota dalam menyelesaikan masalah kependudukan juga sebagai penyebab fasilitas permukiman menjadi mahal dan sangat terbatas. Masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah harus tetap memikirkan kebutuhan akan tempat tinggal karena kondisi ini mutlak bagi kehidupan mereka, namun disisi lain beban mereka tidak ringan untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pembangunan rumahnya agar memadai. Jumlah pendapatan yang digunakan untuk pemeliharaan dan pembangunan akan mempengaruhi kondisi permukimannya.

Permasalahan tumbuhnya permukiman kumuh yang terus dibiarkan berkorelasi dengan derajat kualitas hidup masyarakat miskin yang tetap rendah. Mengakibatkan kebakaran, kesempatan terjadinya tindak kejahatan, ancaman keberlangsungan norma susila/sosial, semrawutnya pengelolaan tanah yang mengakibatkan musibah banjir yang makin memperparah kondisi lingkungan. Penggusuran permukiman yang tidak layak oleh pemerintah tidak serta merta menghilangkan permasalahan, selain alasan kemanusiaan, kemungkinannya penghuni akan menyerobot kembali lahan ditempat lain sehingga dengan ditutupnya satu lahan akan memunculkan lahan baru lainnya. Faktanya kawasan kumuh tersebar hampir diseluruh wilayah Kota Banjarmasin, di antaranya Sungai Lulut, Kampung Melayu, Kelayan Selatan, Belitung, Surgi Mufti, Sungai Jingah, Alalak Selatan, Pasar Lama, Teluk Dalam, Basirih, Kuin Utara dan Pelambuan.

Pemerintah harus membantu dalam hal penyediaan fasilitas umum antara lain saluran air, air yang layak untuk diminum, akses jalan, perbaikan kawasan dan meningkatkan kualitas hunian serta pembangunan Rumah Susun Sederhana untuk dapat disewa oleh masyarakat miskin. Pembangunan fasilitas umum dapat dilakukan dengan mengacu konsep yang memberdayakan masyarakat dimulai dari merencanakan hingga memelihara infrastruktur. Program yang diinisiasi oleh pemerintah beberapa tahun terakhir dalam rangka menggalakan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas atau yang biasa disingkat PLPBK. Kegiatan yang dijalankan pada perkotaan ini sangat efektif dalam mengupas problema kekumuhan yang selama ini menjadi permasalahan perkotaan, meskipun bertahap dalam menghapus kekumuhan tersebut. Pemerintah kota diharapkan dapat melahirkan gagasan baru untuk menyelesaikan kekumuhan perkotaan.

Perilaku penghuni yang sejalan dengan program ini dapat menciptakan lingkungan kumuh yang lebih kondusif, interaksi satu sama lain sangat dibutuhkan bagi semua pihak yang terkait. Komunikasi yang efektif memegang peranan penting terhadap gagasan untuk perkembangan suatu kawasan. Nilai utama pada konsep ini adalah terjadinya pertukaran pemikiran sebagai bahan pembelajaran, keteraturan sikap dan perilaku masyarakat yang mematuhi aturan dan kesepakatan merupakan konsep yang disadur berdasar ilmu manajemen.

Penataan kawasan kumuh terdiri dari banyak aspek penting sebagai pendukungnya salah satunya aspek sosial ekonomi. Peningkatan aspek sosial ekonomi sangat dibutuhkan dalam pengembangan konsep penataan kawasan seperti Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang telah

berubah dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau biasa disebut PNPM, sebagai lanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), yang merupakan produk paduan dari beberapa aspek seperti sosial ekonomi, lingkungan dan pembangunan infrastruktur.

Kendala yang biasa terjadi dalam penataan kawasan kumuh di perkotaan adalah dasar ilmu masyarakat dalam mengetahui standar teknis bangunan yang cenderung minim serta distribusi tugas antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani kawasan kumuh masih belum jelas pembagiannya. Informasi dan akses masyarakat di lembaga keuangan masih sangat terbatas yang disertai faktor kemauan masyarakat sendiri yang dinilai masih tidak terlalu kuat, konsep yang dijalankan pemerintah belum berjalan dengan baik dan kondisi sosial ekonomi yang masih terbatas.

Aspek sosial ekonomi mengambil peran dalam membantu masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, masyarakat dapat mengambil peranan melalui infrastruktur yang diinvestasikan dan meningkatkan proses tata kelola kawasan kumuh. Dinamika masyarakat yang melakukan penolakan, penggalan informasi, dan penetapan komitmen merupakan gejala umum yang terjadi dalam mencapai tujuan tersebut.

Aspek sosial ekonomi yang berperan dalam proses penataan kawasan kumuh perkotaan harus dapat merangkum konsep secara bersama-sama antara pemerintah, swasta, dan pengguna layanan, khususnya dalam pengambilan keputusan, perencanaan yang terarah, implementasi yang nyata, komitmen, dan kebiasaan yang dimiliki serta partisipasi semua pihak. Pemangku kepentingan harus diberikan kesempatan untuk turut serta berpartisipasi penuh dalam peningkatan aspek sosial ekonomi. Kesempatan dalam peningkatan sosial

ekonomi yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, hingga terjadinya pertukaran informasi baik pada keputusan yang diambil, implementasi dilapangan, dan evaluasi sebagai bentuk perbaikan untuk kedepannya.

Pembangunan sosial ekonomi menurut teori geografis terdiri dari tiga aspek utama yakni lembaga, prasarana, dan campur tangan yang selektif dan dalam arahan manajemen perubahan. Peran sosial ekonomi dapat ditingkatkan menggunakan empat variabel diantaranya kelembagaan, meningkatkan kemampuan, intervensi, dan komunikasi.

Pengelolaan aspek sosial ekonomi dalam menata kawasan kumuh memerlukan sejumlah input agar memiliki tingkat keberhasilan yang besar. Pendataan kualitas masyarakat, penyamaan persepsi program pemerintah, mengembangkan potensi kawasan, dan pengaplikasian aturan yang berlaku. Aspek sosial ekonomi harus ditingkatkan dengan tetap mematuhi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, inovasi, memecahkan permasalahan secara efektif dan pengambilan keputusan yang berpihak kepada masyarakat serta keberlanjutan. Pemenuhan kebutuhan melalui peningkatan aspek sosial ekonomi tidak diperkenankan berdampak negatif bagi semua pihak baik sekarang maupun dimasa mendatang. Pembiayaan yang menysar kawasan utama, pembiayaan disalurkan pada target tertentu dengan harapan mendapatkan hasil yang besar dan signifikan dengan mengkorelasikan seluruh program dan sumber daya yang ada di pemerintahan, investor maupun masyarakat.

Peran nakhoda yang dipegang pemerintah untuk tata kelola penataan kawasan kumuh adalah mengelola regulasi untuk mengatur kehidupan publik dari pemerintah kepada masyarakat pada aspek sosial ekonomi. Program yang

menghindari model kawasan kumuh yang tidak sama satu sama lainnya. Penataan kawasan yang dilakukan pemangku kepentingan wajib dapat menciptakan peningkatan kualitas yang terjamim secara sosial ekonomi.

Peningkatan kapasitas masyarakat yang diberikan berupa pelatihan yang dapat diwujudkan dengan pemberian komitmen warga agar mampu berperan secara masif, yang dimulai saat mengambil keputusan, merencanakan, pengimplementasian, memelihara, mengawasi, dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sosial ekonomi pada penataan kawasan kumuh secara mutlak. Sinergisitas antara pemerintah, penduduk, dan investor diciptakan dalam suatu konsep kerjasama operasional yang saling berkolaborasi, baik berbasis internal maupun eksternal. Pencapaian tujuan program dapat ditempuh melalui salah satu cara yakni pembiayaan bersinergi yang dapat disalurkan melalui uang tunai maupun inkind yang komposisinya memperhatikan aspek efektivitas, (Wajib, 2020).

Kesadaran pemukim yang menjalankan pola hidup sehat, bersih, dan tertib cenderung masih sedikit. Kesadaran tersebut terus disosialisasikan agar memperbesar potensi masyarakat dalam proses pemberdayaan. Penataan lingkungan secara kelembagaan dan kawasan kumuh yang memposisikan masyarakat sebagai ujung tombak harus selalu dipacu dengan mewujudkan hunian yang sesuai standar pada kawasan perumahan, cepat tanggap dalam mengembangkan jati diri, produktivitas, dan masyarakat yang mandiri.

Tata kelola kawasan kumuh harus dapat dikombinasikan baik secara konstruksi maupun fungsi dengan melibatkan potensi sumber daya yang terdapat di suatu wilayah yang diimplementasikan oleh masyarakat agar tercapainya kondisi yang layak. Tata Kelola kawasan kumuh

sangat penting untuk dilakukan pengembangan sesuai kualitas dan sumber daya yang tersedia, yang disebabkan untuk mencapai kemandirian masyarakat yang produktif dan berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Masalah yang terdapat di kawasan kumuh mustahil diselesaikan hanya dari 1 pihak saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama yang disertai dengan daya yang saling memberikan dukungan dan sinergisitas untuk mencapai tujuan yang maksimal. Pemikiran yang selaras dalam menentukan sasaran, kebijakan, dan waktu yang pas dalam pengimplementasiannya.

Pemangku kebijakan wajib menempatkan dirinya sebagai nakhoda warga yang bergantung dari keberhasilan tercapainya penghidupan masyarakat yang merata. Masyarakat yang heterogen dapat dijadikan modal utama dalam menghadapi hambatan di masa mendatang sangat kompleks dengan tingkat persaingan yang tinggi. Aspek sosial ekonomi berperan penting untuk tata kelola kawasan kumuh dalam mewujudkan masyarakat yang siap menghadapi segala jenis perubahan sebagai peningkatan kesejahteraan. Masyarakat dapat berkontribusi melalui investasi prasarana seperti penggalangan lahan dan perlunya meningkatkan peran masyarakat secara aktif.

B. Rumah Tangga Miskin di Lingkungan Kumuh Kota Banjarmasin

1. Kondisi Umum Rumah Tangga Miskin di Lingkungan Kumuh Kota Banjarmasin

Kondisi umum rumah tangga miskin di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin, yakni sejumlah informasi yang meliputi: (1) tipologi kawasan kumuh berdasarkan kecamatan (Banjarmasin Barat, timur, tengah, selatan utara); (2) umur (<20 tahun; 20-33 tahun; 33-60 tahun; >60 tahun); (3) suku (Banjar,

Dayak, Jawa, Sunda, Madura, Bali/Lombok); (4) status pernikahan (menikah, duda/janda, belum menikah); (5) tanggungan keluarga (1 orang, 2 orang, 3 orang, >3 orang); (6) pendidikan kepala keluarga (tidak Sekolah; SD-SMP [Sederajat]); SAM [sederajat]; Diploma/sarjana; (7) proses kepemilikan IMB (tidak Ada, Dikeluarkan instansi terkait, Jasa Pihak Lain, Pemilik Sebelumnya; dan (8) aspek relokasi (tidak berkenan di relokasi dengan alasan Lama Menetap), Tidak berkenan di relokasi dengan alasan dekat lokasi kerja, tidak berkenan di relokasi dengan alasan warisan keluarga tidak berkenan di relokasi dengan alasan tidak sesuai ganti untung, Berkenan dilakukan relokasi, tidak Ada, Sebagaimana disajikan pada tabel 9 berikut:

a. Kelurahan

Adapun data mengenai responden berdasarkan kelurahan pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Kelurahan

No.	Kecamatan	Kelurahan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
			Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Banjarmasin Barat	Kuin Selatan	0	2	2	-	0,24	0,14
2	Banjarmasin Timur	Banua Hanyar	44	13	57	6,90	1,57	3,89
		Karang Mekar	19	0	19	2,98	-	1,30
		Kuripan	59	30	89	9,25	3,62	6,07
		Pekapuran Raya	2	272	274	0,31	32,81	18,68
		Pengambangan	61	5	66	9,56	0,60	4,50
		Sungai Lulut	20	1	21	3,13	0,12	1,43
3	Banjarmasin Tengah	Kelayan Luar	0	1	1	-	0,12	0,07

No.	Kecamatan	Kelurahan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
			Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
		Pasar Lama	3	85	88	0,47	10,25	6,00
		Seberang Mesjid	1	90	91	0,16	10,86	6,20
		Teluk Dalam	1	3	4	0,16	0,36	0,27
4	Banjarmasin Selatan	Basirih Selatan	45	15	60	7,05	1,81	4,09
		Kelayan Barat	0	10	10	-	1,21	0,68
		Kelayan Dalam	3	32	35	0,47	3,86	2,39
		Kelayan Selatan	14	17	31	2,19	2,05	2,11
		Kelayan Tengah	0	11	11	-	1,33	0,75
		Mantuil	143	6	149	22,41	0,72	10,1 6
		Tanjung Pagar	0	53	53	-	6,39	3,61
		Pemurus Baru	1	43	44	0,16	5,19	3,00
		Pemurus Dalam	0	2	2	-	0,24	0,14
		5	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	8	23	31	1,25
Alalak Tengah	10			0	10	1,57	-	0,68
Alalak Utara	21			6	27	3,29	0,72	1,84
Antasan Kecil Timur	58			61	119	9,09	7,36	8,11
Kuin Utara	18			32	50	2,82	3,86	3,41
Pangeran	14			7	21	2,19	0,84	1,43
Sungai Andai	57			4	61	8,93	0,48	4,16
Surgi Mufti	36			5	41	5,64	0,60	2,79
Total			638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tipologi kawasan kumuh berdasarkan letak geografis (kecamatan dan kelurahan) pada tabel di atas tampak bahwa kecamatan yang memiliki kawasan kumuh tertinggi adalah kecamatan Banjarmasin Timur, yakni kelurahan Pekapuran Raya berjumlah 272 responden (32,81%) yang berada di pusat kota dan Banjarmasin Selatan, yakni kelurahan Mantuil berjumlah 143 responden (22,41%) yang berada di Bantaran/badan sungai.

b. Umur

Adapun data mengenai responden berdasarkan umur pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Umur

No.	Kelompok Umur (tahun)	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran / Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	<20 tahun	2	3	5	0,31	0,36	0,34
2	20-33 tahun	113	117	230	17,71	14,11	15,68
3	33-60 tahun	498	577	1075	78,06	69,60	73,28
4	>60 tahun	25	132	157	3,92	15,92	10,70
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Data menggambarkan bahwa kawasan kumuh di kota Banjarmasin didominasi oleh kelompok umur tertinggi yakni kelompok umur antara 33-60 tahun dengan pembagian di bantaran/badan sungai sejumlah 498 (78,06%) dan pusat kota sejumlah 577 (69,60).

c. Suku

Adapun data mengenai responden berdasarkan suku pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan

pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Suku

No	Suku	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Banjar	635	662	1297	99,53	79,86	88,41
2	Dayak	2	10	12	0,31	1,21	0,82
3	Jawa	1	71	72	0,16	8,56	4,91
4	Sunda	0	1	1	-	0,12	0,07
5	Madura	0	84	84	-	10,13	5,73
6	Bali/Lombok	0	1	1	-	0,12	0,07
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Data menggambarkan bahwa suku Banjar adalah etnis terbesar yang menempati kawasan kumuh dengan jumlah 639 responden (99,53%) yang berada di bantaran/badan sungai dan 662 responden di pusat kota (79,86).

d. Status Pernikahan

Adapun data mengenai responden berdasarkan status pernikahan pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Status Pernikahan

No.	Status Pernikahan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Menikah	562	716	1278	88,09	86,37	87,12
2	Duda/Janda	73	107	180	11,44	12,91	12,27
3	Belum Nikah	3	6	9	0,47	0,72	0,61
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tipologi kawasan kumuh berdasarkan status pernikahan pada tabel di atas menunjukkan bahwa status menikah merupakan status paling dominan, yakni 562 responden (88,09%) di bantaran/badan sungai dan 716 responden (86,37%) berada di pusat kota.

e. Tanggungan Keluarga

Adapun data mengenai responden berdasarkan tanggungan keluarga pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13. Tanggungan Keluarga

No.	Tanggungan Keluarga	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	1 Orang	75	116	191	11,76	13,99	13,02
2	2 Orang	227	290	517	35,58	34,98	35,24
3	3 Orang	251	247	498	39,34	29,79	33,95
4	> 3 Orang	85	176	261	13,32	21,23	17,79
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 13 di atas menggambarkan bahwa kondisi masyarakat Banjarmasin terkait jumlah tanggungan keluarga pada kawasan kumuh yakni paling tinggi memiliki tanggungan sebesar 3 orang, yakni di bantaran/badan sungai sejumlah 251 responden (39,34%) dan 247 responden (29,79%) berada di pusat kota. Berikut disajikan ktipologi kawasan kumuh berdasarkan pendidikan keluarga.

f. Umur

Adapun data mengenai responden berdasarkan pendidikan kepala keluarga pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Pendidikan Kepala Keluarga

No.	Pendidikan Keluarga	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Tidak Sekolah	18	68	86	2,82	8,20	5,86
2	SD-SMP (Sederajat)	559	569	1128	87,62	68,64	76,89
3	SMA (Sederajat)	52	166	218	8,15	20,02	14,86
4	Diploma-Sarjana	9	26	35	1,41	3,14	2,39
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Gambaran pendidikan kepala keluarga masyarakat Banjarmasin di kawasan kumuh yakni tertinggi adalah SD-SMP (sederajat) dengan pembagian pada kawasan bantaran/badan sungai sejumlah 559 responden (87,62%) dan pusat kota sejumlah 569 responden (68,64%). Berikut disajikan tabel masyarakat Banjarmasin berdasarkan status SHM/IMB berikut ini:

g. Status SHM/IMB

Adapun data mengenai responden berdasarkan status SHM/IMB pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 15 berikut.

Tabel 15. Status SHM/IMB

No.	Status SHM/IMB	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Tidak Memiliki SHM dan IMB	333	160	493	52,19	19,30	33,61
2	Memiliki IMB, tetapi tidak memiliki SHM	133	175	308	20,85	21,11	21,00

No.	Status SHM/IMB	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
3	Memiliki SHM, tetapi tidak memiliki IMB	113	351	464	17,71	42,34	31,63
4	Memiliki SHM dan IMB	59	143	202	9,25	17,25	13,77
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Data menggambarkan bahwa masyarakat Banjarmasin yang tinggal di kawasan kumuh pada umumnya tidak memiliki SHM/IMB, yakni di bantaran/badan jalan sebesar 333 responden (52,19%) dan pusat kota sebesar 160 responden (19,30%). Sedangkan yang memiliki SHM/IMB hanya berjumlah 59 responden (9,25%) di bantaran/badan jalan dan berjumlah 143 responden (17,25%) di pusat kota. Selanjutnya diuraikan proses kepemilikan SHM/IMB sebagai berikut:

h. Proses Kepemilikan SHM/IMB

Adapun data mengenai responden berdasarkan status Kepemilikan SHM/IMB pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 16 berikut.

Tabel 16. Proses Kepemilikan SHM/IMB

No.	Proses Kepemilikan SHM/IMB	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Tidak Ada	333	160	493	52,19	19,30	33,61
2	Dikeluarkan instansi terkait	145	638	783	22,73	76,96	53,37

No.	Proses Kepemilikan SHM/IMB	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
3	Jasa Pihak Lain	77	9	86	12,07	1,09	5,86
4	Pemilik Sebelumnya	83	22	105	13,01	2,65	7,16
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Data menggambarkan bahwa masyarakat Banjarmasin yang tinggal di kawasan kumuh menyatakan bahwa proses kepemilikan SHM/IMB paling tinggi dikeluarkan oleh instansi terkait sejumlah 145 responden (22,73%) dan di pusat kota berjumlah 638 responden (76,96%). Selanjutnya diuraikan data tentang relokasi sebagai berikut:

i. Relokasi

Adapun data mengenai responden berdasarkan relokasi pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 17 berikut.

Tabel 17. Relokasi

No.	Relokasi	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Tidak berkenan di relokasi dengan alasan Lama Menetap	57	19	76	8,93	2,29	5,18
2	Tidak berkenan di relokasi	41	15	56	6,43	1,81	3,82

No.	Relokasi	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
	dengan alasan dekat lokasi kerja						
3	Tidak berkenan di relokasi dengan alasan warisan keluarga	106	25	131	16,61	3,02	8,93
4	Tidak berkenan di relokasi dengan alasan tidak sesuai ganti untung	94	76	170	14,73	9,17	11,59
5	Berkenan dilakukan relokasi	140	30	170	21,94	3,62	11,59
6	Tidak Ada	200	664	864	31,35	80,10	58,90
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Data menggambarkan bahwa masyarakat Banjarmasin yang tinggal di kawasan kumuh menyatakan umumnya berkenan dilakukan renovasi dengan jumlah 140 responden (21,94%) (bantaran/badan sungai) dan berjumlah 30 responden (3,62%) (pusat kota). Namun, terdapat 864 responden (200 responden daerah bantaran/badan sungai; 664 responden pusat kota) yang tidak memberikan jawaban atau “tidak ada” terkait pertanyaan tersebut.

Meningkatnya kawasan kumuh di kota-kota besar, termasuk kota Banjarmasin umumnya disebabkan oleh

kenaikan laju pertumbuhan penduduk yang berdampak terhadap tingginya akses terhadap kebutuhan primer, salah satunya adalah kebutuhan akan rumah tinggal. Hal itulah yang merupakan salah satu pemicu munculnya permukiman kumuh (Wimardana, A. S., 2016). Tumbuhnya kawasan kumuh di kota Banjarmasin, khususnya daerah bantaran sungai dapat dianalisis berdasarkan konsep perilaku sosio-ekonomi individu masyarakat Banjar di bantaran sungai Martapura sebagaimana hasil riset Arif Rahman Nugroho, dkk. (2018) bahwa sungai bagi masyarakat Banjar adalah sebagai jalan hidup, tempat hidup, dan sungai sebagai pembentuk karakter masyarakat secara positif. Membangun rumah di tepi sungai memudahkan warga untuk mengakses kebutuhan hidupnya. Memudahkan warga untuk memiliki perjalanan yang lebih mudah dan cepat ke lokasi pertanian. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi preferensi penduduk untuk tetap bertempat tinggal di kawasan kumuh didominasi oleh faktor lokasi, diikuti oleh faktor budaya, faktor utilitas, dan pengaruh terkecil adalah faktor legalitas. Penelitian tersebut didukung penelitian sebelumnya bahwa secara historis (sejak awal abad 20) masyarakat Banjar adalah pedagang yang tidak terlepas dari sungai. Sungai merupakan urat nadi perekonomian disamping sarana efektif untuk menjalankan ekspansi-ekspansi kekuasaan, kontak-kontak perdagangan lokal dengan interinsuler indonesia dan dunia. Termasuk proses penanaman pengaruh dan pengembangan kekuasaan Belanda (Syaharuddin, 2007).

Menurut penelitian Mentayani, I. (2020) bahwa ondisi pemukiman yang tidak terkendali di bantaran sungai kota Banjarmasin membuat pemukiman di bantaran sungai menjadi kumuh. Hampir semua bantaran sungai di setiap kelurahan dikategorikan kumuh sehingga sebenarnya bantaran sungai bisa menjadi aset Kota Banjarmasin, sebaliknya justru menjadi

wajah buruk bagi kota. Program dan penataan struktur permukiman kumuh di tepian sungai di Kelurahan Sungai Bilu memang sudah dilakukan, namun pada dasarnya belum berhasil dikelola secara utuh. Identifikasi karakteristik permukiman kumuh bantaran sungai perlu dilakukan untuk mengetahui aspek dan variabel yang mempengaruhi permukiman kumuh bantaran sungai untuk kemudian dirumuskan konsep penataan yang tepat dan dapat diimplementasikan pada permukiman kumuh bantaran sungai di lokasi penelitian. Analisis data dalam mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh bantaran sungai adalah dengan penyajian data tabulasi hasil kuesioner statistik yang dilengkapi dengan pemetaan dan dokumentasi lapangan serta melalui paparan naratif. Analisis triangulasi teori digunakan untuk merumuskan konsep penataan permukiman kumuh bantaran sungai yang sesuai dan dapat dilakukan di lokasi penelitian. Hasil penelitian diperoleh karakteristik permukiman kumuh dan konsep penataan kawasan kumuh di bantaran sungai Kelurahan Sungai Bilu yaitu penataan aspek fungsi dan bentuk massa bangunan permukiman, penataan prasarana lingkungan, penataan sistem utilitas lingkungan, penataan publik, dan fasilitas sosial, serta penataan pada aspek non fisik.

2. Rumah Tangga Miskin Menurut Kriteria Badan Pusat Statistik (BPS)

Pemerintahan Desa dalam menjalankan Roda Pemerintahan dalam hal ini adalah menentukan Masyarakat Miskin harus selalu berpedoman dengan 14 Kriteria Masyarakat Miskin Menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Masyarakat bisa dikatakan miskin jika dalam Rumah Tangga tersebut setidaknya memenuhi 9 kriteria dari Badan Pusat Statistik sebagai berikut :

- a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
- b) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- c) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
- h) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
- i) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- j) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
- k) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
- l) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
- m) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
- n) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dalam sub bagian ini akan diuraikan keadaan rumah tangga miskin di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin berdasarkan standar dari Badan Pusat Statistik (BPS).

a. Status Tempat Tinggal

Adapun data mengenai responden berdasarkan status tempat tinggal pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 18 berikut.

Tabel 18. Status Tempat Tinggal

No.	Status Tempat Tinggal	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Milik Sendiri	614	797	1411	96,24	96,14	96,18
2	Sewa/ Kontrak	15	18	33	2,35	2,17	2,25
3	Menumpang	6	12	18	0,94	1,45	1,23
4	Lainnya	3	2	5	0,47	0,24	0,34
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 18 di atas menunjukkan bahwa status tempat tinggal pada tipologi kawasan kumuh dari dua indikator yang digunakan dalam menentukan persentase menunjukkan 96,24% masih tinggi pada status milik sendiri di kawasan bantaran sungai dan 0,94% pada status menumpang, sedangkan untuk kawasan pusat kota milik sendiri sebesar 96.14% dan terendah 1,45% untuk status menumpang. Jika ditarik kesimpulan, secara keseluruhan baik yang bermukim di bantaran/badan sungai dan pusat kota rata-rata status kepemilikan tempat tinggal adalah milik sendiri.

b. Lokasi Tempat Tinggal

Adapun data mengenai responden berdasarkan lokasi tempat tinggal pada survei pemetaan potensi penyaluran

pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 19 berikut.

Tabel 19. Lokasi Tempat Tinggal

No.	Lokasi Tempat Tinggal	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Dalam Kota	0	56	56	-	6,76	3,82
2	Pinggiran Kota	437	124	561	68,50	14,96	38,24
3	Di dalam Gang	200	648	848	31,35	78,17	57,81
4	Di Jalan Utama	1	1	2	0,16	0,12	0,14
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Secara persentase lokasi tempat tinggal masyarakat kumuh ini untuk tipologi bantaran/badan sungai lebih tinggi dipinggiran kota sebesar 68.50% dan terendah 0,16% di jalan utama, sedangkan pada tipologi pusat kota paling tinggi ada di dalam gang sebesar 78,17% dan terendah 0,12% di jalan utama. Sebenarnya Pemerintah Kota Banjarmasin sudah berusaha untuk dapat memperbaiki lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya program-program yang diberikan terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan kumuh. Program-program yang ada diantaranya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP), Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Namun program-program tersebut belum memberikan hasil yang signifikan jika dilihat dari sudut lokasi tempat tinggal mereka.

Permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni, dengan ciri-ciri antara lain kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan

yang terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayannya prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya.

Secara umum, apabila dilihat secara fisik, masing-masing tingkat RT kawasan kumuh tersebut memiliki karakteristik dasar yang beragam. Pertama, Karakteristik dasar yang dapat ditemui di permukiman kumuh ringan adalah adanya kedekatan dengan pusat kegiatan sosial-ekonomi berupa industri. Kedua, permukiman kumuh dengan kategori sedang permukiman ini memiliki karakteristik lokasi permukiman kumuh di daerah bantaran sungai khususnya dikawasan Kota Banjarmasin (Survei Primer, 2020).

c. Akses (Jalan)

Begitu banyak persoalan yang terlihat di kawasan kumuh kota Banjarmasin. disisi lain, berbagai upaya pemerintah kota telah dilakukan untuk melakukan penataan kawasan permukiman kumuh tersebut, akan tetapi sampai saat sekarang ini belum berhasil. Penataan maksimal hanya bisa dilakukan salah satunya membuka akses akomodasi dengan membangun jaringan akses jalan. Berdasarkan hal tersebut, pembukaan akses dengan pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu solusi untuk melakukan pembenahan di kawasan kumuh kota Banjarmasin. Pembangunan infrastruktur jalan dapat dilakukan dengan mengganti atau memambal jalan-jalan yang rusak baik jalan yang sudah berbentuk aspal. Semen/paving/beton. Tanah dan papan/kayu. Diharapkan dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan akan memudahkan untuk melakukan penataan kawasan kumuh.

Adapun data mengenai responden berdasarkan akses (jalan) pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan

dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 20 berikut.

Tabel 20. Akses (Jalan)

No.	Akses (Jalan)	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Aspal	231	167	398	36,21	20,14	27,13
2	Semen/Paving/ Beton	217	632	849	34,01	76,24	57,87
3	Tanah	9	5	14	1,41	0,60	0,95
4	Papan/Kayu	181	25	206	28,37	3,02	14,04
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 20 di atas menunjukkan bahwa kondisi akses jalan terhadap dua tipologi kawasan kumuh tersebut, gambaran data menunjukkan bahwa akses jalan aspal sebesar 36,2% lebih dominan di kawasan bantaran/badan sungai sedangkan 20,14% pada tipologi pusat kota pada akses yang sama. Akses Paling rendah untuk 2 tipologi ada pada tanah 1,4% dan 0,6%. Jika dilihat secara keseluruhan maka akses jalan semen/paving/beton menjadi dominan untuk 2 tipologi kawasan kumuh tersebut yakni masing-masing 34,01% dan 76,2%.

Adanya jalan yang baik merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung pertumbuhan suatu daerah perkotaan. Jalan juga bertujuan untuk menunjang fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan dan mendorong pemerataan pembangunan di dalam kota serta kaitan dengan daerah belakangnya (*hinterland*). Jalan memiliki tujuan dan fungsi bagi perekonomian suatu wilayah. Tujuan dan fungsi tersebut, antara lain:

- 1) Dapat membuka akses atau jalan masuk dari suatu wilayah ke wilayah lain, yang disebut fungsi *land acces*. Fungsi ini

sangat untuk meningkatkan PDRB dan mengurangi daerah yang tertinggal.

- 2) Jalan berfungsi untuk pelayanan masyarakat setempat (*community servicefunction*). Pada fungsi ini jalan dapat memberikan jasa-jasanya dalam proses pendistribusian produk, pemasaran ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat dan ekonomi lainnya.
- 3) Jalan dapat memberikan pelayanan bagi angkutan masyarakat jarak jauh dan antar kota atau wilayah, yang berfungsi sebagai *interchange community andlong distance transportation*. Fungsi jalan ini penting bagi wilayah negara yang luas karena semakin berkembangnya teknologi kendaraan bermotor khususnya angkutan jalan jauh.

d. Luas Lantai Bangunan

Adapun data mengenai responden berdasarkan luas lantai bangunan pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 21 berikut.

Tabel 21. Luas Lantai Bangunan

No.	Luas Lantai Bangunan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	21 m ²	48	48	96	7,52	5,79	6,54
2	36 m ²	442	655	1097	69,28	79,01	74,78
3	45 m ²	93	102	195	14,58	12,30	13,29
4	54 m ²	4	4	8	0,63	0,48	0,55
5	70 m ²	4	2	6	0,63	0,24	0,41
6	100 m ²	31	13	44	4,86	1,57	3,00
7	150 m ²	5	1	6	0,78	0,12	0,41
8	Lainnya	11	4	15	1,72	0,48	1,02
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Dari 14 kriteria miskin menurut BPS ; 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang. 2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. 3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester. 4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan. 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah. 8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu. 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp ,- per bulan. 13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD. 14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp ,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Tabel 21 di atas menunjukkan bahwa luas lantai bangunan di 2 tipologi kawasan kumuh kota Banjarmasin paling tinggi adalah luas lantai 36 m² 79,01% pada tipologi pusat kota dan 69,28% pada tipologi bantaran/badan sungai. Sedangkan persentase terendah masing-masing tipologi 0,63% dan 0,24% dengan luas lantai 70 m². Selanjutnya diuraikan rasio luas lantai per anggota rumah tangga pada Tabel 22 berikut.

Tabel 22. Rasio Luas Lantai per Anggota Rumah Tangga

No.	Rasio Luas Lantai per Anggota Rumah Tangga	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	<8 m ² /orang	45	120	165	7,05	14,48	11,25
2	8 m ² /orang	6	7	13	0,94	0,84	0,89
3	>8 m ² /orang	587	702	1289	92,01	84,68	87,87
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Rumah yang layak huni selain memiliki kecukupan minimal unsur ruang dan luas ruang serta kualitas dindingnya juga harus memenuhi aspek pendidikan bagi keluarga yang menempatinya. Hal tersebut diperlukan untuk meminimalisir kesenjangan hunian serta menciptakan lingkungan rumah yang nyaman serta dapat menjadi sarana pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi muda. kebutuhan kecukupan minimal terdiri dari delapan unsur ruang rumah dan luasnya bagi pendidikan keluarga. "Pertama, kamar tidur orang tua seluas 10,6 meter persegi, kamar tidur masing-masing anak remaja atau belum remaja 6,0 meter persegi, ruang keluarga 10,2 meter persegi, kamar mandi/ WC 1,7 meter persegi, dapur 2,2 meter persegi, ruang cuci dan jemur 2,25 meter persegi, ruang tamu 4 meter persegi, teras depan 4,5 meter persegi serta halaman depan 18 meter persegi atau ruang umum setiap lantai hunian rumah susun 120 meter persegi untuk tempat bermain anak usia dini.

Rumah sederhana yang layak huni bagi pendidikan keluarga harus memiliki minimal tujuh unsur ruang dengan luas ruang bangunan adalah 37,5 meter persegi untuk keluarga satu anak atau delapan unsur ruang dengan luas ruang bangunan 43,5 meter persegi untuk keluarga dua anak ditambah teras depan 4,5 meter persegi dan pekarangan depan

18 meter persegi atau ruang umum pada setiap lantai hunian Rusun 120 meter persegi untuk tempat bermain anak usia dini. Jika dilihat dari sajian tabel Rasio luas lantai sebesar 84,68% ada pada tipologi pusat kota untuk luas >8 m²/orang sedangkan 92,01% untuk tipopologi bantaran/kawasan kumuh pada kategori luas lantai yang sama.

e. Jenis Lantai Bangunan

Adapun data mengenai responden berdasarkan jenis lantai bangunan pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 23 berikut.

Tabel 23. Jenis Lantai Bangunan

No.	Jenis Lantai Bangunan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Kayu Papan Non Ulin	574	698	1272	89,97	84,20	86,71
2	Plester/Semen	2	4	6	0,31	0,48	0,41
3	Papan Ulin	56	76	132	8,78	9,17	9,00
4	Keramik	6	51	57	0,94	6,15	3,89
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 23 di atas menunjukkan penggunaan kayu papan non ulin memiliki persentase paling tinggi di masing-masing 2 tipologi kawasan kumuh yakni 89.9% dan 84,20%, sedangkan jenis lantai plester/ semen yang paling rendah antara 0,31% dan 0,48%. Data mayoritas penggunaan kayu papan non ulin ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Abi Syarwan Wimardana menyebutkan bahwa jenis lantai bangunan secara umum dikawasan kumuh Kota Banjarmasin adalah Material lantai berbahan ubin kayu dengan lapisan karpet plastik.

f. Jenis Dinding Bangunan

Adapun data mengenai responden berdasarkan jenis dinding bangunan pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 24 berikut.

Tabel 24. Jenis Dinding Bangunan

No.	Jenis Dinding Bangunan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Kayu Papan Non Ulin	553	569	1122	86,68	68,64	76,48
2	Seng/Board	40	176	216	6,27	21,23	14,72
3	Tembok Tanpa Plester Semen	3	3	6	0,47	0,36	0,41
4	Tembok dengan Plester Semen	8	55	63	1,25	6,63	4,29
5	Papan Ulin	34	26	60	5,33	3,14	4,09
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Ahrishar yang mengungkapkan bahwa sebagian besar dinding bangunan perumahan kumuh dikawasan bantaran sungai kota Banjarmasin sebagian besar merupakan kayu papan non ulin. Dari data tabel riset ini juga menunjukkan bahwa pada 2 tipologi kawasan kumuh di kota ini angka paling tinggi yaitu 86,68% dan 68,64% adalah jenis bahan kayu papan Non ulin. Secara umum Penerapan arsitektur lokal pada bangunan rumah menunjukkan adanya warisan kebudayaan yang berkembang pada suatu kawasan. Kondisi ini diamati lewat bagaimana kondisi fisik bangunan melalui ciri arsitekturnya (jenis konstruksi, penggunaan material,

komponen, ornamen, dll). Berdasarkan hasil survey, seluruh jenis konstruksi menggunakan konstruksi kayu, dengan penggunaan material kayu pada dinding dan lantai rumah masih mendominasi, namun pada material atap mengalami modifikasi menggunakan material seng sebagai pengganti sirap yang merupakan ciri khas rumah Banjar. Selain itu tingkat keberadaan ornamen khas Banjar yang menghiasi bangunan rumah hanya berkisar 11%. Secara umum, kondisi bangunan masih mempertahankan arsitektur lokal dengan jenis rumah panggung, namun permasalahan utama adalah kualitas fisik bangunan yang kurang sehingga menyebabkan tingkat kenyamanan dan keamanan yang rendah dalam menghuni bangunan tersebut.

g. Jenis Atap Bangunan

Adapun data mengenai responden berdasarkan jenis atap bangunan pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 25 berikut.

Tabel 25. Jenis Atap Bangunan

No.	Jenis Atap Bangunan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Seng/Multiroof /Sirap	630	822	1452	98,75	99,16	98,98
2	Asbes	7	2	9	1,10	0,24	0,61
3	Daun/Rumbia	1	2	3	0,16	0,24	0,20
4	Lainnya	0	3	3	0,00	0,36	0,20
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tidak berbeda dari sajian data sebelumnya, secara garis besar penggunaan seng/multiroof/sirap menjadi dominan paling tinggi jika dibandingkan dengan jenis atas asbes dan

daun/rumbia. Atap seng/multiroof/sirap memiliki angka 98,75% dan 99,16% untuk di 2 tipologi kawasan kumuh Kota Banjarmasin. Dari beberapa alasan, penggunaan bahan tersebut sangat mudah didapatkan dan cara pemasangan yang ringkas disamping itu pengaruh perkembangan zaman, permukiman tersebut mulai mengalami pergeseran orientasi bangunan dimana sungai kini menjadi halaman belakang yang secara tidak langsung memberikan andil besar terhadap sungai yang tidak lain sebagai 'obyek menderita'. Hal ini ditunjukkan makna kebudayaan sungai bagi masyarakat Kota Banjarmasin yang ditunjukkan dengan bentuk ketergantungan, pengetahuan, dan kesadaran terhadap sungai yang sudah sangat dimarjinalkan.

h. Fasilitas BAB

Adapun data mengenai responden berdasarkan fasilitas BAB pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 26 berikut.

Tabel 26. Fasilitas BAB

No.	Fasilitas BAB	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Jamban	430	122	552	67,40	14,72	37,63
2	Jamban Bersama (Komunal)	52	16	68	8,15	1,93	4,64
3	WC pribadi dengan Septic Tank	155	689	844	24,29	83,11	57,53
4	WC Umum	1	0	1	0,16	0,00	0,07
5	WC Bersama	0	2	2	0,00	0,24	0,14
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Buruknya kualitas lingkungan pada masyarakat kawasan kumuh yang penempati bantaran/badan sungai dapat terlihat secara langsung yaitu minimnya MCK yang ada, serta masyarakat yang masih memanfaatkan tempat terbuka untuk buang air atau dalam bahasa lain Jamban, mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada dengan penyediaan fasilitas MCK bagi masyarakat. Meskipun pada praktiknya fasilitas yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas tersebut, hal ini disebabkan karena sebagainya sebagai sarana untuk membuang hajat mereka. Penggunaan MCK pada sajian tabel diatas menunjukkan masyarakat lebih dominan memilih jamban sebesar 67,40% pada tipologi bantaran/badan sungai, sedangkan wc pribadi dengan septic tank lebih dominan pada tipologi pusat kota pada angka 83,11%.

i. Sumber Air Minum

Adapun data mengenai responden berdasarkan sumber air minum pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 27 berikut.

Tabel 27. Sumber Air Minum

No.	Sumber Air Minum	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Air Kemasan/ Galon/ Penyaringan	24	7	31	3,76	0,84	2,11
2	PDAM	614	822	1436	96,24	99,16	97,89
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 27 di atas menunjukkan bahwa sumber air minum yang digunakan masyarakat tipologi kawasan kumuh di

bantaran/badan sungai, persentase terbesar PDAM 96,24 % dan Air Kemasan/Galon/Penyaringan 3,76%. Selanjutnya sumber air minum yang digunakan masyarakat tipologi kawasan kumuh di pusat kota persentase terbesar PDAM 99,16% dan Air Kemasan/Galon/Penyaringan 0,84%. Berdasarkan uraian data pada tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa masyarakat tipologi kawasan kumuh yang berada di bantaran/badan sungai maupun di pusat kota hampir keseluruhan menggunakan air minum dari PDAM Bandarmasih, dikarenakan air sungai maupun air tanah sudah tidak layak untuk konsumsi.

j. Sumber Air PDAM

Adapun data mengenai responden berdasarkan sumber air PDAM pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 28 berikut.

Tabel 28. Sumber Air PDAM

No.	Sumber Air PDAM	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Meteran Sendiri	573	799	1372	89,81	96,38	93,52
2	Meteran Bersama	31	23	54	4,86	2,77	3,68
3	Air PDAM Fasilitas Umum	16	0	16	2,51	0,00	1,09
4	Beli Air PDAM	18	7	25	2,82	0,84	1,70
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 28 di atas menunjukkan bahwa sumber air PDAM yang digunakan masyarakat menurut tipologi kawasan kumuh di bantaran/badan sungai, persentase terbesar meteran sendiri 89,81%, meteran bersama 4,86%, beli air PDAM 2,82% dan Air PDAM fasilitas umum 2,51%. Selanjutnya sumber air PDAM yang digunakan masyarakat menurut tipologi kawasan kumuh di pusat kota, persentase terbesar meteran sendiri 96,38%, meteran bersama 2,77% dan beli air PDAM 0,84%.

k. Sumber Air MCK

Adapun data mengenai responden berdasarkan sumber air MCK pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 29 berikut.

Tabel 29. Sumber Air MCK

No.	Sumber Air MCK	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Air Sungai	46	15	61	7,21	1,81	4,16
2	PDAM	592	814	1406	92,79	98,19	95,84
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 29 di atas menunjukkan bahwa sumber air MCK yang digunakan masyarakat menurut tipologi kawasan kumuh di bantaran/badan sungai, persentase terbesar PDAM 92,79%, dan air sungai 7,21%. sumber air MCK yang digunakan masyarakat menurut tipologi kawasan kumuh di pusat kota, persentase terbesar PDAM 98,19% dan air sungai 1,81%. Dari hasil uraian tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa masyarakat menurut tipologi kawasan kumuh di bantaran/badan sungai maupun pusat kota sudah paham dan mengerti bahwa air sungai sudah tercemar dan tidak layak untuk kebutuhan MCK.

Selaras dengan penelitian Herlina (2018) yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan *MPN Coliform* pada air sungai, menunjukkan hasil positif 100% sebesar > 240 /100 ml sampel air (seri 7 tabung), keadaan tersebut menunjukkan bahwa air sungai sudah tercemar oleh bakteri *Coliform*, sehingga tidak memenuhi syarat kesehatan untuk di dimanfaatkan masyarakat.

1. Sumber Penerangan

Adapun data mengenai responden berdasarkan sumber penerangan pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 30 berikut.

Tabel 30. Sumber Penerangan

No.	Sumber Penerangan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	PLN Meteran Sendiri	601	770	1371	94,20	92,88	93,46
2	PLN Meteran Bersama	26	51	77	4,08	6,15	5,25
3	PLN (Menumpang)	11	8	19	1,72	0,97	1,30
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 30 di atas menunjukkan bahwa sumber penerangan yang digunakan masyarakat menurut tipologi kawasan kumuh di bantaran/badan sungai, persentase terbesar PLN meteran sendiri 94,20%, PLN meteran bersama 4,08% dan PLN (menumpang) 1,72%. Selanjutnya . sumber penerangan yang digunakan masyarakat menurut tipologi kawasan kumuh di pusat kota, persentase terbesar PLN meteran sendiri 92,88%, PLN meteran bersama 6,15% dan PLN (menumpang) 0,97%.

m. Daya PLN

Adapun data mengenai responden berdasarkan daya PLN pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 31 berikut.

Tabel 31. Daya PLN

No.	Daya PLN	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	PLN 450 VA	469	591	1060	73,51	71,29	72,26
2	PLN 900 VA	158	223	381	24,76	26,90	25,97
3	PLN 1300 VA	10	14	24	1,57	1,69	1,64
4	PLN 2200 VA	0	1	1	0,00	0,12	0,07
5	>6600 VA	1	0	1	0,16	0,00	0,07
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 31 di atas menunjukkan bahwa daya PLN yang digunakan masyarakat menurut tipologi kawasan kumuh di bantaran/badan sungai dengan rincian berikut, PLN 450 VA sebesar 94,20%, PLN 900 VA sebesar 24,76%, dan PLN 1300 VA sebesar 1,57%. Selanjutnya daya PLN yang digunakan masyarakat menurut tipologi kawasan kumuh di pusat kota, persentase terbesar PLN 450 VA 71,29%, PLN 900 VA 26,90%, PLN 1300 VA 1,69% dan PLN 2200 VA 0,12%.

n. Jenis BBM Rumah Tangga

Adapun data mengenai responden berdasarkan Jenis BBM rumah tangga pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 32 berikut.

Tabel 32. Jenis BBM Rumah Tangga

No.	Jenis BBM Rumah Tangga	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Gas LPG 3 Kg	626	826	1452	98,12	99,64	98,98
2	Gas LPG 12 Kg	7	3	10	1,10	0,36	0,68
3	Gas LPG >12 Kg	5	0	5	0,78	0,00	0,34
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 32 di atas menunjukkan bahwa jenis BBM rumah tangga yang digunakan masyarakat menurut tipologi kawasan kumuh di bantaran/badan sungai, persentase terbesar Gas LPG 3 Kg 98,12%, Gas LPG 12 Kg 1,10% dan Gas LPG >12 Kg 0,78%. Selanjutnya jenis BBM rumah tangga yang digunakan masyarakat menurut tipologi kawasan kumuh di pusat kota, persentasi terbesar Gas LPG 3 Kg 99,64% dan Gas LPG 12 Kg 0,68%.

o. Frekuensi Makan Daging/Ayam/Susu

Adapun data mengenai responden berdasarkan frekuensi makan daging/ayam/susu pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 33 berikut.

Tabel 33. Frekuensi Makan Daging/Ayam/Susu

No.	Frekuensi Makan Daging/Ayam/Susu	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	pernah, 1 kali dalam sebulan	537	613	1150	84,17	73,94	78,39
2	pernah, 1 kali dalam seminggu	95	214	309	14,89	25,81	21,06

No.	Frekuensi Makan Daging/Ayam/Susu	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
3	Hampir setiap hari	6	2	8	0,94	0,24	0,55
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 33 di atas menunjukkan bahwa frekuensi masyarakat yang mengkonsumsi daging/ayam/susu menurut tipologi kawasan kumuh di bantaran/badan sungai, persentase terbesar (pernah satu kali dalam sebulan) 84,17%, (pernah satu kali dalam seminggu) 14,89% dan (hampir setiap hari) 0,94%. Selanjutnya frekuensi masyarakat yang mengkonsumsi daging/ayam/susu menurut tipologi kawasan kumuh di pusat kota, persentase terbesar (pernah satu kali dalam sebulan) 73,94%, (pernah satu kali dalam seminggu) 25,81% dan (hampir setiap hari) 0,24%.

p. Frekuensi Pembelian Pakaian Baru

Adapun data mengenai responden berdasarkan Frekuensi Pembelian Pakaian Baru pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 34 berikut.

Tabel 34. Frekuensi Pembelian Pakaian Baru

No.	Frekuensi Pembelian Pakaian Baru	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	1 kali dalam setahun	559	627	1186	87,62	75,63	80,85
2	1 kali dalam 6 bulan	61	171	232	9,56	20,63	15,81
3	1 kali dalam 3 bulan	15	6	21	2,35	0,72	1,43

No.	Frekuensi Pembelian Pakaian Baru	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
4	1 kali per bulan	3	25	28	0,47	3,02	1,91
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 34 di atas menunjukkan bahwa frekuensi pembelian pakaian baru masyarakat Banjarmasin di kawasan kumuh paling banyak 1 kali dalam setahun dengan jumlah 559 responden (87,62%) di bantaran/badan sungai dan 627 responden (75,63%) di pusat kota.

q. Frekuensi Makan/Hari

Adapun data mengenai responden berdasarkan Frekuensi makan/hari pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 35 berikut.

Tabel 35. Frekuensi Makan/Hari

No.	Frekuensi Makan/Hari	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	<1-2 kali per hari	12	7	19	1,88	0,84	1,30
2	Rutin 2-3 kali per hari	112	85	197	17,55	10,25	13,43
3	Rutin 3 kali per hari	509	736	1245	79,78	88,78	84,87
4	> 3 kali per hari	5	1	6	0,78	0,12	0,41
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 35 di atas menggambarkan bahwa pada umumnya sebagian besar masyarakat Banjarmasin di kawasan kumuh

dapat makan rutin Rutin 3 kali per hari yakni berjumlah 509 responden (79,78%) di bantaran/badan sungai dan 736 responden (88,78%) di pusat kota. Namun, masih terdapat masyarakat kawasan kumuh yang makan rutin 2-3 kali per hari.

r. Kemampuan Berobat

Adapun data mengenai responden berdasarkan kemampuan berobat pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 36 berikut.

Tabel 36. Kemampuan Berobat

No.	Kemampuan Berobat	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Tidak sanggup membayar di Puskesmas/ Poliklinik	99	130	229	15,52	15,68	15,61
2	Membayar, dengan Kartu BPJS Kelas II	71	132	203	11,13	15,92	13,84
3	Membayar dengan Kartu BPJS Kelas II	4	11	15	0,63	1,33	1,02
4	Membayar, dengan Kartu BPJS Kelas I	4	5	9	0,63	0,60	0,61
5	Membayar dengan Peserta Umum	238	100	338	37,30	12,06	23,04
6	Kartu Indonesia Sehat (KIS)	222	451	673	34,80	54,40	45,88
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Kemampuan berobat masyarakat kumuh di kota Banjarmasin dominan sebagai peserta umum (berbayar) berjumlah 238 responden (37,30%) di bantaran/badan sungai dan 100 responden (12,06) di pusat kota. Namun, sebagian lagi telah menggunakan KIS (Kartu Indonesia Sehat) berjumlah 222 responden (34,80%) di bantaran/badan sungai dan 451 responden (54,40%) di pusat kota.

s. Jumlah Penghasilan per bulan

Adapun data mengenai responden berdasarkan jumlah penghasilan per bulan pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 37 berikut.

Tabel 37. Jumlah Penghasilan per bulan

No.	Jumlah Penghasilan per bulan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	< Rp600.000 /bulan	297	152	449	46,55	18,34	30,61
2	Rp 600.000 sd 1 juta /bulan	131	141	272	20,53	17,01	18,54
3	Rp 1 juta sd 2,5 juta /bulan	141	470	611	22,10	56,69	41,65
4	>2,5 juta sd 5 juta bulan	30	57	87	4,70	6,88	5,93
5	5-10 juta/bulan	39	8	47	6,11	0,97	3,20
6	10-20 juta/bulan	0	1	1	0,00	0,12	0,07
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Data menggambarkan bahwa masyarakat kawasan kumuh di kota Banjarmasin pada umumnya berpenghasilan Rp 1 juta sd 2,5 juta/bulan dengan komposisi di bantaran/badan

sungai berjumlah 141 responden (22,10%) dan 470 responden (56,69%) di pusat kota. Namun, penghasilan < Rp600.000 /bulan tertinggi di bantaran/badan sungai dan 152 responden (18,34%) di pusat kota.

t. Sumber Penghasilan Utama

Adapun data mengenai responden berdasarkan sumber penghasilan utama pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 38 berikut.

Tabel 38. Sumber Penghasilan Utama

No.	Sumber Penghasilan Utama	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Pedagang	57	73	130	8,93	8,81	8,86
2	TNI/POLRI	3	3	6	0,47	0,36	0,41
3	PNS	2	5	7	0,31	0,60	0,48
4	Pensiunan PNS	9	6	15	1,41	0,72	1,02
5	Buruh	243	466	709	38,09	56,21	48,33
6	Karyawan Swasta	23	23	46	3,61	2,77	3,14
7	Pegawai Honoror	174	19	193	27,27	2,29	13,16
8	Wiraswasta	55	149	204	8,62	17,97	13,91
9	Tanggung Keluarga	26	29	55	4,08	3,50	3,75
10	Nelayan	1	0	1	0,16	0,00	0,07
11	Petani	17	20	37	2,66	2,41	2,52
12	Lainnya	28	36	64	4,39	4,34	4,36
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 38 di atas dapat dimaknai bahwa sumber penghasilan utama atau jenis profesi masyarakat Banjarmasin

di kawasan kumuh umumnya adalah buruh sebesar 243 responden (38,09%) di bantaran/badan sungai dan 466 responden (56,21%) di pusat kota. Selain itu, profesi terbesar lainnya adalah wiraswasta (204 responden) (13,91%), pegawai honorer (193 responden) (13,16%), dan pedagang (130 responden) (8,86%).

u. Sumber Penghasilan Tambahan

Adapun data mengenai responden berdasarkan sumber penghasilan tambahan pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 39 berikut.

Tabel 39. Sumber Penghasilan Tambahan

No.	Sumber Penghasilan Tambahan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Bengkel/Tambal Ban/Bensin Eceran	121	6	127	18,97	0,72	8,66
2	Ternak Itik/ Ayam	2	3	5	0,31	0,36	0,34
3	Warung Kelontong	54	23	77	8,46	2,77	5,25
4	Warung Makan	5	0	5	0,78	0,00	0,34
5	Lainnya	12	3	15	1,88	0,36	1,02
6	Tidak Ada	444	794	1238	69,59	95,78	84,39
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Sumber penghasilan tambahan masyarakat Banjarmasin di kawasan kumuh pada umumnya adalah jasa Bengkel/Tambal Ban/Bensin Eceran sebesar 121 responden (18,97%) di bantaran/badan sungai dan 6 responden (0,72%) di

pusat kota. Disamping itu juga ada sebagai jasa warung kelontong 54 responden (8,46%) di bantara/badan sungai dan 23 responden (2,77%) di pusat kota. Namun, hal yang menarik adalah paling besar responden tidak memiliki (“tidak ada”) penghasilan tambahan sebesar 444 respponden (69.59%) di bantaran/badan sungai dan 794 responden (95,78%) di pusat kota.

C. Potensi dan Serapan Produk Kredit Masyarakat miskin di Lingkungan Kumuh Kota Banjarmasin

1. Potensi dan Serapan Kredit Berdasarkan Aspek Psikografis

a. Akses Penyalur Kredit

Secara umum jenis kredit berdasarkan tujuannya, yaitu: (1) Kredit produktif (*productive loan*), kredit yang diberikan dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat mempelancar produksi. (2) Kredit konsumtif (*consumer loan*), kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. (3) Kredit komersial (*commercial loan*), kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut (Bastian Indra, 2006).

Adapun data mengenai akses responden terhadap penyalur/sarana kredit pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 40 berikut.

Tabel 40. Akses terhadap Penyalur/Sarana Kredit

No.	Akses terhadap Penyalur/Sarana Kredit	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Bank KALSEL	13	1	14	2,04	0,12	0,95
2	Bank Mandiri	6	0	6	0,94	-	0,41

No.	Akses terhadap Penyalur/Sarana Kredit	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
3	Bank BRI	60	24	84	9,40	2,90	5,73
4	Bank BNI 46	9	2	11	1,41	0,24	0,75
5	Bank BTN	1	0	1	0,16	-	0,07
6	Bank BCA	1	0	1	0,16	-	0,07
7	Pegadaian	2	0	2	0,31	-	0,14
8	Koperasi	1	0	1	0,16	-	0,07
9	Leasing	100	161	261	15,67	19,42	17,79
10	Bank BRI Syariah	1	0	1	0,16	-	0,07
11	Bank BNI Syariah	2	1	3	0,31	0,12	0,20
12	BTPN Syariah	3	0	3	0,47	-	0,20
13	PNM Mandiri	1	0	1	0,16	-	0,07
14	Bank KALSEL Syariah	1	0	1	0,16	-	0,07
15	PNM Mekaar	5	0	5	0,78	-	0,34
16	PNM Mekaar Syariah	2	0	2	0,31	-	0,14
17	Tidak Ada Akses	430	640	1070	67,40	77,20	72,94
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 40 di atas menunjukkan bahwa akses terhadap penyaluran atau saran kredit menurut tipologi kawasan kumuh dibantaran atau badan sungai, persentase terbesar leasing 15,67 %, Bank BRI 9,40% dan Bank KALSEL 2,09%. Akses terhadap penyaluran atau saran kredit menurut tipologi kawasan kumuh pusat Kota, persentase terbesar Leasing 19,42%, bank BRI 2,90% dan Bank BNI 46 sebesar 0,24%. Berdasarkan tipologi kawasan kumuh bantaran sungai dan perkotaan akses terhadap penyaluran atau sasaran kredit lebih besar di perkotaan, hal ini di dukung dengan aksibilitas dan informasi yang di peroleh di wilayah perkotaan. Gidion (2011),

menyatakan dalam temuan penelitiannya faktor yang mempengaruhinya akses terhadap Penyalur/Sarana Kredit yaitu pengalaman berelasi dengan *supplier* yang relatif lama, semakin lama memiliki relasi ke *supplier*, maka akses ke perbankan semakin mudah. Terbukti dari 1.467 responden yang berada di bantaran sungai dan perkotaan berdasarkan tipologi pemukiman terdapat 72,94 % yang masih belum memiliki akses ke perbankan.

b. Jarak Ketersediaan Sarana Pembiayaan/Kredit

Adapun data mengenai Jarak ketersediaan sarana pembiayaan/kredit berdasarkan tipologi kawasan kumuh pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 41 berikut.

Tabel 41. Jarak Ketersediaan Sarana Pembiayaan/Kredit

No.	Jarak Ketersediaan Sarana Pembiayaan/ Kredit	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	< 1 km	2	4	6	0,31	0,48	0,41
2	>1-5 km	451	565	1016	70,69	68,15	69,26
3	> 5-10 km	107	48	155	16,77	5,79	10,57
4	>10-15 km	74	206	280	11,60	24,85	19,09
5	>15 km	4	6	10	0,63	0,72	0,68
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 41 di atas menunjukkan bahwa Jarak ketersediaan sarana pembiayaan/kredit menurut tipologi kawasan kumuh dibantaran atau badan sungai berkisar >1-5 km (70,69%), sedangkan dikawasan pusat kota 68,15% hal ini menggambarkan bahwa sebaran sarana pembiayaan sudah cukup baik dengan jarak yang tidak terlalu jauh.

c. Informasi Penyalur Kredit

Ada banyak sumber informasi kredit yang diterima oleh masyarakat sebelum memutuskan menentukan jenis produk pembiayaan yang dipilih, yakni: (a) pihak pembiayaan, (b) media elektronik, (c) rekan kerja, dan (d) saudara. Adapun data mengenai informasi penyalur kredit berdasarkan tipologi kawasan kumuh pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 42 berikut.

Tabel 42. Informasi Penyalur Kredit

No.	Informasi Penyalur Kredit	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Pihak Pembiayaan	27	78	105	4,23	9,41	7,16
2	Media Elektronik	6	0	6	0,94	-	0,41
3	Rekan Kerja	15	2	17	2,35	0,24	1,16
4	Teman	57	172	229	8,93	20,75	15,61
5	Saudara	28	8	36	4,39	0,97	2,45
6	Tidak Ada	505	569	1074	79,15	68,64	73,21
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 42 di atas menunjukkan bahwa Informasi penyalur kredit menurut tipologi kawasan kumuh dibantaran/badan sungai dan pusat kota masih sangat minim, hal ini dibuktikan dari 1.467 responden 73,21% yang masih belum menerima informasi terkait penyaluran kredit, adapun persentase terbesar Informasi penyalur kredit menurut tipologi kawasan kumuh dibantaran atau badan sungai diperoleh dari teman dengan persentase sebesar 8,93 % dan di kawasan pusat kota sebesar 20,75%. Kurangnya informasi produk pembiayaan/kredit

berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan bank/lembaga pembiayaan (Nasruddin, dkk, 2020).

d. Layanan Administrasi

Layanan administrasi seperti jaminan dan empati mempunyai pengaruh terhadap pengambilan kredit seorang nasabah (Astuti, 2011). Adapun data mengenai informasi layanan administrasi pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 43 berikut.

Tabel 43. Layanan Administrasi

No.	Layanan Adminstras	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Mudah	133	260	393	20,85	31,36	26,79
2	Tidak Mudah	1	2	3	0,16	0,24	0,20
3	Tidak Ada	504	567	1071	79,00	68,40	73,01
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 43 di atas menunjukkan bahwa layanan administrasi menurut tipologi kawasan kumuh di bantaran/badan sungai dan pusat kota dari 1.467 responden 73,01% masih belum menggunakan layanan bank, adapun tanggapan masyarakat yang menggunakan layanan bank menurut tipologi kawasan kumuh dibantaran/badan sungai dan pusat kota berpendapat bahwa layanan administrasi perbankan mudah dengan persentasi total sebesar 26,79%.

e. Proses Layanan Pegawai

Adapun data mengenai informasi proses layanan pegawai bank atau lembaga keuangan non bank pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 44 berikut.

Tabel 44. Proses Layanan Pegawai

No.	Proses Layanan Pegawai	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Tidak Baik	5	43	48	0,78	5,19	3,27
2	Kurang Baik	4	142	146	0,63	17,13	9,95
3	Baik	103	57	160	16,14	6,88	10,91
4	Sangat Baik	21	19	40	3,29	2,29	2,73
5	Tidak Ada	505	568	1073	79,15	68,52	73,14
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 44 di atas menunjukkan bahwa proses layanan pegawai menurut tipologi kawasan kumuh di bantaran/badan sungai dan pusat kota dari 1.467 responden 73,14% masih belum menggunakan layanan bank, adapun tanggapan masyarakat yang menggunakan layanan bank menurut tipologi kawasan kumuh di bantaran/badan sungai dan pusat kota berpendapat bahwa proses layanan pegawai perbankan baik dengan persentase total sebesar 10,91%.

f. Keamanan

Keamanan sangat penting bagi setiap nasabah agar selama bertransaksi terhindar dari berbagai hal yang dapat merugikan dirinya, kondisi keamanan di lokasi pembiayaan, khawatir tertelan terhadap mesin ATM, dan kejahatan perbankan lainnya. Adapun data mengenai informasi keamanan bank atau lembaga keuangan non bank pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 45 berikut.

Tabel 45. Keamanan

No.	Keamanan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Tidak Aman	4	47	51	0,63	5,67	3,48
2	Cukup Aman	2	143	145	0,31	17,25	9,88
3	Aman	107	53	160	16,77	6,39	10,91
4	Sangat Aman	20	18	38	3,13	2,17	2,59
5	Tidak Ada	505	568	1073	79,15	68,52	73,14
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 45 di atas menunjukkan bahwa keamanan dalam hal menggunakan jasa bank menurut tipologi kawasan kumuh di bantaran/badan sungai dan pusat kota dari 1.467 responden 73,14% masih belum menggunakan jasa bank, adapun tanggapan masyarakat yang menggunakan jasa bank menurut tipologi kawasan kumuh di bantaran/badan sungai dan pusat kota berpendapat bahwa menggunakan jasa bank aman dengan persentase sebesar 10,91%.

g. Kepuasan Layanan

Adapun data mengenai informasi proses kepuasan layanan pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 46 berikut.

Tabel 46. Kepuasan Layanan

No.	Kepuasan Layanan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Tidak Puas	1	0	1	0,16	-	0,07
2	Kurang Puas	3	145	148	0,47	17,49	10,09
3	Puas	126	116	242	19,75	13,99	16,50

No.	Kepuasan Layanan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
4	Sangat Puas	2	0	2	0,31	-	0,14
5	Tidak Ada	506	568	1074	79,31	68,52	73,21
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 46 di atas menunjukkan bahwa kepuasan layanan menurut tipologi kawasan kumuh di bantaran/badan sungai dan pusat kota dari 1.467 responden 242 responden menyatakan puas terhadap pelayanan perbankan dengan persentase total sebesar 16,50% namun masih ada yang merasa kurang puas dengan persentase total sebesar 10,09%. Hal ini selaras dengan beberapa penelitian yang menemukan bahwa kualitas layanan dapat memengaruhi kepuasan pelanggan, sebagaimana yang di jelaskan oleh Ganguli & Roy (2011) bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh positif pada kepuasan nasabah. Begitu juga Santiago & Saura (2011) memastikan bahwa kualitas jasa berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen.

h. Tingkat Suku Bunga

Adapun data mengenai informasi tingkat suku bunga pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 47 berikut.

Tabel 47. Tingkat Suku Bunga

No.	Tingkat Suku Bunga	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Rendah	65	37	102	10,19	4,46	6,95
2	Sedang	55	222	277	8,62	26,78	18,88

No.	Tingkat Suku Bunga	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
3	Tinggi	14	3	17	2,19	0,36	1,16
4	Tidak Ada	504	567	1071	79,00	68,40	73,01
	Total	638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 47 di atas menunjukkan bahwa tingkat suku bunga menurut tipologi kawasan kumuh di bantaran/badan sungai, persentase terbesar suku bunga rendah 10,19 %, sedang 8,62 % dan tinggi 2,19%. Selanjutnya masyarakat tipologi kawasan kumuh di pusat kota persentase terbesar memilih suku bunga sedang 26,78%, rendah 4,46% dan tinggi 0,36%, terdapat gambaran berdasarkan tipologi masyarakat di kawasan kumuh perkotaan dan bantaran/badan sungai dalam menentukan tingkat suku bunga. Hal ini selaras dengan pendapatnya (Tumangkeng, 2011) bahwa secara parsial suku bunga berpengaruh negatif terhadap kepuasan pelanggan Perubahan suku bunga merupakan perubahan dalam permintaan uang (kredit). Perubahan suku bunga oleh berbagai lembaga pembiayaan bank atau non bank berpengaruh terhadap permintaan kredit oleh masyarakat.

i. Jenis Agunan

Adapun data mengenai informasi kepuasan layanan pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 48 berikut.

Tabel 48. Jenis Agunan

No.	Jenis Agunan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Surat Berharga	97	215	312	15,20	25,93	21,27
2	Tanah	14	1	15	2,19	0,12	1,02
3	Bangunan	4	5	9	0,63	0,60	0,61
4	Tidak Ada	523	608	1131	81,97	73,34	77,10
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 48 di atas menunjukkan bahwa jenis agunan menurut tipologi kawasan kumuh di bantaran/badan sungai, persentase terbesar surat berharga 15,20 %, selanjutnya tanah 2,19% dan bangunan 0,63%. Selanjutnya masyarakat tipologi kawasan kumuh di pusat kota memilih jenis agunan surat berharga dengan persentase sebesar 26,78%, bangunan 0,60% dan tanah 0,12%. Selaras dalam penelitian Fitriani (2017) yang menyatakan tentang agunan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 point c SK No. 23/69/KEP/DIR yang menyebutkan agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

j. Brand (Image)

Adapun data mengenai informasi brand (image) pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 49 berikut.

Tabel 49. *Brand (Image)*

No.	<i>Brand (Image)</i>	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Tidak Menarik	2	3	5	0,31	0,36	0,34
2	Kurang Menarik	1	143	144	0,16	17,25	9,82
3	Menarik	124	111	235	19,44	13,39	16,02
4	Sangat Menarik	2	2	4	0,31	0,24	0,27
5	Tidak Ada	509	570	1079	79,78	68,76	73,55
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 49 di atas menunjukkan bahwa *Brand (Image)* dari jasa perbankan menurut tipologi kawasan kumuh di bantaran/badan sungai dan pusat kota dari 1.467 responden 16,02% menyatakan menarik. Selaras dengan penelitian Yunida (2019) yang menjelaskan bahwa adanya pengaruh yang signifikan secara simultan dari *Brand Image* terhadap keputusan nasabah memilih produk kredit cepat aman.

k. Minat Terhadap Jenis Layanan Pembiayaan

Adapun data mengenai informasi minat terhadap jenis layanan pembiayaan pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 50 berikut.

Tabel 50. Minat terhadap Jenis Layanan Pembiayaan

No.	Minat terhadap Jenis Layanan Pembiayaan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Konvensional	115	252	367	18,03	30,40	25,02
2	Syariah	19	9	28	2,98	1,09	1,91
3	Tidak Ada Pilihan	504	568	1072	79,00	68,52	73,07
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 50 di atas menunjukkan bahwa minat terhadap Jenis Layanan Pembiayaan dari jasa perbankan menurut tipologi kawasan kumuh di bantaran/badan sungai dan pusat kota dari 1.467 responden 25,02% menyatakan memilih Jenis Layanan Pembiayaan konvensional. Selaras dengan penelitian Wigati (2018) menyatakan bahwa kurangnya minat nasabah bank konvensional terhadap bank syariah yakni dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal yaitu faktor pribadi dan faktor psikologi yang meliputi; perubahan perilaku seorang individu yang bersumber dari pengalaman, keyakinan dan kenyamanan. Faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu faktor sosial yang meliputi; lingkungan, keluarga, budaya, fasilitas, pelayanan dan promosi, dan keamanan.

1. Alasan terhadap Jenis Layanan Pembiayaan

Adapun data mengenai informasi Alasan terhadap Jenis Layanan Pembiayaan (Konvensional dan Syariah) pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 51 berikut.

Tabel 51. Alasan terhadap Jenis Layanan Pembiayaan (Konvensional dan Syariah)

No.	Alasan terhadap Jenis Layanan Pembiayaan (Konvensional dan Syariah)	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Sesuai Keyakinan/ Kepercayaan	46	8	54	7,21	0,97	3,68
2	Keragaman/Fitur/ Produk yang ditawarkan	1	9	10	0,16	1,09	0,68
3	Kedekatan Akses	41	200	241	6,43	24,13	16,43
4	Bunga/Margin lebih Kecil	46	44	90	7,21	5,31	6,13

No.	Alasan terhadap Jenis Layanan Pembiayaan (Konvensional dan Syariah)	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
5	Tidak Ada	504	568	1072	79,00	68,52	73,07
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 51 di atas menunjukkan bahwa alasan terhadap jenis layanan pembiayaan (konvensional dan syariah) menurut tipologi kawasan kumuh di bantaran/badan sungai dan pusat kota dari 1.467 responden 16,43% menyatakan kedekatan akses sebagai faktor utama dalam memilih lembaga konvensional, 6,13% menyatakan bunga/margin lebih kecil dan 3,68% menyatakan sesuai keyakinan/kepercayaan. Hal ini selaras dengan penelitiannya Wigati (2018) bahwa penyebab kurangnya minat nasabah bank konvensional terhadap bank syariah yaitu: (1) Kurangnya promosi yang dilakukan bank syariah sehingga nasabah bank konvensional awam terhadap bank syariah; dan (2) Sudah lebih dulu mengenal bank konvensional dibandingkan bank syariah.

m. Kendala terhadap Pembiayaan

Adapun data mengenai informasi Kendala terhadap Pembiayaan pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 52 berikut.

Tabel 52. Kendala terhadap Pembiayaan

No.	Kendala terhadap Pembiayaan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Tidak memiliki agunan	45	11	56	7,05	1,33	3,82

No.	Kendala terhadap Pembiayaan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
2	Tidak Berani melakukan pinjaman	481	692	1173	75,39	83,47	79,96
3	Tidak mengetahui prosedur pengajuan pinjaman	22	69	91	3,45	8,32	6,20
4	Lainnya	90	57	147	14,11	6,88	10,02
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 52 di atas menunjukkan bahwa kendala terhadap pembiayaan menurut tipologi kawasan kumuh dibantaran/badan sungai, persentase terbesar tidak berani melakukan pinjaman 75,39%, dan Tidak memiliki agunan 7,05% dan Tidak mengetahui prosedur pengajuan pinjaman 3,45%. Selanjutnya kendala terhadap pembiayaan menurut tipologi kawasan kumuh pusat Kota, persentase terbesar Tidak Berani melakukan pinjaman 83,47%, Tidak mengetahui prosedur pengajuan pinjaman 8,32% dan Tidak memiliki agunan 1,33%.

2. Potensi dan Serapan Kredit Berdasarkan Aspek Perilaku

a. Jenis Produk

Secara umum perbankan atau institusi keuangan non bank memiliki produk perhimpunan dana dan penyaluran dana. Baik bank konvensional maupun syariah menghimpun dana masyarakat melalui simpanan berupa tabungan, deposito dan giro. Produk penyaluran dana pada bank konvensional disebut dengan kredit, sedangkan pada bank syariah disebut pembiayaan (Fatriani, 2018). Jenis Produk perbankan atau

institusi keuangan non bank yang digunakan masyarakat rumah tangga miskin di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin dapat dilihat pada Tabel 53 berikut.

Tabel 53. Jenis Produk yang Digunakan

No.	Jenis Produk yang Digunakan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Pendanaan/ Simpanan/ Tabungan	2	1	3	0,31	0,12	0,20
2	Pembiayaan /Kredit	206	188	394	32,29	22,68	26,86
3	Tidak Ada	430	640	1070	67,40	77,20	72,94
	Total	638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 53 di atas menunjukkan bahwa jenis produk perbankan aatau institusi keuangan non bank yang digunakan masyarakat terbesar adalah pembiayaan/kredit yakni sebanyak 394 orang (26,86%) yang didominasi oleh masyarakat bantaran/badan sungai yakni sebanyak 206 orang (32,29%). Artinya Serapan produk kredit masyarakat rumah tangga miskin di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin lokasi bantaran/badan sungai lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi pusat kota.

b. Tujuan Kredit

Tujuan kredit berdasarkan kegunaannya terbagi 3 (tiga) yaitu: modal kerja, investasi, dan konsumtif (Bachri dan Agus, 2020), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Modal Kerja (*working capital*), digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja sehingga dapat mempelancar produksi.

- 2) Investasi (*investment*), digunakan untuk kegiatan usaha yang biasanya untuk membeli barang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan atau penggunaan barang tersebut.
- 3) Konsumtif (*consumer*), digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif.

Tujuan kredit masyarakat rumah tangga miskin di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 54 berikut.

Tabel 54. Tujuan Kredit

No.	Tujuan Kredit	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Modal Kerja	92	25	117	14,42	3,02	7,98
2	Investasi	2	2	4	0,31	0,24	0,27
3	Konsumtif	114	162	276	17,87	19,54	18,81
4	Tidak Ada	430	640	1070	67,40	77,20	72,94
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 54 di atas menunjukkan bahwa tujuan kredit masyarakat rumah tangga miskin di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin mayoritas adalah konsumtif yakni sebanyak 276 orang (18,81%), yang didominasi masyarakat yang berlokasi di pusat kota sebanyak 162 orang (19,54%). Pemilihan tujuan kredit jenis konsumtif ini dapat disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan pendapatan masyarakat rumah tangga miskin di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin, sehingga pengetahuan dalam pemilihan jenis kredit rendah dan motivasi kewirausahaan masyarakat juga rendah dikarenakan prioritas tujuan kredit yang dilakukan untuk penyangga hidup.

c. Jenis/Produk Kredit

Secara umum perbankan atau institusi keuangan non bank memiliki berbagai macam jenis produk kredit yang

mereka jual kepada nasabah. Jenis/produk kredit yang digunakan masyarakat rumah tangga miskin di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 55 berikut.

Tabel 55. Jenis/Produk Kredit

No.	Jenis/Produk Kredit	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	BPD KALSEL-KMK Umum	5	0	5	0,78	-	0,34
2	BPD KALSEL-Kredit Investasi	1	1	2	0,16	0,12	0,14
3	BPD KALSEL-KUR Micro	5	0	5	0,78	-	0,34
4	BPD KALSEL-Kredit Properti	1	0	1	0,16	-	0,07
5	BPD KALSEL-Kendaraan Bermotor	1	0	1	0,16	-	0,07
6	BPD KALSEL SYARIAH-Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah	1	0	1	0,16	-	0,07
7	BNI Griya Multiguna	1	0	1	0,16	-	0,07
8	BNI KUR	8	2	10	1,25	0,24	0,68
9	Kredit Usaha Mikro	6	0	6	0,94	-	0,41
10	BRI-KUR Mikro BRI	44	23	67	6,90	2,77	4,57
11	BRI-Kredit Investasi	1	1	2	0,16	0,12	0,14

No.	Jenis/Produk Kredit	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
12	BRI-Kredit Pangan	9	0	9	1,41	-	0,61
13	BRI-KUPEDES BRI	2	0	2	0,31	-	0,14
14	BRI-Kredit Kendaraan Bermotor	4	0	4	0,63	-	0,27
15	BCA-Kredit Kend Bermotor	1	0	1	0,16	-	0,07
16	BTN Kredit Kecil	1	0	1	0,16	-	0,07
17	Pegadaian- Kredit Cepat Aman	2	0	2	0,31	-	0,14
18	BRI SYARIAH- KPR Sejahtera BRISyariah iB	1	0	1	0,16	-	0,07
19	BNI SYARIAH-BNI Griya iB Hasanah	1	0	1	0,16	-	0,07
20	BNI SYARIAH-BNI Multiguna iB Hasanah	1	1	2	0,16	0,12	0,14
21	PNM Mekaar	6	0	6	0,94	-	0,41
22	PNM Mekaar Syariah	2	0	2	0,31	-	0,14
23	ADIRA Finance	7	32	39	1,10	3,86	2,66
24	Bussan Auto Finance (BAF)	93	125	218	14,58	15,08	14,86
25	BFI Finance	0	1	1	-	0,12	0,07
26	Bank BTPN	3	0	3	0,47	-	0,20

No.	Jenis/Produk Kredit	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
27	Federal Internasional Finance (FIF)	0	1	1	-	0,12	0,07
28	Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)	1	0	1	0,16	-	0,07
29	MANDALA Finance	0	2	2	-	0,24	0,14
30	Tidak Ada	430	640	1070	67,40	77,20	72,94
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 55 di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat rumah tangga miskin di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin memilih jenis/produk kredit Bussan Auto Finance (BAF) yang digunakan untuk konsumtif seperti kredit sepeda motor, elektronik dan furnitur yakni sebanyak 218 orang (14,86%). Tingginya pemilihan jenis/produk kredit tersebut disebabkan karena sesuai kebutuhan masyarakat dan persyaratan kredit lebih mudah serta jaminan kredit lebih ringan. Artinya temuan ini memperkuat tujuan dari pembiayaan/kredit masyarakat rumah tangga miskin di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin adalah **konsumtif**.

d. Jumlah Kredit

Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2004 menjelaskan bahwa pembiayaan atau kredit merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Besar kecilnya jumlah kredit yang diterima nasabah sangat mempengaruhi baik penggunaan atau manfaatnya.

Jumlah kredit dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kategori yaitu: 0-25 juta; 25-100 juta; dan 100.<500 juta. Adapun hasil temuan jumlah kredit pertama masyarakat rumah tangga miskin di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 56 berikut.

Tabel 56. Jumlah Kredit ke-1

No.	Jumlah Kredit ke-1	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	0-25 juta	201	185	386	31,50	22,32	26,31
2	25-100 juta	2	0	2	0,31	-	0,14
3	100-<500 juta	5	4	9	0,78	0,48	0,61
4	Tidak ada	430	640	1070	67,40	77,20	72,94
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 56 di atas menunjukkan bahwa mayoritas jumlah kredit pertama masyarakat rumah tangga miskin di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin adalah 0-25 juta (26,31%). Artinya, dapat dikatakan jumlah kredit pertama rendah, disebabkan oleh kekhawatiran resiko kemacetan angsuran, selain itu berkaitan dengan tujuan kredit yakni didominasi konsumtif bukan untuk modal usaha.

e. Angsuran Pembayaran Kredit

Angsuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menyerahkan sedikit demi sedikit, tidak sekaligus, uang yang dipakai untuk mengangsur (utang, pajak, dan sebagainya). Artinya, dapat dikatakan bahwa angsuran merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan pada pihak kreditur atas pinjaman uang yang diberikan pada debitur secara bertahap dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati guna melunasi utang pinjaman uang.

Adapun kriteria/status angsuran pembayaran kredit masyarakat rumah tangga miskin di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 57 berikut.

Tabel 57. Angsuran Pembayaran Kredit

No.	Angsuran Pembayaran Kredit	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Tidak Lancar (apabila menunggak lebih dari 2 kali)	108	128	236	16,93	15,44	16,09
2	Kurang Lancar (apabila menunggak dalam setahun tidak lebih dari 2 kali)	23	9	32	3,61	1,09	2,18
3	Lancar (apabila tidak pernah menunggak)	67	51	118	10,50	6,15	8,04
4	Sangat Lancar (sebelum jatuh tempo dana angsuran telah tersedia)	10	1	11	1,57	0,12	0,75
5	Tidak ada	430	640	1070	67,40	77,20	72,94
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 57 di atas menunjukkan bahwa mayoritas angsuran pembayaran kredit masyarakat rumah tangga miskin di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin adalah tidak lancar yakni sebanyak 236 orang (16,09%) baik di lokasi bantaran/badan sungai ataupun di pusat kota. Penyebab utama dari tidak lancarnya angsuran pembayaran kredit ini adalah tujuan dari kredit yaitu untuk konsumtif bukan untuk usaha, disisi lain pendapatan masyarakat rendah.

f. Frekuensi Peminjaman Kredit

Salah satu sumber permodalan yang sangat penting dalam membiayai kegiatan usaha adalah kredit atau pembiayaan. Di Indonesia baik usaha mikro, kecil, menengah, dan besar adalah skala bisnis yang memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan usaha. Bagi usaha mikro, kecil dan menengah aspek permodalan merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam menjalankan usahanya.

Adapun frekuensi peminjaman kredit masyarakat rumah tangga miskin di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 58 berikut.

Tabel 58. Frekuensi Peminjaman Kredit

No.	Frekuensi Peminjaman Kredit	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	1 kali di lembaga yang sama	170	176	346	26,65	21,23	23,59
2	2 kali di lembaga yang sama	26	9	35	4,08	1,09	2,39
3	3 kali di lembaga yang sama	11	2	13	1,72	0,24	0,89

No.	Frekuensi Peminjaman Kredit	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
4	2 kali dilembaga yang berbeda	0	2	2	-	0,24	0,14
5	3 kali dilembaga yang berbeda	1	0	1	0,16	-	0,07
6	Tidak Ada	430	640	1070	67,40	77,20	72,94
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 58 di atas menunjukkan bahwa mayoritas frekuensi peminjaman kredit adalah 1 kali di lembaga yang sama baik di lokasi bantaran/badan sungai atau pusat kota yakni sebanyak 346 orang (26,65%), hal disebabkan oleh tidak lancarnya angsuran pembayaran kredit, sehingga terjadi ketidakpercayaan oleh debitur kepada kreditur dalam pemberian kredit selanjutnya.

g. Minat Pengajuan Kredit

Adapun data mengenai minat pengajuan kredit responden 3 bulan sampai dengan 1 tahun kedepan pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 59 berikut.

Tabel 59. Minat Pengajuan Kredit 3 Bulan sd 1 Tahun Kedepan

No.	Minat Pengajuan Kredit 3 Bulan sd 1 Tahun Kedepan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Tidak Ada	539	662	1201	84,48	79,86	81,87
2	Ya	99	167	266	15,52	20,14	18,13
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 59 di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat rumah tangga miskin di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin tidak memiliki minat dalam pengajuan kredit, hal ini disebabkan tingkat pendapatan atau kondisi ekonomi yang rendah, sehingga tidak ada keberanian untuk melakukan pengajuan kredit, dan terkendala dengan persyaratan yang tidak dapat dipenuhi. Namun terdapat 266 orang (18,13%) yang memiliki minat dalam pengajuan kredit pada 3 bulan sampai dengan 1 tahun kedepan, yang didominasi oleh masyarakat rumah tangga miskin di pusat kota.

h. Jenis Kredit yang Diajukan

Adapun data mengenai minat jenis kredit responden pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 60 berikut.

Tabel 60. Jenis Kredit yang diajukan

No.	Jenis Kredit yang diajukan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Investasi	1	0	1	0,16	-	0,07
2	Modal Kerja	80	148	228	12,54	17,85	15,54
3	Konsumtif	18	19	37	2,82	2,29	2,52
4	Tidak Ada	539	662	1201	84,48	79,86	81,87
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 60 di atas menunjukkan bahwa mayoritas jenis kredit yang diajukan baik di lokasi bantaran/badan sungai atau pusat kota adalah modal kerja yakni sebanyak 228 orang (15,54 %), hal disebabkan oleh masyarakat sudah mulai memahami bahwa modal memang faktor yang penting apabila seseorang ingin membuka usaha sendiri, jika tidak ada modal maka angan untuk mendirikan usaha tidak bisa berjalan lancar.

3. Potensi dan Serapan Kredit Berdasarkan Aspek Tindak Lanjut

a. Minat terhadap Bank/Lembaga

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun data mengenai minat responden terhadap bank/lembaga pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 61. Minat terhadap Bank/Lembaga

No.	Minat terhadap Bank/Lembaga	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Bank KALSEL	2	0	2	0,31	-	0,14
2	Bank Mandiri	1	1	2	0,16	0,12	0,14
3	Bank BRI	31	29	60	4,86	3,50	4,09
4	Bank BNI 46	6	32	38	0,94	3,86	2,59
5	Bank BNI Syariah	1	0	1	0,16	-	0,07
6	PNM Mekaar Syariah	47	34	81	7,37	4,10	5,52
7	Tidak Ada	539	662	1201	84,48	79,86	81,87
8	Fintech	5	38	43	0,78	4,58	2,93
9	Lainnya	6	33	39	0,94	3,98	2,66
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas minat terhadap bank/lembaga baik di lokasi bantaran/badan sungai atau pusat kota yakni PNM Mekaar Syariah sebanyak 81 orang (5,52 %), hal disebabkan oleh karena sistem pembiayaan menggunakan prinsip-prinsip syariah karena uang yang mereka pinjam jauh dari praktik riba, selain menggunakan prinsip-prinsip syariah, sistem pembiayaannya juga sangat lancar dan mudah.

b. Alasan terhadap Bank/Lembaga

Adapun data mengenai alasan responden terhadap bank/lembaga pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 62 berikut.

Tabel 62. Alasan terhadap Bank/Lembaga

No.	Alasan terhadap Bank/Lembaga	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Tidak Ada	539	662	1201	84,48	79,86	81,87
2	Ringan angsurannya	75	95	170	11,76	11,46	11,59
3	Mudah prosedurnya	15	37	52	2,35	4,46	3,54
4	Banyak cabangnya	4	2	6	0,63	0,24	0,41
5	Kecil bunganya	5	33	38	0,78	3,98	2,59
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 62 di atas menunjukkan bahwa mayoritas alasan berminat terhadap bank/lembaga baik di lokasi bantaran/badan sungai atau pusat kota yakni ringan angsurannya sebanyak 170 orang (11,59 %), hal disebabkan oleh masyarakat di kawasan tersebut adalah mayoritas masyarakat

kelas bawah secara kemampuan ekonominya sehingga pertimbangan sangat terjangkau dengan pendapatan mereka agar mereka bisa membayar cicilan atas pembiayaan yg telah mereka lakukan tersebut merupakan pertimbangan utama.

c. Jumlah Pinjaman

Adapun data mengenai alasan responden terhadap bank/lembaga pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 63 berikut.

Tabel 63. Jumlah Pinjaman

No.	Jumlah Pinjaman	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Tidak Ada	539	662	1201	84,48	79,86	81,87
2	0-3 Juta	4	0	4	0,63	-	0,27
3	> 3-5 Juta	1	0	1	0,16	-	0,07
4	>5-10 Juta	2	29	31	0,31	3,50	2,11
5	>10-15 Juta	1	0	1	0,16	-	0,07
6	> 60-100 Juta	10	3	13	1,57	0,36	0,89
7	>100 Juta	81	135	216	12,70	16,28	14,72
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 63 di atas menunjukkan bahwa mayoritas jumlah pinjaman baik di lokasi bantaran/badan sungai atau pusat kota yakni >100 juta sebanyak 216 orang (14,72 %), hal disebabkan oleh tujuan masyarakat mengajukan pinjaman yaitu untuk menambah modal usaha, agar usaha yang mereka jalankan bisa lebih berkembang lagi.

d. Kemampuan Angsuran per Bulan

Adapun data mengenai kemampuan angsuran per bulan responden pada survei pemetaan potensi penyaluran

pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 64 berikut.

Tabel 64. Kemampuan Angsuran per bulan

No.	Kemampuan Angsuran per bulan	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Tidak Ada	539	662	1201	84,48	79,86	81,87
2	>Rp. 100.000- Rp.200.000	94	138	232	14,73	16,65	15,81
3	> Rp. 200.000- Rp.300.000	2	0	2	0,31	-	0,14
4	>Rp. 300.000- Rp.500.000	3	29	32	0,47	3,50	2,18
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 64 di atas menunjukkan bahwa mayoritas kemampuan angsuran per bulan baik di lokasi bantaran/badan sungai atau pusat kota yakni >Rp. 100.000 - Rp.200.000 sebanyak 232 orang (15,81 %), hal disebabkan oleh masyarakat sangat terbatas kemampuan ekonominya sehingga alternatif sistem pembayaran yang dipilih bank/lembaga yang menyediakan sistem mingguan atau bulanan, sehingga mereka yakin mampu untuk membayar cicilan tersebut.

e. Frekuensi Kemampuan Angsuran

Adapun data mengenai frekuensi kemampuan angsuran per bulan responden pada survei pemetaan potensi penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 65 berikut.

Tabel 65. Frekuensi Kemampuan Angsuran

No.	Frekuensi Kemampuan Angsuran	Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
		Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Total
1	Tidak Ada	539	662	1201	84,48	79,86	81,87
2	6 Kali Angsuran	3	0	3	0,47	-	0,20
3	12 Kali Angsuran	3	31	34	0,47	3,74	2,32
4	18 Kali Angsuran	8	0	8	1,25	-	0,55
5	36 Kali Angsuran	1	0	1	0,16	-	0,07
6	> 36 Kali Angsuran	84	136	220	13,17	16,41	15,00
Total		638	829	1467	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2020 (diolah)

Tabel 65 di atas menunjukkan bahwa mayoritas frekuensi kemampuan angsuran baik di lokasi bantaran/badan sungai atau pusat kota yakni >36 kali angsuran sebanyak 220 orang (15,00 %), hal disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh yang kurang dengan pendapatan harian yang sangat rendah.

D. Strategi Pengembangan Jasa Layanan di Lingkungan Kumuh Kota Banjarmasin

Jasa layanan dan produk-produk perbankan merupakan kegiatan penunjang untuk melancarkan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan keuntungan bagi bank semakin besar karena kelengkapan fasilitas dan pelayanan yang dimiliki membuat banyak calon nasabah yang mau menggunakan jasa layanan bank. Semakin

lengkap jasa-jasa bank yang bisa dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik pula. Banyak langkah yang harus disiapkan seperti kesiapan bank dalam permodalan, menyiapkan SDM yang handal dan juga didukung dengan kecanggihan teknologinya. Beberapa contoh jasa layanan, sebagai berikut:

Tabel 66. Jenis Jasa Layanan

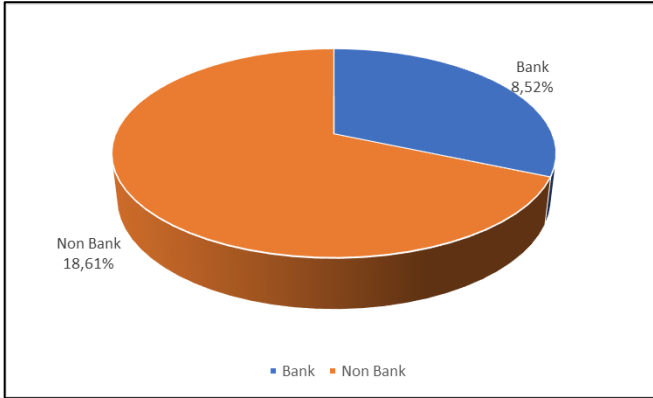
No.	Jenis Jasa Layanan	Keterangan
A	Kegiatan Bank Umum dalam Menghimpun Dana (<i>Funding</i>)	
1	Simpanan Giro (<i>Demand Deposit</i>)	Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan bilyet giro atau cek. Rekening giro biasa digunakan karena merupakan dana murah, sebab bunga yang diberikan kepada nasabah juga relatif rendah dibandingkan dengan simpanan lainnya.
2	Simpanan Tabungan (<i>Saving Deposit</i>)	Simpanan pada bank, yang penarikannya sesuai dengan persyaratan bank. Bisa melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), buku tabungan, kwitansi dan slip penarikan. Besarnya bunga tabungan tergantung kebijakan bank yang bersangkutan, namun biasanya lebih tinggi dari rekening giro.
3	Simpanan Deposito (<i>Time Deposit</i>)	Simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu. Jadi, penarikan simpanan bisa dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Jenis deposito pun beragam, contohnya : deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call.
B	Menyalurkan Dana (<i>Lending</i>)	
1	Kredit Investasi	Kredit yang diberikan kepada nasabah yang melakukan investasi atau penanaman modal. Contohnya: kredit membangun pabrik, membeli peralatan pabrik seperti mesin dan lainnya.
2	Kredit Konsumtif	Kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi. Contohnya kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor dan lainnya.
3	Kredit Profesi	Kredit yang diberikan kepada nasabah khusus, seperti dosen, dokter atau pengacara.

No.	Jenis Jasa Layanan	Keterangan
4	Kredit Modal Kerja	Kredit yang digunakan nasabah untuk modal usaha. Kredit jenis ini biasanya hanya berjangka waktu pendek atau tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Contohnya: kredit untuk membayar gaji karyawan, kredit membayar bahan baku dan kredit modal kerja lainnya.
5	Kredit Perdagangan	Kredit yang diberikan kepada pedagang untuk mengembangkan kegiatan dagangnya. Contohnya adalah untuk membeli barang dagang kepada para supplier/agen.
6	Kredit Produktif	Kredit berupa investasi modal kerja atau perdagangan. Artinya, kredit ini diberikan untuk diputar kembali sehingga pengembalian kredit adalah dari keuntungan hasil usaha yang dibiayai.
C Jasa Layanan dan Produk Bank Lainnya		
1	Kiriman Uang (<i>Transfer</i>)	Jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau pada bank yang berlainan. Pengiriman juga bisa dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota atau luar negeri.
2	Kliring (<i>Clearing</i>)	Penagihan warkat (surat berharga seperti cek dan bilyet giro) yang berasal dari dalam kota.
3	Inkaso (<i>Collection</i>)	Penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri.
4	Safe Deposit Box	Pelayanan jasa bank yang memberikan layanan penyewaan box (tempat) menyimpan barang-barang atau surat berharga milik nasabah suatu bank. Barang-barang berharga yang ditiptkan dengan menggunakan safe deposit box akan aman dari bahaya pencurian atau kebakaran.
5	Bank Card (Kartu kredit)	Kartu yang dapat digunakan untuk mengambil uang tunai atau digunakan untuk membayar sejumlah barang yang dibeli biasanya pada supermarket.
6	Bank Notes	Jasa penukaran valuta asing. Jadi, dalam jual beli bank notes, bank mengacu pada kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).

No.	Jenis Jasa Layanan	Keterangan
7	Bank Garansi	Jaminan bank yang diberikan kepada nasabah guna membiayai suatu usaha.
8	Bank Draft	Wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan oleh nasabah saat membutuhkan uang tunai.
9	Letter of Credit (L/C)	Surat kredit yang diberikan bank kepada importir dan eksportir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor dan impor yang mereka lakukan.
10	Cek Wisata (<i>Travellers Cheque</i>)	alat yang dapat digunakan untuk pembayaran di berbagai lokasi wisata perbelanjaan atau hiburan
11	Menerima setoran-setoran	Jenis layanan ini adalah yang paling sering dimanfaatkan oleh nasabah, keuntungannya adalah lebih praktis dan aman, contohnya pajak, telepon, air, listrik, uang kuliah.
12	Melayani pembayaran-pembayaran	Melayani pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya seperti Gaji/pensiun/honorarium, deviden, kupon, bonus/hadiah.

Sumber: <https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/20-contoh-jasa-layanan-bank-produk-perbankan-lengkap/>

Berdasarkan pembahasan pada bagian potensi dan serapan anggaran di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin diketahui bahwa aktivitas masyarakat pada kedua tipologi mayoritas atau 72,94% **tidak mengakses** kegiatan atau layanan pembiayaan atau yang mengakses kegiatan pembiayaan yakni 27,06% meliputi lembaga bank 8,52% dan non bank 18,61%.



Gambar 18. Masyarakat yang mengakses Kegiatan Pembiayaan

Potensi dan Serapan Lembaga Pembiayaan pada masyarakat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin terdapat 5 (lima) lembaga dominan yakni Leasing, BRI, Bank KALSEL, BNI 46, dan Bank Mandiri, selengkapnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 67. Ranking Potensi dan Serapan Lembaga Pembiayaan pada Masyarakat di lingkungan Kumuh Kota Banjarmasin

No.	Lembaga Pembiayaan	Persentase (%)	Ranking
1	Leasing	17,79	1
2	Bank BRI	5,73	2
3	Bank KALSEL	0,95	3
4	Bank BNI 46	0,75	4
5	Bank Mandiri	0,41	5
6	PNM Mekaar	0,34	6
7	Bank BNI Syariah	0,20	7
8	BTPN Syariah	0,20	7
9	Pegadaian	0,14	8
10	PNM Mekaar Syariah	0,14	8
11	Bank BTN	0,07	9
12	Bank BCA	0,07	9
13	Bank BRI Syariah	0,07	9

No.	Lembaga Pembiayaan	Persentase (%)	Ranking
14	Bank KALSEL Syariah	0,07	9
15	PNM Mandiri	0,07	9
16	Koperasi	0,07	9
	Total	27,06	

Sumber: Analisis Data Primer, 2020

Jenis produk yang mayoritas atau 99,25% yakni pembiayaan/kredit sedangkan sisanya atau 0,76% merupakan simpanan/tabungan.

Tabel 68. Jenis Produk pada Lembaga Pembiayaan yang diminati Masyarakat di Lingkungan Kumuh Kota Banjarmasin

No	Lembaga Pembiayaan	Persentase (%) Jenis Produk yang Digunakan			Ranking
		Pendanaan/ Simpanan /Tabungan	Pembiayaan/ Kredit	Total	
1	Leasing	-	65,74	65,74	1
2	Bank BRI	-	21,16	21,16	2
3	Bank KALSEL	-	3,53	3,53	3
4	Bank BNI 46	-	2,77	2,77	4
5	Bank Mandiri	-	1,51	1,51	5
6	PNM Mekaar	-	1,26	1,26	6
7	Bank BNI Syariah	0,50	0,25	0,76	7
8	BTPN Syariah	-	0,76	0,76	7
9	Pegadaian	-	0,50	0,50	8
10	PNM Mekaar Syariah	-	0,50	0,50	8
11	Bank BTN	-	0,25	0,25	9
12	Bank BCA	-	0,25	0,25	9
13	Koperasi	-	0,25	0,25	9
14	Bank BRI Syariah	0,25	-	0,25	9
15	PNM Mandiri	-	0,25	0,25	9
16	Bank KALSEL Syariah	-	0,25	0,25	9
Total		0,76	99,24	100,00	

Sumber: Analisis Data Primer, 2020

Tujuan produk yang menjadi sasaran oleh masyarakat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin di dominasi oleh Leasing (65,74%) dan selainnya ditempati oleh lembaga pembiayaan bank maupun non bank lainnya.

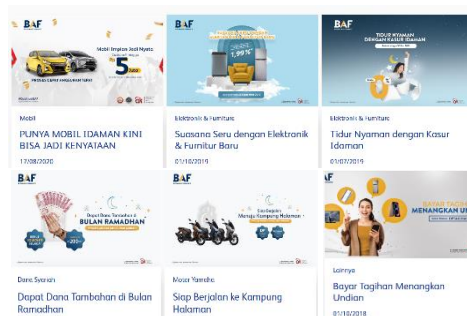
Tabel 69. Ranking Tujuan Produk Lembaga Pembiayaan yang diminati Masyarakat di Lungan Kumuh Kota Banjarmasin

No.	Lembaga Pembiayaan	Persentase (%) Tujuan Produk yang Digunakan				Ranking
		Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	Total	
1	Leasing	0,00	0,00	65,74	65,74	1
2	Bank BRI	19,65	0,50	1,01	21,16	2
3	Bank KALSEL	2,52	0,50	0,50	3,53	3
4	Bank BNI 46	2,52	0,00	0,25	2,77	4
5	Bank Mandiri	1,51	0,00	0,00	1,51	5
6	PNM Mekaar	1,26	0,00	0,00	1,26	6
7	Bank BNI Syariah	0,00	0,00	0,76	0,76	7
8	BTPN Syariah	0,50	0,00	0,25	0,76	7
9	Pegadaian	0,50	0,00	0,00	0,50	8
10	PNM Mekaar Syariah	0,50	0,00	0,00	0,50	8
11	Bank BTN	0,25	0,00	0,00	0,25	9
12	Bank BCA	0,00	0,00	0,25	0,25	9
13	Koperasi	0,00	0,00	0,25	0,25	9
14	Bank BRI Syariah	0,00	0,00	0,25	0,25	9
15	PNM Mandiri	0,25	0,00	0,00	0,25	9

No.	Lembaga Pembiayaan	Persentase (%) Tujuan Produk yang Digunakan				Ranking
		Modal Kerja	Investasi	Konsumtif	Total	
16	Bank KALSEL Syariah	0,00	0,00	0,25	0,25	9
Total		29,47	1,01	69,52	100,00	

Sumber: Analisis Data Primer, 2020

Jenis/sarana kredit dari lembaga non bank sebagai mayoritas pilihan masyarakat di lingkungan kumuh didominasi oleh Bussan Auto Finance (BAF) dengan persentase (%) 54,91%. PT Bussan Auto Finance (“Perseroan”) merupakan lembaga yang berdiri pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan, dan menjadi perusahaan joint venture antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama Perseroan pun berubah menjadi PT Danamon Mits Otomotif Finance dan tanggal 24 September 1997 diperingati sebagai hari ulang tahun Perseroan hingga saat ini. Adapun jenis produk yang ditawarkan yakni pembiayaan mobil, yamaha motor, dana syariah, Elektronik dan furnitur, mesin pertanian, dan pembiayaan fleet.



Gambar 19. Jenis Produk PT. BAF

Tabel 70. Jenis/Sarana Kredit menurut Lembaga Pembiayaan yang di Minati Masyarakat di Lingkungan Kumuh di Kota Banjarmasin

No.	Jenis/Sarana Kredit	Lembaga Pembiayaan																Total	Ranking
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Bussan Auto Finance (BAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5491	0,00	000	000	000	0,00	000	000	54,91	1
2	BRI-KUR Mikro BRI	000	000	1688	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	16,88	2
3	ADIRA Finance	0,00	000	000	000	000	000	000	000	982	000	000	000	000	000	000	000	9,82	3
4	BNI KUR	0,00	0,00	000	252	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	2,52	4
5	BRI-Kredit Pangan	0,00	0,00	227	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	2,27	5
6	Kredit Usaha Mikro	0,00	1,51	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	1,51	6
7	PNM Mekaar	0,00	0,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	025	000	126	000	1,51	6
8	BPD KALSEL-KMK Umum	1,26	0,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	1,26	7
9	BPD KALSEL-KUR Micro	1,26	0,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	1,26	7
10	BRI-Kredit Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	101	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	1,01	8
11	Bank BTPN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	076	000	000	000	000	0,76	9
12	BPD KALSEL-Kredit Investasi	050	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,50	10
13	BRI-Kredit Investasi	000	000	050	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,50	10
14	BRI-KUPEDES BRI	0,00	0,00	050	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0,50	10

No.	Jenis/Sarana Kredit	Lembaga Pembiayaan																Total	Ranking
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
15	Pegadaian-Kredit Cepat Aman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	10
16	BNI SYARIAH-BNI Multiguna iB Hasanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	10
17	PNM Mekaar Syariah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	10
18	MANDALA Finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	10
19	BPD KALSEL-Kredit Properti	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	11
20	BPD KALSEL-Kendaraan Bermotor	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	11
21	BPD KALSEL SYARIAH-Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	11
22	BNI Griya Multiguna	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	11
23	BCA-Kredit Kend Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	11
24	BTN Kredit Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	11
25	BRI SYARIAH-KPR Sejahtera BRISyariah iB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	11

No.	Jenis/Sarana Kredit	Lembaga Pembiayaan																Total	Ranking
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
26	BNI SYARIAH- BNI Griya iB Hasanah	0,00	0,00	000	000	000	000	000	000	000	000	025	000	000	000	000	000	0,25	11
27	BFI Finance	0,00	0,00	000	000	000	000	000	000	000	025	000	000	000	000	000	000	0,25	11
28	Federal Internasional Finance (FIF)	0,00	0,00	000	000	000	000	000	000	025	000	000	000	000	000	000	000	0,25	11
29	Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)	0,00	0,00	000	000	000	000	000	025	000	000	000	000	000	000	000	000	0,25	11
	Total	3,53	1,51	2116	277	025	025	050	025	6574	025	076	076	025	025	126	050	100,00	

Sumber: Analisis Data Primer, 2020

Keterangan: 1= Bank Kalsel, 2=Bank Mandiri, 3= BRI, 4= BNI 46, 5= BTN, 6= BCA, 7= Pegadaian, 8= Koperasi, 9= Leasing, 10= BRI Syariah, 11= BNI Syariah, 12= BTPN Syariah, 13= PNM Mandiri, 14= Bank Kalsel Syariah, 15= PNM Mekaar, 16= PNM Mekaar Syariah

Kelompok masyarakat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin berdasarkan berdasarkan garis kemiskinan rumah tangga pada bulan maret 2020 menurut BPS yakni Rp2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan, sehingga terdapat 55,16% (Pendapatan Rp. <600.000 sd 1 juta/bulan) yang dipastikan berada pada **garis kemiskinan** dan 34,26% yang berada pada wilayah antara miskin dan tidak miskin dengan pendapatan 1 juta sd 2,5 juta/bulan/rumah tangga dan rumah tangga bebas miskin yakni 10,58% dengan pendapatan >2,5 juta sd 10 juta /rumah tangga/bulan.

Lembaga pembiayaan yang dominan diminati oleh rumah tangga miskin di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin yakni Leasing (29,97%) rumah tangga antara miskin dan bukan miskin 30,23% dan rumah tangga bukan miskin yakni 5,54%, sedangkan posisi Bank KALSEL berada pada ranking 3 yakni 2,27% (rumah tangga miskin), 0,50% (rumah tangga antara) dan 0,76% (rumah tangga bukan miskin), sedangkan Bank KALSEL Syariah berada pada ranking 9 yakni 0,25% pada rumah tangga miskin dengan pendapatan <600.000/bulan.

Tabel 71. Ranking Lembaga Pembiayaan menurut Jumlah Pendapatan Masyarakat di Lingkungan Kumuh Kota Banjarmasin

No.	Lembaga Pembiayaan	Jumlah Pendapatan Rp/Bulan (%)							Ranking
		< Rp600.000 /bulan	Rp 600.000 sd 1 juta /bulan	Rp 1 juta sd 2,5 juta /bulan	>2,5 juta sd 5 juta bulan	5-10 juta/bulan	10-20 juta/bulan	Total	
1	Leasing	16,12	13,85	30,23	4,79	0,76	-	65,74	1
2	Bank BRI	10,58	5,04	2,52	1,51	1,51	-	21,16	2
3	Bank KALSEL	1,51	0,76	0,50	0,76	-	-	3,53	3
4	Bank BNI 46	2,02	0,25	0,25	-	0,25	-	2,77	4
5	Bank Mandiri	1,51	-	-	-	-	-	1,51	5
6	PNM Mekaar	0,76	-	0,50	-	-	-	1,26	6

No.	Lembaga Pembiayaan	Jumlah Pendapatan Rp/Bulan (%)						Total	Ranking
		< Rp600.000 /bulan	Rp 600.000 sd 1 juta / bulan	Rp 1 juta sd 2,5 juta / bulan	>2,5 juta sd 5 juta bulan	5-10 juta/bulan	10-20 juta/bulan		
7	Bank BNI Syariah	0,50	-	-	-	0,25	-	0,76	7
8	BTPN Syariah	0,25	0,25	0,25	-	-	-	0,76	7
9	Pegadaian	0,50	-	-	-	-	-	0,50	8
10	PNM Mekaar Syariah	0,50	-	-	-	-	-	0,50	8
11	Bank BTN	0,25	-	-	-	-	-	0,25	9
12	Bank BCA	-	-	-	0,25	-	-	0,25	9
13	Koperasi	-	0,25	-	-	-	-	0,25	9
14	Bank BRI Syariah	-	-	-	-	0,25	-	0,25	9
15	PNM Mandiri	-	-	-	0,25	-	-	0,25	9
16	Bank KALSEL Syariah	0,25	-	-	-	-	-	0,25	9
Total		34,76	20,40	34,26	7,56	3,02	-	100,00	

Sumber: Analisis Data Primer, 2020

Adapun jenis/sarana produk kredit menurut jumlah pendapatan rumah tangga masyarakat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin teridentifikasi secara mayoritas yakni PT. Bussan Auto Finance (BAF) pada kelompok rumah tangga miskin dengan pendapatan <600.000-1 juta/bulan (29,72%), 1 juta-2,5 juta/bulan (20,65%) dan >2,5 sd 10 juta/bulan atau rumah tangga bukan miskin (4,54%). Posisi Bank Kalsel dengan jenis produk yang paling diminati diantaranya KMK Umum, KUR Micro, Kredit Investasi, Kredit Properti, Kendaraan Bermotor, dan Pembiayaan kepemilikan rumah sejahtera syariah.

Tabel 72. Ranking Jenis/Sarana Produk Pembiayaan menurut Jumlah Pendapatan Masyarakat di Lingkungan Kumuh Kota Banjarmasin

No.	Jenis/Sarana Produk Pembiayaan	Bobot Persentase (%) menurut Jumlah Pendapatan (Rp/bulan)							Ran-king
		< Rp600.000 /bulan	Rp 600.000 sd 1 juta/ bulan	Rp 1 juta sd 2,5 juta/ bulan	>2,5 juta sd 5 juta bulan	5-10 juta/ bulan	10-20 juta/ bulan	Total	
1	Bussan Auto Finance (BAF)	16,12	13,60	20,65	3,78	0,76	-	54,91	1
2	BRI-KUR Mikro BRI	7,56	5,04	2,27	1,01	1,01	-	16,88	2
3	ADIRA Finance	-	-	8,82	1,01	-	-	9,82	3
4	BNI KUR	1,76	0,25	0,25	-	0,25	-	2,52	4
5	BRI-Kredit Pangan	2,27	-	-	-	-	-	2,27	5
6	Kredit Usaha Mikro	1,51	-	-	-	-	-	1,51	6
7	PNM Mekaar	0,76	-	0,50	0,25	-	-	1,51	6
8	BPD KALSEL-KMK Umum	0,25	0,50	-	0,50	-	-	1,26	7
9	BPD KALSEL-KUR Micro	1,01	-	0,25	-	-	-	1,26	7
10	BRI-Kredit Kendaraan Bermotor	0,50	-	-	0,25	0,25	-	1,01	8
11	Bank BTPN	0,25	0,25	0,25	-	-	-	0,76	9
12	BPD KALSEL-Kredit Investasi	-	0,25	-	0,25	-	-	0,50	10
13	BRI-Kredit Investasi	0,25	-	0,25	-	-	-	0,50	10
14	BRI-KUPEDES BRI	-	-	-	0,25	0,25	-	0,50	10
15	Pegadaian-Kredit Cepat Aman	0,50	-	-	-	-	-	0,50	10

No.	Jenis/Sarana Produk Pembiayaan	Bobot Persentase (%) menurut Jumlah Pendapatan (Rp/bulan)							Ran-king
		< Rp600.000 /bulan	Rp 600.000 sd 1 juta/ bulan	Rp 1 juta sd 2,5 juta/ bulan	>2,5 juta sd 5 juta bulan	5-10 juta/ bulan	10-20 juta/ bulan	Total	
16	BNI SYARIAH- BNI Multiguna iB Hasanah	0,50	-	-	-	-	-	0,50	10
17	PNM Mekaar Syariah	0,50	-	-	-	-	-	0,50	10
18	MANDALA Finance	-	-	0,50	-	-	-	0,50	10
19	BPD KALSEL- Kredit Properti	-	-	0,25	-	-	-	0,25	11
20	BPD KALSEL- Kendaraan Bermotor	0,25	-	-	-	-	-	0,25	11
21	BPD KALSEL SYARIAH- Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah	0,25	-	-	-	-	-	0,25	11
22	BNI Griya Multiguna	0,25	-	-	-	-	-	0,25	11
23	BCA-Kredit Kend Bermotor	-	-	-	0,25	-	-	0,25	11
24	BTN Kredit Kecil	0,25	-	-	-	-	-	0,25	11
25	BRI SYARIAH- KPR Sejahtera BRISyariah iB	-	-	-	-	0,25	-	0,25	11

No.	Jenis/Sarana Produk Pembiayaan	Bobot Persentase (%) menurut Jumlah Pendapatan (Rp/bulan)							Ran-king
		< Rp600.000 /bulan	Rp 600.000 sd 1 juta/ bulan	Rp 1 juta sd 2,5 juta/ bulan	>2,5 juta sd 5 juta bulan	5-10 juta/ bulan	10-20 juta/ bulan	Total	
26	BNI SYARIAH- BNI Griya iB Hasanah	-	-	-	-	0,25	-	0,25	11
27	BFI Finance	-	0,25	-	-	-	-	0,25	11
28	Federal Internasional Finance (FIF)	-	-	0,25	-	-	-	0,25	11
29	Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)	-	0,25	-	-	-	-	0,25	11
Total		34,76	20,40	34,26	7,56	3,02	-	100,00	

Sumber: Analisis Data Primer, 2020

Berdasarkan pembahasan di atas, maka strategi yang dimungkinkan untuk dilakukan oleh PT. BPD Kalimantan Selatan “Bank KALSEL” dalam rangka meminimalisir kompetitor pada masyarakat di lingkungan kumuh di Kota Banjarmasin, baik pada lembaga pembiayaan bank dan non bank, sebagaimana pernyataan Agus Syabarrudin, 2020 dalam Disertasinya yang berjudul “STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI MODEL PEMBIAYAAN PADA LINGKUNGAN KUMUH DI KOTA BANJARMASIN” menjelaskan suatu model pembiayaan yakni **Rahmatan Lil ‘Alamin Financing Model (RLAFM)** yang dapat dijalankan pada institusi perbankan atau RLAFM1, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 73. Faktor Internal dan Eksternal Model RLAFM1

<p style="text-align: center;">IFAS</p> <p style="text-align: center;">EFAS</p>	<p>Kekuatan (S) Luasnya jaringan Tatakelola kelembagaan SDM Dukungan Sistem Teknologi Informasi Sumber Dana</p>	<p>Kelemahan (W) Regulasi perbankan, khususnya pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang relatif belum mengakomodir persyaratan yang sesuai untuk masyarakat berpenghasilan rendah Rendahnya kreativitas bankir syariah dalam menciptakan produk yang sesuai kebutuhan dan strata ekonomi masyarakat Minimnya pemahaman bankir terhadap konsep perbankan syariah, sehingga terjadi perbedaan implemmentasi Edukasi konsep syariah belum tersosialisasi dengan baik</p>
<p>Peluang (O) Target market baru Agen perubahan untuk pemberdayaan Dapat meminimalkan Non Performing Loan/Financing (NPL/F) Meningkatnya persepsi dan minat positif masyarakat</p>	<p>STRATEGI SO Akselerasi produk dan layanan yang adaptif Optimalisasi jaringan dan pemasaran produk Efektivitas pengelolaan risiko kredit/pembiayaan Bekerjasama pada investor potensial</p>	<p>STRATEGI WO Perubahan regulasi yang adaptif Peningkatan kemampuan SDM dalam pengembangan produk yang adaptif dengan pasar Peningkatan kemampuan bankir dalam pemahaman konsep syariah secara menyeluruh Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan promosi produk syariah bersama dengan tokoh agama/ masyarakat.</p>
<p>Ancaman (T) Akselerasi non bank lebih dominan dibandingkan bank</p>	<p>STRATEGI ST</p>	<p>STRATEGI WT Kolaborasi bisnis dengan non bank</p>

<p style="text-align: center;">EFAS</p> <p style="text-align: right;">IFAS</p>	<p>Kekuatan (S) Luasnya jaringan Tatakelola kelembagaan SDM Dukungan Sistem Teknologi Informasi Sumber Dana</p>	<p>Kelemahan (W) Regulasi perbankan, khususnya pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang relatif belum mengakomodir persyaratan yang sesuai untuk masyarakat berpenghasilan rendah Rendahnya kreativitas bankir syariah dalam menciptakan produk yang sesuai kebutuhan dan strata ekonomi masyarakat Minimnya pemahaman bankir terhadap konsep perbankan syariah, sehingga terjadi perbedaan implemmentasi Edukasi konsep syariah belum tersosialisasi dengan baik</p>
<p>dalam perolehan target dan pengembangan produk Ketidaksiapan infrastruktur perbankan Ketidakpercayaan masyarakat terhadap konsep syariah</p>	<p>Pengembangan produk berbasis digital Tetap mempertahankan tenaga professional Memastikan setiap business process sesuai dengan ketentuan yang berlaku Menjalankan program promosi berhadiah</p>	<p>Konsisten melakukan pembaharuan produk Mensosialisasikan produk secara terus menerus</p>

Sumber: Syabarrudin, 2020

Selanjutnya Syabarrudin (2020) menjelaskan bahwa salah satu contoh penerapan RLA FM1 yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank di Indonesia seperti yang dijalankan

oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Syariah Tbk. (BTPN Syariah). BTPN Syariah selama ini dikenal menyalurkan pembiayaan ke masyarakat yang masuk kategori pra sejahtera dan pada dasarnya belum tersentuh layanan perbankan (bankable). Konsep kemitraan BTPN Syariah menyadur dari konsep Grameen Bank yang telah dilegalisasi melalui Undang-Undang 1 Tahun 2013. Grameen Bank sendiri dibangun berdasarkan empat prinsip berikut:

- 1) Bantuan kredit diberikan tidak perlu ada jaminan (agunan) dan/atau penjamin.
- 2) Tidak ada sanksi hukum bila anggota tidak bisa mengembalikan pinjaman dan kredit tersebut dihibahkan bila anggota meninggal dunia.
- 3) Nasabah tidak perlu datang ke kantor untuk mengurus pinjamannya, tetapi justru petugas yang mendatangi mereka.
- 4) Prosedur perkreditan dibuat sesederhana mungkin, dengan tidak menggunakan banyak formulir yang tidak dimengerti oleh nasabah.

Strategi yang diutarakan oleh Syabarrudin (2020) di atas, selanjutnya dapat dikembangkan pada tataran praktis di institusi PT. BPD Kalimantan Selatan dengan tahapan serta analisis Key Performance Indicator (KPI) pada penyusunan program, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 74. Strategi Program Pengembangan Jasa Layanan PT. BPD KALSEL

No.	Indikator Kinerja	Target Program		
		Jangka Pendek (0-5 tahun)	Jangka Menengah (5-10 tahun)	Jangka Panjang (10-15 tahun)
A	Input (Masukan)			
1	SDM	Manajemen Organisasi	Organisasi Profesional	Organisasi Profesional

No.	Indikator Kinerja	Target Program		
		Jangka Pendek (0-5 tahun)	Jangka Menengah (5-10 tahun)	Jangka Panjang (10-15 tahun)
			(Keterbukaan Promosi Jabatan)	(Keterbukaan Promosi Jabatan)
		Rekrutmen Pegawai Berbasis Prestasi dan Standar Kompetensi Keahlian (SKA)	Rekrutmen Pegawai Berbasis Prestasi dan Standar Kompetensi Keahlian (SKA)	Rekrutmen Pegawai Berbasis Prestasi dan Standar Kompetensi Keahlian (SKA)
		Kerjasama dengan Lembaga/Instansi	Kerjasama dengan Lembaga/Instansi Tingkat Regional	Kerjasama dengan Lembaga/Instansi Tingkat Nasional/Internasional
		Diklat sesuai kebutuhan	Diklat sesuai kebutuhan	Diklat sesuai kebutuhan
		Reward & Funishment	Reward & Funishment	Reward & Funishment
2	Dana	Kemudahan Prosedur/Jenis/Produk Pembiayaan yang sesuai pasar dan target	Kemudahan Prosedur/Jenis/Produk Pembiayaan yang sesuai pasar dan target	Kemudahan Prosedur/Jenis/Produk Pembiayaan yang sesuai pasar dan target
		Sosialisasi dan Promosi	Sosialisasi dan Promosi	Sosialisasi dan Promosi
3	Teknologi	Pengembangan Layanan berbasis Digital Kebutuhan Dasar/Primer	Pengembangan Layanan berbasis Digital Kebutuhan Sekunder	Pengembangan Layanan berbasis Digital Kebutuhan Tersier
B	Output (Keluaran)			
1	Kualitas SDM Pegawai	Jumlah Calon Pegawai sesuai SKA dan Penempatan Posisi Kerja	SDM Profesional dan Berkualitas	SDM berdaya Saing Internasional

No.	Indikator Kinerja	Target Program		
		Jangka Pendek (0-5 tahun)	Jangka Menengah (5-10 tahun)	Jangka Panjang (10-15 tahun)
2	Kerjasama Lembaga	Jumlah Lembaga/Instansi sesuai target	Kontribusi Lembaga/Instansi	Kontribusi Lembaga/Instansi
3	Nasabah	Jumlah Nasabah yang terjaring secara lokal	Jumlah Nasabah yang terjaring secara regional	Jumlah Nasabah yang terjaring secara Nasional/Internasional
4	Aplikasi	Jumlah Aplikasi Tingkat Dasar yang tercipta	Jumlah Aplikasi Tingkat Sekunder yang tercipta	Jumlah Aplikasi Tingkat Tersier yang tercipta
D	Outcome (Hasil)			
1	Kinerja	Kinerja Meningkat	Kinerja dan Rasio yang sehat	Kinerja dan Rasio yang sehat
2	Nasabah	Nasabah Meningkatkan secara lokal	Nasabah Meningkatkan secara regional	Nasabah Meningkatkan secara Nasional/Internasional
		Perluasan Pasar secara lokal	Perluasan Pasar secara Regional	Perluasan Pasar secara Nasional dan Internasional
E	Impact (Dampak)			
1	Kepercayaan	Kepercayaan Masyarakat KALSEL	Kepercayaan Masyarakat Regional Kalimantan	Kepercayaan Masyarakat Indonesia & Internasional

E. Proyeksi Potensi Kredit terhadap Masyarakat Miskin di Lingkungan Kumuh Kota Banjarmasin yang akan datang

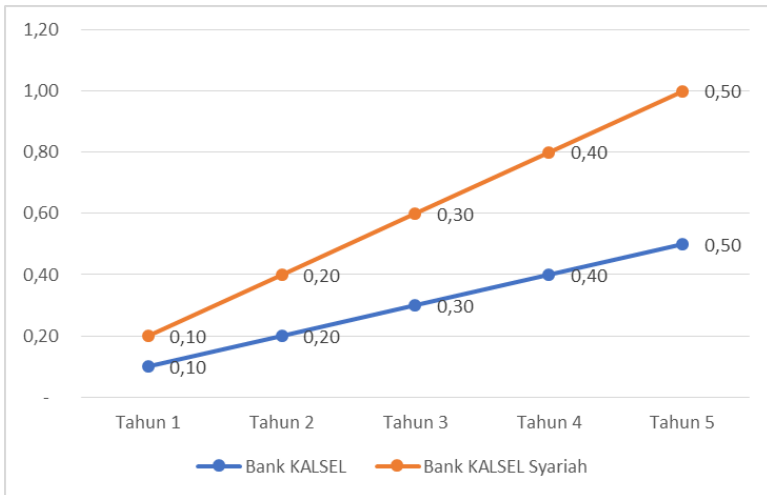
Proyeksi potensi kredit terhadap masyarakat miskin di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin pada masa yang akan datang dianalisis berdasarkan pemeringkatan Jenis/Sarana Produk Pembiayaan menurut Jumlah Pendapatan Masyarakat di Lingkungan Kumuh Kota Banjarmasin dengan serangkaian

strategi pengembangan jasa layanan. Tabel 10 menjelaskan bahwa Bussan Auto Finance (BAF) merupakan lembaga yang memperoleh peringkat Pertama dengan total bobot 54,91% dan rata-rata perolehan bobot oleh Bank KALSEL yakni 0,63% untuk jenis produk yang paling diminati masyarakat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin meliputi: **Umum, KUR Micro, Kredit Investasi, Kredit Properti, Kendaraan Bermotor, Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah**, sehingga diperlukan peningkatan kinerja sebesar 54,28% untuk setara dengan BAF atau peningkatan kinerja sebesar 55% untuk mampu di atas BAF pada tingkat input, output (30%), outcome (10%) dan impact (5%). Proyeksi potensi kredit terhadap masyarakat miskin di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin merupakan prediksi dengan memperhatikan masukkan dari kinerja Bank Kalsel saat ini menurut hasil peringkat yang diperoleh yakni tertinggi ranking 7 dan terendah ranking 11 dari 29 jenis produk yang diminati masyarakat dengan peringkat 3 untuk lembaga Bank Kalsel dan peringkat 16 untuk Bank Kalsel Syariah dari 16 lembaga pembiayaan.

Analisis utama dalam proyeksi potensi kredit yakni pemenuhan target untuk jenis pendanaan/simpanan/tabungan yakni peningkatan target kinerja 0,5% dan jenis pembiayaan/kredit yakni peningkatan kinerja 65,49% hal ini diasumsikan bahwa dalam rentang 5 tahun Bank Kalsel dan Bank Kalsel Syariah telah sejajar dengan lembaga pembiayaan yang saat ini menduduki peringkat Pertama yakni BNI Syariah dan BRI Syariah untuk jenis simpanan/tabungan sedangkan jenis pembiayaan/kredit yakni Leasing.

Tabel 75. Proyeksi Potensi Kredit dengan Peningkatan Kinerja Kelembagaan selama 5 tahun untuk Jenis-Jenis Produk Simpanan/Tabungan

Simpanan/Tabungan	Base Line	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
TARGET KINERJA (%)	0,5					
Bank KALSEL	0	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50
Bank KALSEL Syariah	0	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50



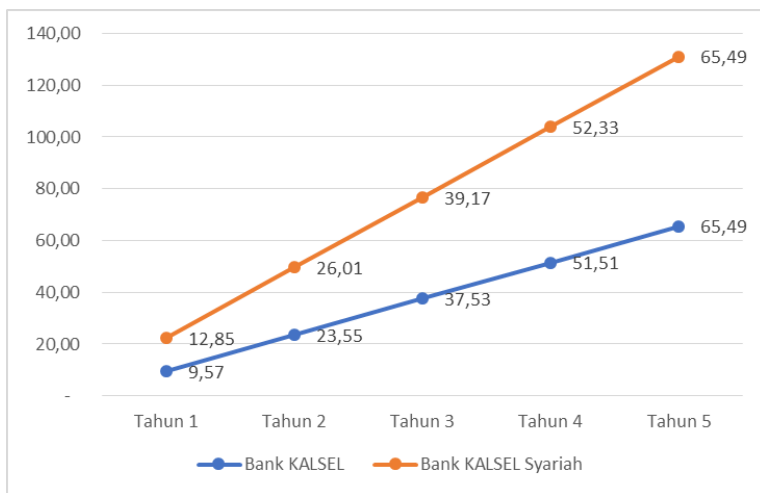
Gambar 20. Proyeksi Potensi Kredit dengan Peningkatan Kinerja Kelembagaan 0,50% selama 5 tahun untuk Jenis Jenis Produk Simpanan/Tabungan

Berdasarkan gambar dan tabel di atas diketahui bahwa lembaga Bank KALSEL dan Bank KALSEL Syariah tidak memiliki peminatan pada masyarakat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin, sehingga diperlukan peningkatan untuk memperoleh kesejajaran dengan lembaga pembiayaan lainnya yakni BNI Syariah dan BRI Syariah dengan peningkatan bobot kinerja 0,50% atau 0,10% setiap tahunnya.

Selanjutnya proyeksi potensi kredit untuk jenis/produk pembiayaan/kredit dimana posisi Bank KALSEL yakni peringkat 3 dan Bank KALSEL Syariah berada pada peringkat 16 dari 16 lembaga, sehingga diperlukan peningkatan bobot kinerja selama 5 tahun yakni 65,49% dari kondisi baseline saat ini.

Tabel 76. Proyeksi Potensi Kredit dengan Peningkatan Kinerja Kelembagaan selama 5 tahun untuk Jenis Jenis Produk Pembiayaan/Kredit

Pembiayaan/Kredit	Base Line	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
TARGET KINERJA (%)	65,49					
Bank KALSEL	3,53	9,57	23,55	37,53	51,51	65,49
Bank KALSEL Syariah	0,25	12,85	26,01	39,17	52,33	65,49



Gambar 21. Proyeksi Potensi Kredit dengan Peningkatan Kinerja 65,49% Kelembagaan selama 5 tahun untuk Jenis Jenis Produk Pembiayaan/Kredit

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Kelompok masyarakat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin berdasarkan berdasarkan garis kemiskinan rumah tangga pada bulan maret 2020 menurut BPS yakni Rp2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan, sehingga terdapat 55,16% (Pendapatan Rp. <600.000 sd 1 juta/bulan) yang dipastikan berada pada garis kemiskinan dan 34,26% yang berada pada wilayah antara miskin dan tidak miskin dengan pendapatan 1 juta sd 2,5 juta/bulan/rumah tangga dan rumah tangga bebas miskin yakni 10,58% dengan pendapatan >2,5 juta sd 10 juta /rumah tangga/bulan.
2. Aktivitas masyarakat secara mayoritas atau 72,94% tidak mengakses kegiatan atau layanan pembiayaan atau yang mengakses kegiatan pembiayaan yakni 27,06% meliputi lembaga bank 8,52% dan non bank 18,61%.
3. Potensi dan Serapan Lembaga Pembiayaan pada masyarakat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin terdapat 5 (lima) lembaga dominan yakni Leasing, BRI, Bank KALSEL, BNI 46, dan Bank Mandiri
4. Tujuan produk yang menjadi sasaran oleh masyarakat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin di dominasi oleh Leasing (65,74%) dan selainnya ditempati oleh lembaga pembiayaan bank maupun non bank lainnya (35,26%)
5. Strategi pengembangan jasa layanan di lingkungan kumuh dan dalam rangka penguatan kelembagaan di PT. BPD Kalimantan Selatan "Bank KALSEL" dapat diupayakan melalui peningkatan kinerja kelembagaan pada target input (SDM, Dana, Teknologi), Output (Kualitas SDM, Kerjasama, Nasabah, Aplikasi), Outcome

(Kinerja dan Nasabah) dan Impact adalah Kepercayaan baik lokal, regional dan Nasional/Internasional.

6. Proyeksi potensi kredit yakni pemenuhan target untuk jenis pendanaan/simpanan/tabungan yakni peningkatan target kinerja 0,5% dan jenis pembiayaan/kredit yakni peningkatan kinerja 65,49% hal ini diasumsikan bahwa dalam rentang 5 tahun Bank Kalsel dan Bank Kalsel Syariah telah sejajar dengan lembaga pembiayaan yang saat ini menduduki peringkat Pertama yakni BNI Syariah dan BRI Syariah untuk jenis simpanan/tabungan sedangkan jenis pembiayaan/kredit yakni Leasing.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat disusun rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya untuk dilakukan peningkatan kinerja kelembagaan PT. BPD Kalimantan Selatan untuk meraih kepercayaan (trust) dari masyarakat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin (khusus) dan secara umum masyarakat Kalimantan Selatan serta Indonesia
2. Perlunya disusun peta kinerja masing-masing unit kerja di PT. BPD Kalimantan Selatan untuk memperoleh gambaran dan mengambil kebijakan secara cepat, akurat dan tepat sasaran
3. Perlunya reorientasi terhadap jenis/produk yang dipastikan mampu diterima secara baik sesuai kondisi, tempat dan tingkat penghidupan masyarakat baik di lingkungan Kumuh maupun lingkungan bukan kumuh
4. Perlunya untuk segera ditindaklanjuti tentang penelitian tentang strategi pemenangan PT. BPD Kalimantan Selatan di Kalimantan Selatan dalam rangka memperoleh strategi yang telah dijalankan oleh lembaga pembiayaan lainnya yang dapat dan mampu diterima masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, B. R. (2010). Urban Poverty: a Sociological Study of Shankhamul Squatter Dhaulagiri. *Journal of Sociology and Anthropology*, Vol. 4.
- Adirinekso, G. P. (2011). Akses Usaha Mikro Kecil dan Menengah ke Perbankan di Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 6(1), 1-9.
- Alliance, C. (2008). *Slum Upgrading up Close: Experiences of Six Cities*. Washington: D.C: Jarboe.
- Ahrishar, M., dan Sulistyarso, H. (2018). Arahan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kuin Utara Kota Banjarmasin sebagai Upaya Pembentukan Identitas Kawasan. *JURNAL TEKNIK ITS*, 7 (2), 2337-3539.
- Astuti, S. (2004). Menumbuhkan Perekonomian Desa sebagai Solusi Meningkatkan Kualitas Perumahan Kota. *Jurnal Pemukiman*, 20(1).
- Azwar, A. (1990). *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Sumber Widya
- Bappenas. (2004). *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta.
- BPS. (2018). *Data dan Informasi Kemiskinan*. Jakarta: BPS.
- Chambers, R. (1995). *Poverty and Livelihood: Whose Reality Counts*. Brighton: Institute of Development Studies.
- Fatriani, R. (2018). Bentuk-bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1).

- Fitriani, I. L. (2017). Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 134-149.
- Fitria, N., & Setiawan, R. (2014). Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. *Jurnal Teknik ITS*, 3(2), C240-C244.
- Ganguli, S., & Roy, S. K. (2011). Generic Technology-Based Service Quality Dimensions in Banking: Impact On Customer Satisfaction And Loyalty. *The International Journal of Bank Marketing*, 29(2), 168-189
- Gusmaini. (2010). *Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh: Studi di Kasus Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timiur*. Bogor: Institut Pertanian Bogor (tidak dipublikasikan).
- Handoko, G., & Adrianto, B. (2012). *Mengintegrasikan Aspek Spasial Kemiskinan ke dalam Perencanaan Spasial Perkotaan: Solusi untuk Mengatasi Kemiskinan Perkotaan*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU Research Institute.
- Herlina, S. (2018). Metode Slow Sand Filter Dan Pengukuran Mpn Coliform Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Air Sungai Di Pekapuran Raya Banjarmasin. *Journal of Islamic Medicine*, 2(1), 25-33.
- Judohusodo. (1991). *Rumah untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
- Kasmir. (2013) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Komarudin. (1997). *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Jakarta: Penerbit Yayasan Realestat Indonesia-PT. Rakasindo.
- Kurniasih, S. (2007). *Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh di Petukangan Utara Jakarta Selatan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mentayani, I. (2020). Konsep Penataanpermukiman Kumuh Tepian Sungaidi Kelurahan Sungai Bilu Kota Banjarmasin. *Enviro Scienteeae Journal*.
- Moeljarto. (1995). *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Mutmainnah, M. (2018). Pengaruh Kualitas Layanan Dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa*, 10(2), 201-216.
- Nasruddin, N., Syahrudin, S., Mattiro, S., & Riadi, S. (2020). PEMETAAN POTENSI KREDIT PEDAGANG KALIMANTAN SELATAN.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 87-99.
- Prayitno. (2014). *Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh*. Yogyakarta: Gajah Madha University Press.
- Radhakrishna, R., Rao, K. H., Reddy, S., & Ravi, C. (2007). Estimation and determination of chronic poverty in India: an alternative approach. *Available at SSRN 1629259*.
- Rindarjono. (2013). *Slum kajian Permukiman Kumuh Dalam Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Media Perkasa.

- Rindarjono, G. (2012). *Slums (Kajian Permukiman Kumuh dalam Perspektif Spasial)*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Santiago, O. P., & Saura, I. G. (2011). *National index of consumer satisfaction. A proposal for a review of literature*, Cuadernos de Administración, 24(43), 35-57
- Socki, B. (1993). The Potential of Aerial Photos for Slum and Squatter Settlement Detection and Mapping. *Bangkok: Asian Pasific Remote Sensing Journal*, Vol 5 No 2.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat, Jaringan Pengaman Sosial*, Penerbit PT Gramedia. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 138-139 .
- Supriatna, T. (1997). *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama.
- Syahrudin. (2007). *Orang Banjar (Menjadi) Indonesia: Dinamika Organisasi Islam di Borneo Selatan, 1912-1942*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Tumangkeng, G. A. (2013). *Kualitas Produk, Suku Bunga dan Kualitas Pelayanan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pelanggan KPR Bank BTN Cabang Manado*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(4).
- Undang - Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November. Tentang Perbankan.

- Undang - Undang RI Nomor 10 Tahun 1998.
Tentang Pengertian Bank Perkreditan Rakyat.
- UN-Habitat. (2012). *Gender Issue Guide: Urban Planning and Design*. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.
- Untung, H. B. (2005). *Kredit perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Widayanti, S. (2012). Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 87-102.
- Wigati, P. C. (2018). *Analisis Penyebab Kurangnya Minat Nasabah Bank Konvensional terhadap Bank Syariah di Bandar Jaya* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Wimardana, A. S., & Setiawan, R. P. (2016). Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. *JURNAL TEKNIK ITS*, 5(2), c166-c171.
- Yunida, R., Nuryadin, M. T., & Kurniawati, L. D. (2019, January). PENGARUH BRAND IMAGE DAN RELATIONSHIP MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH (STUDI PADA NASABAH PRODUK KREDIT CEPAT AMAN (KCA) PT PEGADAIAN (PERSERO) UPC KURIPAN BANJARMASIN). In *Proceeding of National Conference on Asbis* (Vol. 3, pp. 474-484). Politeknik Negeri Banjarmasin

Yunus, H. S. (2000). *Dinamika Wilayah: Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.